

# DUA DEKADE KOTA BLITAR MEMILIH

*Sejarah Penyelenggaraan Pemilu di Kota Blitar*



**komisi  
pemilihan  
umum**

# **DUA DEKADE KOTA BLITAR MEMILIH**

Sejarah Penyelenggaraan Pemilu di Kota Blitar

@KPU Kota Blitar 2021

*All Right Reserved*

Diterbitkan oleh :

KPU Kota Blitar

Jalan Pemuda Sumpono No. 72, Gedog, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66132

Telp : (0342) 801065

[www.kpu.blitarkota.go.id](http://www.kpu.blitarkota.go.id)

Penyusun :

Ahmad Fahrizal Aziz, Alfa Anisa, Alfin Lulu Kamalia, Ana Fitriani, M. Candra Setyawan, Ulil Fuadah, Rosy Nursita Anggraini, Zulfa Ilma Nuriana

Editor :

Adinda RD Kinasih

Layout dan Design Cover :

Irsyadul Ibad, Hendra Burhanudin

Cetakan 1, Januari 2021

Xx

ISBN : 978-623-6183-04-5

## SAMBUTAN

PERJALANAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar telah memasuki dasawarsa kedua, meskipun sebagai sebuah penyelenggara Pemilu yang namanya beberapa kali mengalami perubahan, lembaga ini telah ada sejak Pemilu pertama tahun 1955 diselenggarakan. Dalam perjalanannya, tidak dapat dipungkiri, penyelenggara Pemilu terus mengalami berbagai tantangan diakibatkan perkembangan perpolitikan dan arus teknologi yang semakin progresif, yang pada akhirnya menuntut penyelenggara untuk mampu adaptif terhadap perkembangan tersebut. Keberadaan buku ini sesungguhnya tidak saja dimaksudkan untuk mengulang romantisme sejarah penyelenggaraan maupun penyelenggaranya tetapi lebih bagaimana buku ini mampu menginspirasi generasi penyelenggara yang akan datang membaca perkembangan-perkembangan penyelenggaraan dari masa ke masa dan mampu memproduksi gagasan inovatif sebagai jawaban atas legacy yang lahir di setiap periode penyelenggara.

Secara pribadi maupun kelembagaan diakui bahwa belum satu pun karya literasi yang lahir dari hasil penyelenggara sebelumnya padahal sesungguhnya banyak cerita yang bisa dituangkan dan ditulis untuk banyak kepentingan di masa yang akan datang. Keresahan atas minimnya karya literasi di KPU Kota Blitar, disamping karena adanya kebutuhan akan informasi yang perlu digali tentang penyelenggaraan di masa lalu, menjadi semangat penyelenggara periode 2019-2024 untuk satu suara berkomitmen melahirkan karya-karya literasi yang dibutuhkan bagi generasi yang akan datang. Lahirnya buku ini setidaknya mengawali semangat dan komitmen penyelenggara memberikan dedikasinya dengan cara yang berbeda, selain tugas-tugas mainstream mengawal tahapan yang memang wajib untuk dikelola.

Buku “Dua Dekade” ini merupakan buku ketiga dari tiga buku yang lahir di masa-masa akhir penyelenggaraan tahapan Pemilihan Serentak 2020, namun demikian buku ini merupakan satu-satunya buku yang bercerita sejarah penyelenggara dan penyelenggaraan

tahapan sejak periode awal (2004-2009) sampai dengan awal periode 2019-2024, meskipun harus diakui bahwa buku ini bukan termasuk karya masterpiece. Buku ini memang belum bisa dikatakan mampu berkisah tentang penyelenggara dan penyelenggaraan secara komprehensif, namun setidaknya ia tidak lahir dan berkisah secara parsial. Tidak komprehensif karena agak sulit memotret penyelenggaraan dari masa ke masa yang begitu kompleks hanya dalam satu buku dengan nara sumber yang juga tidak mudah untuk ditemui. Namun demikian, nara sumber yang berasal dari para penyelenggara di masing-masing periode ini bisa menjadi jaminan bahwa buku ini tidak ditulis secara parsial dan apa adanya. Buku ini memang sengaja dikemas dengan suguhan informasi yang ringan karena setidaknya mampu menjadi trigger bagi penulisan karya-karya yang akan datang.

Kami bersyukur dengan terbitnya buku ini, tidak saja telah memenuhi ekspektasi kami sejak kami melaksanakan pleno pertama kali, tetapi juga buku ini setidaknya akan mampu terus menginspirasi lahirnya karya-karya baru. Meskipun demikian, harus kami akui bahwa masih banyak yang harus dibenahi di hampir semua lini penulisan buku ini, karenanya saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan karya-karya yang lain. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil baik langsung maupun tidak langsung terhadap terbitnya buku ini, teman-teman komisioner, keluarga besar sekretariat KPU Kota Blitar, tim penulis, dan masih banyak yang tidak sanggup kami sebutkan satu persatu.

“Jika kau takut kerikil tajam melukai kakimu, setidaknya carilah cara untuk tetap mampu melewatinya.” Selamat kepada kolega-kolega saya di KPU Kota Blitar atas terbitnya karya pertama ini, semoga kita tetap mampu mencari jalan lain untuk meninggalkan warisan baik bagi semakin beratnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa yang akan datang.

**Choirul Umam S.Pd**

**Ketua KPU Kota Blitar**

# PENGANTAR PENYUSUN

## Mengabadikan Perjalanan Demokrasi di Kota Blitar

Menulis buku ini penuh perjuangan. Karena, Anda tahu semua, ini masa pandemi. Selain itu, KPU Kota Blitar sedang disibukkan oleh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Jadwal sangat padat, sehingga beberapa jadwal yang sudah diatur dalam rangka penggalan materi buku harus diundur.

Buku ini pun juga beralih konsep, yang awalnya ingin lebih heroik menulis perjuangan para komisioner sejak periode pertama, lalu berubah menjadi buku semi sejarah, yang sumber primernya dari dokumen kepemiluan yang dimiliki KPU Kota Blitar.

Namun, sumber dari para komisioner setiap periodenya juga penting, sebab karena cerita-cerita dari merekalah buku ini akan menjadi lebih “hidup”, ada sense of humanity. Akhirnya, kami menjadwalkan untuk mengadakan Dialog pada bulan Februari, namun agenda itu urung dilaksanakan karena padatnya jadwal KPU Kota Blitar.

Nah, tragisnya, karena pandemi covid19, segala aktivitas dibatasi mulai bulan Maret sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Baru aktif lagi sekitar bulan Juni, Pilwali yang rencana dilaksanakan pada 23 September pun juga diundur hingga 9 Desember. Tim penyusun buku baru berkumpul lagi bulan September, tentu dengan suasana yang berbeda.

Pertama, ada tim penyusun yang tidak bisa melanjutkan karena harus studi keluar kota. Tim yang lain pun juga demikian. Planning dirubah total, salah satu yang kami rasakan sebagai tim penyusun kemudian adalah, kurang maksimalnya dalam penggalan data.

Kedua, adalah sulitnya menghubungi narasumber/mantan komisioner untuk diwawancara. Di antara beliau ada yang sudah berumur, sehingga sangat dibatasi untuk berinteraksi dengan

masyarakat luar apalagi di masa pandemi. Ditambah juga faktor kesibukan beliau plus berbenturan dengan kesibukan tim.

Saat diadakan FGD (Focus Grup Discussion) pun tidak semua komisioner bisa hadir. Kami juga berduka karena tepat seminggu sebelum pertemuan FGD, Ketua KPU Kota Blitar periode 2014-2019, Bapak Setyo Budiono berpulang ke hadirat Illahi.

Rencana awal penulisan ini adalah akhir tahun 2019 dan awal 2020, ketika masa liburan kuliah. Bahkan rencana diluncurkan bulan September 2020. Namun ternyata, karena keadaan pula, secara praktis kami baru memulai lagi bulan September 2020.

Kami harus bolak-balik kantor KPU untuk menyesuaikan data, sebab dokumen negara tidak boleh dibawa keluar. Para komisioner pada setiap periode pun juga tidak mungkin mengingat dengan baik apa yang telah terjadi selama tahapan terdahulu saat FGD berlangsung, sehingga kami berupaya mengkombinasikan antara data dan wawancara tersebut.

Namun, dengan beragam kendala yang ada, kami bersyukur tetap bisa melanjutkan penulisan buku ini dan Alhamdulillah bisa menyelesaikannya. Hanya saja, tentu ada beberapa kekurangan, penguraian yang kurang maksimal, atau kesalahan kepenulisan yang sudah berusaha kami hindari.

Sebagaimana diskusi dengan para komisioner, khususnya Pak Edy Saputra yang adalah mantan wartawan senior, buku ini ditulis dengan gaya populer, lebih ke features, agar buku ini ringan dibaca, tidak seperti buku laporan pemilu yang kaku.

Semoga, buku ini bisa dinikmati sebagai bacaan sejarah pemilu di Kota Blitar. Kami sebagai tim penyusun sangat bangga bisa menjadi bagian penting dari upaya mengabadikan perjalanan demokrasi, khususnya bidang penyelenggaraan pemilu di Kota Blitar.

Kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan atau barangkali penyajian yang kurang memuaskan. Selamat membaca.

Tim Penyusun

## KATA PENGANTAR

Memang bila kita menilik sejarah yang ada, Pemilu Nasional telah dilaksanakan sejak tahun 1955 hingga 1996. Begitu pula Pemilu Lokal yang sempat berjalan mulai 1951 di Jogjakarta dan Manado, serta berlangsung di beberapa daerah di tahun-tahun berikutnya hingga 1958. Namun proses penyelenggaraan tersebut dilaksanakan oleh lembaga Adhoc yang bersifat tidak tetap dengan nama Lembaga Pemilihan Umum, sebelum pada akhirnya diselenggarakan secara tetap sejak ditetapkannya perubahan ketiga UUD 1995 pada tahun 2002.

Pendirian Komisi Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara Tetap, merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dari hal tersebut Komisi Pemilihan Umum secara hierarkis pada akhirnya dibentuk pada tahun 2003, termasuk salah satunya adalah KPU Kota Blitar.

Sejak berdirinya KPU Kota Blitar, terdapat beberapa penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan tingkat daerah dilaksanakan. Penyelenggaraan tersebut antara lain Pemilu Legislatif 2004, Pemilu Presiden 2004, Pemilihan Walikota Blitar 2005, Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008, Pemilihan Legislatif 2009, Pemilihan Presiden 2009, Pemilihan Walikota Blitar 2010, Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013, Pemilihan Legislatif 2014, Pemilihan Presiden 2014, Pemilihan Walikota Blitar 2015, Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, Pemilu Serentak 2019, dan Pemilihan Walikota Blitar 2020.

Dari beberapa proses penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, tentunya banyak proses yang terjadi. Khususnya menyangkut tentang iklim demokrasi di wilayah lokal maupun wilayah nasional. Dengan adanya hal tersebut, KPU Kota Blitar bermaksud ingin memotret berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi selama proses penyelenggaraan yang hampir menginjak waktu 2 dekade tersebut.



Beberapa tokoh ditetapkan menjadi penyelenggara selama KPU Kota Blitar berdiri 2003. Terhitung selama dua dekade tersebut, 17 Orang terhitung terpilih sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan. Di periode 2003–2009, Andrias Edison, Rita Triana (digantikan oleh Eko Wihadi 2008), HM Soertadji (menggantikan Abdul Haris, SE 2004), Widiyanto Nugrogo, dan Moh. Arif Majid, S.Ag. Di Periode 2009–2014 terdapat beberapa komisioner periode sebelumnya seperti Andrias Edison dan Widiyanto Nugroho dan beberapa komisioner baru seperti Abdul Basith, Setyo Budiono, dan Mashudi.

Periode 2014–2019 terdapat 2 komisioner lama, yaitu Setyo Budiono yang akhirnya terpilih sebagai ketua KPU Periode tersebut dan Mashudi. Tiga wajah baru periode ini terdapat Choirul Umam, Herwidi Bastugit0 dan Ummu Chairu Wardhani. Periode 2019–2004 terdapat satu Komisioner KPU Periode sebelumnya yang terpilih menjadi Ketua KPU Kota Blitar periode tersebut, Choirul Umam. Selebihnya terdapat wajah baru yang terdiri dari Edy Saputra yang memiliki latar belakang seorang Jurnalis, Rangga Bisma Aditya yang memiliki latar belakang sebagai seorang sosiolog, Ninik Sholikhah yang memiliki latar belakang penyelenggara tingkat kecamatan, dan Hernawan M. Khabib yang juga merupakan penyelenggara tingkat kecamatan.

Selama dua Dekade tersebut, banyak fenomena menarik yang akhirnya melatar belakangi diterbitkannya Buku 2 Dekade Kota Blitar Memilih tersebut. Beberapa diantaranya pada awal pendirian KPU sebagai lembaga tetap, belum ada regulasi yang hierarkis secara nasional, sehingga pada akhirnya dalam hal penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, terdapat beberapa regulasi yang disusun tingkat lokal.

Beberapa peristiwa yang lain adalah adanya penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 berlangsung di tengah pandemi yang selama penyelenggaraan pemilu nasional 1955 maupun pemilu lokal 1951 belum pernah dilaksanakan pemilu di tengah pandemi. Selain itu di tahun 2010, bagaimana penyelenggaraan pemilihan Walikota Blitar dilaksanakan dengan kontestan terbanyak yaitu lima pasangan calon

yang salah satu diantaranya merupakan pasangan calon independen.

Banyak hal menarik yang dipotret oleh Penyusun Buku Dua Dekade Kota Blitar Memilih. Termasuk pengalaman para penyelenggara dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang digali melalui wawancara mendalam secara pribadi. Buku ini juga menyajikan beberapa data hasil pemilu dan pemilihan, sehingga diharapkan para pembaca dapat menyelami bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan selama dua dekade.

Terakhir kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih perlu penyempurnaan. Namun, kami ingin memotret bagaimana gagasan dan sejarah penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Blitar. Sehingga sejarah tersebut dapat menjadi pijakan di masa depan dalam hal penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Seperti kata pepatah, Orang Boleh Menulis Apapun, namun tanpa Menulis Sejarah, Masa Depan tidak akan terbaca dengan Baik. Jangan Melupakan Sejarah (JAS MERAH).

**Rangga Bisma Aditya, S.Sosio**  
**Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat**  
**dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Blitar**

# Sertifikat dan Penghargaan KPU Kota Blitar





*Piagam penghargaan TERBAIK TIGA dalam kategori fasilitas jaminan kecelakaan kerja bagi badan adhoc*



*Piagam penghargaan TERBAIK KETIGA dalam kategori fasilitas jaminan kecelakaan kerja bagi badan adhoc*



*Piagam penghargaan TERBAIK SATU dalam kategori Sosialisasi pendidikan pemilih paling inovatif pemilihan serentak tahun 2020 di Jawa Timur*



*Piagam penghargaan TERBAIK DUA dalam kategori Tingkat prosentase parmas tertinggi dalam pemilihan serentak tahun 2020 di Jawa Timur*



*Piagam penghargaan TERBAIK SATU dalam kategori Sosialisasi tahap coklit pemilihan serentak lanjutan tahun 2020*



*Piagam penghargaan TERBAIK TIGA dalam kategori Antisipasi permasalahan hukum terbaik dalam pemilihan tahun 2020*





Dua Dekade Kota Blitar Memilih

---



# DAFTAR ISI

<b>Sambutan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengantar Penyusun .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar KPU .....</b>	<b>viii</b>
<b>Penghargaan dan Sertipikat.....</b>	<b>xi</b>
Menelusuri Jejak Sejarah KPU .....	1
Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum .....	2
<b>Bangkitnya Demokrasi Paska 1998, Terbentuknya KPU .....</b>	<b>3</b>
<b><i>Periode 2003-2009</i></b>	
HARAPAN BARU SELEPAS KRISIS 1998 .....	10
Periode Awal, Serba Pertama Kali .....	10
Blusukan hingga ke RT/RW .....	11
Menjadi Anggota KPU sebagai Pengabdian .....	13
PEMILU LEGISLATIF 2004, PERTARUHAN KEPERCAYAAN .....	14
PEMILIHAN PRESIDEN 2004, MOMENTUM YANG DINANTIKAN .....	17
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BLITAR 2005, HARAPAN BARU UNTUK KOTA BLITAR .....	21
PILGUB JATIM 2008, KEJUTAN DARI KOTA BLITAR .....	23
Foto Dokumentasi Pemilu Periode 2003-2009 .....	28

***Periode 2009-2014***

Jejak Pemilu Generasi Kedua ..... 36

Memilih Ketua Generasi Kedua ..... 37

Anggaran dan Sosialisasi Aman Terkendali ..... 39

Demo dan Kenangan di Masa Lalu ..... 40

**EKSISTENSI PARPOL DI AJANG PEMILU LEGISLATIF 2009 ..... 42**

Dari Coblos ke Centang ..... 43

Surat Suara yang Tertukar ..... 44

Masalah Pasti Ada ..... 45

Ketika Parpol Baru Mencoba Keberuntungan ..... 47

**INDONESIA MEMILIH PRESIDEN ..... 50**

Ketika 400 Nama Pemilih Dicoret dari Daftar ..... 51

Upaya Membujuk Masyarakat Pemilih ..... 52

KPU Berbelanja untuk Calon Presiden ..... 53

Menilik Hasil Laga Pilpres-Wapres ..... 54

**KONTESTASI LIMA KANDIDAT WALI KOTA BLITAR ..... 59**

Menyambut Hajat Kota ..... 60

Memburu Anggaran ..... 62

Pembentukan Laskar Pemilukada ..... 62

Kampanye Pawai Damai ..... 64

Panas-Dingin di Tubuh Komisioner ..... 65

**EMPAT KANDIDAT KETAT DI PILGUB JATIM 2013 ..... 66**

AKHIR DARI PERIODE KEDUA .....	70
Foto Dokumentasi Pemilu Periode 2009-2014 .....	72
PROFIL KOMISIONER PERIODE 2009-2014 .....	74

### ***Periode 2014-2019***

KIPRAH PESTA DEMOKRASI DI KOTA BLITAR .....	85
Persiapan Memilih Komisioner KPU Kota Blitar.....	85
Anggaran Dibalik Layar .....	87
LIKA-LIKU PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 .....	89
Menyisir DPT .....	90
Partai Politik pada Pemilihan Legislatif 2014 .....	92
DI BALIK PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014 .....	96
Alur Kampanye Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 .....	98
Perjalanan Logistik Pemilu.....	99
Pentingnya Partisipasi Masyarakat .....	100
Masalah yang Tiba-Tiba Datang .....	101
PERJALANAN PILKADA TAHUN 2015 .....	101
Launching Pilkada.....	105
Sigap Tanggap.....	106
Distribusi Kelengkapan Pemilu .....	106
Kampanye Damai .....	106
Kontes Puncak .....	107
PILGUB JATIM 2018, RIVAL YANG KEMBALI BERTEMU .....	109

Harapan KPU .....	111
Foto Dokumentasi Periode 2014-2019 .....	113
PROFIL KOMISIONER PERIODE 2014-2019 .....	115

### ***Periode 2019-2024***

PEMILU SERENTAK PERDANA, PAKET LENGKAP PERTAMA .....	122
Ada Proses yang 'Terpaksa' Dihentikan .....	122
Kampanye Paket Komplit .....	127
Sosialisasi .....	128
Rekapitulasi dan Penetapan yang Memakan Korban .....	128
Pemenang Pemilu Serentak Tahun 2019 .....	129
ASYIKNYA PESTA DEMOKRASI	
DI TENGAH PANDEMI MENJANGKIT NEGERI .....	132
Tahap Program dan Jadwal Pemilihan Serentak Lanjutan .....	137
Berikut Detail Perolehan Suara dari Masing-Masing Paslon di Tiap Kelurahan .....	140
Lika-Liku Pilwali Tahun 2020 .....	142
KPU TERUS BERBENAH .....	143
PROFIL KOMISIONER PERIODE 2019-2024 .....	145
Daftar Pustaka .....	157
Profil Penyusun .....	166

the fact that the *de facto* situation is not in line with the *de jure* situation. The *de jure* situation is the situation that would obtain if the law were fully complied with. The *de facto* situation is the actual situation. The *de facto* situation is the *de jure* situation if and only if the law is fully complied with.

It is not clear, however, what the *de facto* situation is if the law is not fully complied with. There are two possible answers.

The first answer is that the *de facto* situation is the *de jure* situation. This answer is not correct. The *de facto* situation is not the *de jure* situation if the law is not fully complied with. The *de facto* situation is the *de jure* situation if and only if the law is fully complied with.

The second answer is that the *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation. This answer is not correct.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.

The *de facto* situation is the *de jure* situation plus the *de facto* situation if and only if the law is fully complied with.



# **Jejak Sejarah KPU**

Disusun oleh Ana Fitriani



*Dua Dekade Kota Blitar Memilih*

## **MENELUSURI JEJAK SEJARAH KPU**

**(Pemilu 1950-an)**

Pemerintah paska proklamasi telah merencanakan adanya Pemilu perdana pada Januari 1946 dengan dikeluarkannya maklumat X oleh wakil presiden Mohammad Hatta, yang berisi mengenai pemilihan MPR dan DPR. Maklumat X inilah yang menjadi tonggak hidupnya partai politik di berbagai daerah Indonesia, namun Pemilu 1946 gagal dilaksanakan karena kurangnya persiapan secara regulasi, perangkat pemilihan dan juga belum terkondisikannya keamanan negara.

Dalam jangka waktu empat tahun kemudian, Indonesia mulai melaksanakan pemilihan umum meskipun bersifat kedaerahan di Yogyakarta, dan Sulawesi. Pemilu lokal pada awal tahun 1950-an yang dilaksanakan di beberapa daerah ditujukan untuk memilih anggota dewan baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal ini selaras dengan pendapat Muhammad Asfar yakni perspektif kehidupan politik modern, jalan satu-satunya yang paling mungkin adalah melalui Pemilu yang bebas dan adil<sup>1</sup>.

Pada tahun 1950, Pemerintah membentuk Kantor Pemilihan Pusat (KPP) pada pemilihan umum daerah Yogyakarta dan Sulawesi. Ketika bekerja KPP dibantu lembaga-lembaga lain di bawahnya, seperti Kepala Desa/Kantor Pembantu Pemungutan Suara (KPPS), Tugas Kantor Cabang Suara (KPS), Tugas Tjabang Kantor Pemilihan (TKP), dan Tugas Kantor Pemilihan Pusat Provinsi (KPPP)<sup>2</sup>.

Pelaksanaan pemilu kedaerahan ini menjadi pengantar pemilihan yang berskala nasional, sehingga lahirlah perangkat utama pelaksanaan pemilu dengan Undang Undang Pemilu untuk mempersiapkan Pemilu 1955, yang kemudian disahkan menjadi UU

No 7 tahun 1953 tentang pemilihan anggota konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pelaksana pemilu, yaitu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI)<sup>3</sup>. Isi undang – undang ini melewati banyak fase kabinet karena kabinet pada saat itu berisi oleh banyak partai, sehingga pergantian kabinet meninggalkan pekerjaan perancangan undang-undangan pada kabinet baru setelahnya, bisa dibayangkan betapa rumit yang akhirnya menuai banyak kritikan. Namun, jika dilihat dari berbagai segi, khususnya ketentuan mengenai badan-badan pemilihan umum dan pemungutan suara, undang-undang ini adalah hasil kerja penuh kehati-hatian yang berusaha menyesuaikan berbagai teknik pemilihan umum dengan keadaan Indonesia<sup>4</sup>.

Setelah disahkan menjadi Undang-undang bisa diperinci Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) untuk tingkat pusat beranggotakan 5-9 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Panitia Pemilihan tingkat Provinsi beranggotakan 5-7 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sedangkan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten beranggotakan 5-7 orang, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dimana ketentuan ini secara lengkap bisa dilihat pada pasal 17-23 UU No 7 tahun 1953.

Proses pemilihan dalam anggota Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) berasal dari beberapa perwakilan partai politik dan anggota di pemerintahan, sehingga sangat mungkin terjadinya tendensi terhadap kondisi politik pada saat itu. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) berdiri selama sepuluh tahun lamanya.

## **Pembentukan Lembaga Pemilihan Umum (Pemilu 1970an)**

Undang – Undang Nomor 15 tahun 1969 membentuk Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yakni Lembaga Pemilihan Umum diketuai oleh Menteri Dalam Negeri, terbagilah Panitia



Pemilihan Indonesia untuk tingkat Pusat, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I untuk Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II untuk Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pendaftaran Pemilih.

Keterlibatan warga dalam suatu sistem politik selalu menjadi legitimasi akan kekuasaan dan kebijakan yang dibuat, sehingga suatu rezim akan menempuh cara dari mulai mobilisasi ataupun kampanye demi meraih suara terbanyak. Pada era setelah Demokrasi Terpimpin, suasana politik pada era ini memang didominasi oleh partai besar yang menjadi basis kekuatan presiden kala itu, sehingga beberapa kali dalam Pemilu mulai tahun 1971-1997 mengalami kemenangan mutlak. Lembaga Pemilihan Umum (LPU) akhirnya terkesan hanya menjadi simbol bahwa telah terlaksananya pemilu, meskipun pada prakteknya suara rakyat pada saat itu tidak benar-benar murni karena bentuk otoriter orde baru.

## **Bangkitnya Demokrasi Paska 1998, Terbentuknya KPU**

Komisi Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1999 dan mulai melaksanakan Pemilu tahun 1999 dengan 48 anggota dari partai politik dan 5 orang berasal dari wakil pemerintahan. KPU membentuk Panitia Pemilihan Indonesia untuk melaksanakan pemilu anggota DPR, DPRD tingkat I dan DPRD Tingkat II. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibentuk Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum dan merupakan Badan Pemerintahan.

Berdasarkan wawancara bersama anggota komisioner, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Blitar pertama kali dibentuk dari beberapa orang yang berasal dari berbagai latar belakang, mereka

saling bermusyawarah untuk menyelesaikan problem pemilihan umum paska reformasi. Bermodalkan rasa solid dan saling tahu mengenai tujuan yang dicapai, kantor pertama Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali didirikan di Jalan veteran Kota Blitar.

Berikut hasil pemilu tahun 1999 menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timuer atas nama Presiden nomor 171/422/06/012/1999 tanggal 18 Agustus 1999 Anggota DPRD II Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar yang diresmikan pengangkatannya untuk Masa Keanggotaannya Tahun 1999 – 2004 seperti tersebut dibawah:

1) Yang dipilih:

Dari PPP : Sdr. ACHMAD FAUZI, S. Ag

Dari PDI-P : 1. Sdr. IMAM SUMADI, BA

2. Sdr. ISLAN GATOT IMBATA

3. Sdr. MUNARNO

4. Sdr. HENDRI SUPRAPTO

5. Sdr. PRIYO SANYOTO

6. Sdr. FX. SUMADI

7. Sdr. JUNAEDI

8. Sdr. MUHAMAD MUHCTAR

9. Sdr. IMAM MUSLIMIN

10. Sdr. MOCH. SAMANHUDI ANWAR

Dari P. GOLKAR :1. Sdr. MARDIONO, SH  
2. Sdr. KI MARYANTO, BE  
3. Sdr. SIDHARTA DJAROT RIADI  
4. Sdr. SUWOKO

Dari PKB :1. Sdr. H. ABDUL ROCHIM SIDIQ  
2. Sdr. Drs. SOLIHIN  
3. Sdr. MUCHSON, SE  
4. Sdr. H. ZUBAIDY

Dari PBB : Sdr. HERRY POERNOMO

Dari PAN : Sdr. Dr. MOKH HARIYADI

Dari PKB : Sdr. Drs. SUKARJONO

2) Yang diangkat :

Dari TNI :

1. Sdr. LETKOL CAJ(K)SUTARTI
2. Sdr. KAPT. MAR. M. WALUYO
3. Sdr. LETTU SUS KASMUDJI, SH

Anggota DPRD II Kodya Blitar yang dipilih dan diangkat:

No	Unsur (Papol/Tni)	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	PDI Perjuangan	10	Dipilih dari Pemilu
2.	Partai Golkar	4	Dipilih dari Pemilu
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	4	Dipilih dari Pemilu
4.	Partai Persatuan Pembangunan	1	Dipilih dari Pemilu
5.	Partai Bulan Bintang	1	Dipilih dari Pemilu
6.	Partai Amanat Nasional	1	Dipilih dari Pemilu
7.	Tentara Nasional Indonesia	3	Diangkat
Jumlah seluruh Anggota DPRD II		25	Dipilih = 22 Diangkat = 3

Jumlah kursi DPRD II Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar berdasarkan Pemilu 1999 dapat digambarkan seperti di bawah ini:

No	Papol	Suara Sah	Jumlah Kursi	Sisa Suara	Ket.
1.	PDI-P	30.473	10	693	Sisa suara
2.	GOLKAR	13.036	4	1.124	Terbanyak
3.	PKB	12.313	4	401	Stembus
4.	PPP	3.017	1	39	Accord
5.	PBB	1.477	1	-	Sisa suara
6.	PAN	2.445	1	-	terbanyak 1
7.	PKP	1.274	1	-	Sisa suara
Jumlah Kursi yang dipilih			22	-	terbanyak 1

Kemudian pada pemilu 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya berubah menjadi bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri

(dihilangkannya keterlibatan pemerintahan dan partai politik) dengan landasan hukum yang sah yakni Amandemen ketiga UUD 1945 tanggal 9 November 2001 Pasal 22 E ayat (5):

*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri* dan Keppres No 70 tahun 2001 tanggal 5 Juni 2001: Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat independen dan nonpartisipan. Pembentukan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tahun 2004 melalui pengusulan Presiden kepada DPR. Sedangkan pada tahun 2009, pembentukan keanggotaan KPU melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi dan *fit and proper test* oleh DPR RI.





# **Periode 2003-2009**

Disusun oleh Ahmad Fahrizal Aziz



*Dua Dekade Kota Blitar Memilih*

## **HARAPAN BARU SELEPAS KRISIS 1998**

Zaman berubah, reformasi 1998 membuat suasana politik di Indonesia menjadi lebih terbuka. Pemilu 1999 digelar dan diikuti 48 partai politik. Sebelumnya, pemilu hanya diikuti oleh dua partai politik hasil fusi parpol dan satu golongan. Antusiasme ini membuat penyelenggaraan pemilu, khususnya di daerah, mulai mendapat perhatian. Komisi Pemilihan Umum di daerah mulai dibentuk, salah satunya di Kota Blitar.

Jika sebelumnya penyelenggara pemilu diambil dari unsur parpol, menjelang pemilu 2004 mulai dibentuk penyelenggara pemilu independen yang mewakili unsur masyarakat, yang tidak berafiliasi langsung dengan partai politik.

Saat itu, Komisioner KPU tingkat daerah dipilih langsung oleh KPU Pusat atas rekomendasi Pemerintah Daerah. Nama-nama yang direkomendasikan itu kemudian diseleksi hingga terpilih lima orang komisioner.

Berdasar Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 800/5/SK/KPU/2003, kelima komisioner yang tercatat sebagai komisioner KPU Kota Blitar periode pertama ialah Drs. Andrias Edison, Abdul Haris, SE, Rita Triana, S.Sos, Widhianto Nugroho, SH, dan Moh. Arif Majid, S.Ag. Namun pada 8 Agustus 2003 terjadi pergantian dari Abdul Haris, SE ke H.M Soehartadji, BA.

### **Periode Awal, Serba Pertama Kali**

Drs. Andrias Edison sebagai ketua KPU Kota Blitar yang pertama bercerita, tak lama setelah terbentuk, kegiatan yang sering dilakukan adalah kumpul dan diskusi bersama. Sebab kondisi waktu



itu tidak seperti sekarang yang segala aturan sudah turun dari pusat. Saat itu semua serba pertama kali.

“Jadi dulu itu, kita harus bagaimana? itu masih *grambyang*. Namun kita harus solid, makanya sering koordinasi dan diskusi bareng, ya setelah dilantik kerjaannya ngopi bareng,” tuturnya menceritakan saat-saat setelah dilantik menjadi komisioner KPU.

Andrias sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena terpilih menjadi komisioner, maka ia harus cuti sementara sebagai PNS. Hanya saja, Andrias sudah lama aktif di gerakan masyarakat, ia juga sosok yang dikenal luas sebagai budayawan. Popularitas dan reputasi sosialnya kala itu dirasa mampu mengawal proses demokrasi di Kota Blitar.

“Salah satu yang saya lakukan saat itu adalah pendekatan dengan tokoh-tokoh parpol, ada yang mudah ada yang sulit. Ada satu tokoh yang sulit sekali didekati, sampai saya mencari dimana dia shalat Jumat. Akhirnya saya ikut shalat Jumat di situ dan mengambil posisi tepat di sampingnya. Baru setelah itu komunikasinya jadi enak,” jelasnya.

Pendekatan ke semua parpol dilakukan pada periode awal ini, untuk menjaga kepercayaan dan komunikasi pada mereka. Kepercayaan itu penting karena menurutnya KPU ini “barang baru” bagi mereka. Sehingga menjalin komunikasi yang baik dengan semua parpol perlu dijalankan, karena bagaimanapun parpol adalah peserta pemilu dan KPU-lah sebagai penyelenggaranya.

Komunikasi yang baik dengan parpol ini salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan pemilu di Kota Blitar. Meskipun serba pertama kali, di bawah kepemimpinannya, penyelenggaraan pemilu di Kota Blitar berjalan cukup kondusif.

“Dulu itu ya, saking dekatnya, sering saya itu mampir ke kantor partai buat *nunut* tidur siang,” selorohnya.

Pada era kepemimpinannya, partai politik berhasil dikoordinasikan dengan membentuk Forum Lintas Parpol, yang didalamnya berisi Sekjen parpol peserta pemilu. Dengan adanya forum tersebut, selain menjalin komunikasi yang lebih intens, juga efektif dalam menyelesaikan persoalan yang muncul baik antara KPU dengan parpol atau antar parpol itu sendiri.

## **Blusukan hingga ke RT/RW**

Sementara itu, Rita Triana, komisioner perempuan pertama di periode awal KPU Kota Blitar, menjelaskan jika KPU di periode itu memiliki wewenang yang sangat besar, karena mereka bisa menentukan kebijakan tersendiri, sesuai kebutuhan di daerah.

“Periode itu wewenang kami cukup besar, termasuk tidak ada batasan anggaran, namun integritas penyelenggara atau peserta pemilu sangat kuat, sehingga kecurangan pemilu relatif sedikit,” tuturnya.

Rita Triana, S.Sos., mewakili praktisi media, Pada periode itu ia membawahi Divisi II yang bertugas di bidang Humas, Hubungan antar Lembaga, Personalia dan Keuangan. Pengalamannya sebagai praktisi media membuatnya *luwes* menjalin komunikasi dengan masyarakat. Salah satu tugasnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih.

Tentu bukan perkara mudah, karena itu adalah pertama kali masyarakat memilih langsung anggota legislatif mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Termasuk memilih secara langsung untuk pertama kali, Presiden dan Wakil Presiden.

Tantangan terbesarnya adalah bersosialisasi intens ke masyarakat. Salah satu cara yang ia tempuh adalah blusukan sampai tingkat RT/RW.

“Sebelum kata blusukan itu populer, saya itu sudah blusukan sejak dulu sampe ke RT RW bahkan ikut ngopi bareng di pos ronda, kerja tak kenal waktu,” ungkapnya sambil tersenyum, mengenang masa-masa itu.

Karena salah satu tugasnya di bidang personalia, Rita juga mengeluhkan dengan minimnya staf KPU di periode tersebut. Hal itu sangat dirasakan ketika harus distribusi logistik pemilu, terlebih berdasar aturan logistik pemilu hanya bisa dikirimkan menjelang pemungutan suara. Karena minimnya jumlah staf dan banyaknya logistik pemilu yang harus didistribusikan, membuat KPU kewalahan.

“Saat itu staf kami rata-rata adalah staf yang sudah enggak produktif di Pemda, jumlahnya pun sedikit, sehingga sangat kewalahan,” jelasnya.

Namun perjuangan tersebut tak sia-sia, karena warga Kota Blitar cukup antusias menyalurkan hak pilihnya. Tentu karena sosialisasi yang baik di periode tersebut.

## **Menjadi Anggota KPU Sebagai Pengabdian**

Sementara itu, H.M Soehartadji, BA yang menggantikan Abdul Haris, SE, menyebut bahwa menjadi anggota KPU saat itu lebih sebagai pengabdian. Sebelum menjadi anggota KPU, Soehartadji sudah memiliki pekerjaan mapan sebagai kontraktor dengan pendapatan yang tinggi. Partisipasinya sebagai penyelenggara pemilu mewakili kalangan profesional dan organisasi masyarakat.

“Sebelum menjadi anggota KPU saya itu kontraktor, gedung yang sekarang dijadikan kantor KPU Kota Blitar itu kami yang membangun,” kenangnya.

Meskipun begitu, Soehartdji ternyata memiliki kepedulian yang tinggi tentang penyelenggaraan pemilu. Meski dari segi pendapatan jauh menurun, namun hal itu tetap ia lakoni dalam rangka pengabdian pada negara, ia ingin turut serta mengawal proses demokrasi di Kota Blitar.

“Waktu itu saya usulkan ke KPU Jatim bagaimana kalau pemilu itu cukup dua jenis saja, yaitu memilih legislatif dan eksekutif. Misalnya pemilu legislatif ya memilih DPR RI, DPD dan DPRD. Kalau eksekutif ya memilih Presiden, Gubernur dan Wali Kota atau Bupati jadi satu,” jelasnya.

Pada periode awal itu, tugas Soehartadji terbilang cukup berat, karena ia yang membawahi divisi V yang tugasnya melakukan penelitian dan pengkajian, serta pendataan penduduk dan pemilih. Divisi ini sangat penting karena menentukan siapa saja yang akan berpartisipasi dalam pemilihan.

Saat itu belum ada data sama sekali yang dimiliki KPU karena baru periode pertama, sehingga harus koordinasi intens dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan BPS, baru kemudian divalidasi oleh tim KPU. Melakukan pendataan di periode awal menurutnya tidak mudah, terutama karena kurangnya SDM.

## **Pemilu Legislatif 2004, Pertaruhan Kepercayaan**

Pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan oleh KPU, tak terkecuali di tingkat daerah. Ada dua pemilihan yang dijalankan pada tahun 2004, yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg) dan

Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada pemilihan legislatif rakyat memilih langsung DPR RI, DPD, DPRD tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.

KPU Kota Blitar pun bekerja keras mempersiapkan tahapan pemilihan ini, terutama pendataan pendudukan yang nantinya diputuskan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam kegiatan pendaftaran pemilih ini KPU melakukan MOU dengan Badan Pusat Statistika untuk melakukan pendataan pemilih yang dikenal dengan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).

Ada 24 Partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2004. 24 Partai politik tersebut adalah :

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Merdeka
5. Partai Persatuan Pembangunan
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9. Partai Demokrat
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
13. Partai Amanat Nasional

14. Partai Karya Peduli Bangsa
15. Partai Kebangkitan Bangsa
16. Partai Keadilan Sejahtera
17. Partai Bintang Reformasi
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19. Partai Damai Sejahtera
20. Partai Golongan Karya
21. Partai Patriot
22. Partai Sarikat Indonesia
23. Partai Persatuan Daerah
24. Partai Pelopor

Karena banyaknya jumlah parpol yang ikut serta dalam Pemilu, tentu KPU Kota Blitar harus mencari cara agar tetap bisa menjalin komunikasi yang baik. Rita Triana menjelaskan bahwa salah satu tantangan saat itu adalah menjalin komunikasi dengan parpol. Salah satu cara yang dilakukan adalah membentuk suatu forum bernama Forum Lintas Parpol.

Lewat forum tersebut, komunikasi bisa terjalin dengan baik, termasuk ketika terjadi masalah antar partai politik itu sendiri. Budaya *guyub rukun* dan gotong royong itu masih sangat kuat, sekalipun di ranah politik.

Meskipun begitu bukan berarti tanpa masalah. Karena banyaknya jumlah kontestan pemilu, KPU Kota Blitar kesulitan mengatur jadwal kampanye, apalagi jika berbenturan dengan hari libur nasional. Terlebih sistem kerja KPU adalah berdasarkan kalender tahapan, jadi sekalipun tanggal merah KPU tetap bekerja.

Namun meski demikian, proses pemilu berjalan relatif kondusif. Dari 24 parpol yang ikut berkompetisi, hanya tujuh parpol yang mendapatkan kursi DPRD Kota Blitar berdasarkan perolehan suara. Berikut Tujuh parpol yang mendapatkan suara terbanyak pada pemilu 2004 :

No.	No Urut dan Nama Parpol	Perolehan suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.116
2.	Partai Golongan Karya	12.457
3.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.529
4.	Partai Demokrat	7.991
5.	Partai Persatuan Pembangunan	4.118
6.	Partai Keadilan Sejahtera	2.350
7.	Partai Damai Sejahtera	1.942

Perwakilan dari Tujuh partai politik inilah yang kemudian berhak mengisi kursi DPRD Kota Blitar. Ada 25 kursi dari 3 Daerah Pemilihan (Dapil) yang meliputi: Dapil 1 Sukorejo, Dapil 2 Kepanjenkidul, dan Dapil 3 Sananwetan.

## **Pemilihan Presiden 2004, Momentum yang Dinantikan**

Pemilihan presiden 2004 adalah momentum bersejarah bagi Rakyat Indonesia, termasuk warga Kota Blitar. Pertama kali rakyat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Karena itulah,

antusiasmenya begitu tinggi. Terlebih, ada lima pasangan calon yang mengikuti kontestasi. Lima pasangan calon ini nyaris mewakili semua unsur masyarakat, sehingga bisa dibayangkan betapa meriahnya perhelatan Pilpres 2004 di Kota Blitar.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 ini, peta di Kota Blitar berbeda dengan peta politik nasional. Itu dikarenakan hasil Pemilihan Legislatif di Kota Blitar juga berbeda dengan hasil secara nasional. Sehingga terjadi banyak kejutan ketika Pilpres 2004 ini berlangsung. Ternyata aspirasi politik warga Kota Blitar dalam Pilpres 2004 ini agak berbeda dengan Pileg 2004.

Lima pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang bertanding di Pilpres 2004 tersebut adalah :

Nomor Urut	Nama Pasangan Capres-Cawapres
1	H. Wiranto, SH – Ir. H. Salahuddin Wahid
2	Hj. Megawati Soekarnoputri – KH. Ahmad Hasyim Muzadi
3	Prof. Dr. H.M Amien Rais – Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono – Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
5	Dr. H. Hamzah Haz – H. Agum Gumelar, M.Sc





Pada Pilpres 2004 ini, partisipasi masyarakat di Kota Blitar selama proses kampanye cukup tinggi. Banyak yang secara sukarela bergerak membentuk posko-posko pemenangan. Antusiasme tersebut bisa jadi karena masyarakat menginginkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, dengan presiden baru yang dipilih langsung oleh rakyat.

Itulah barangkali kenapa ketika perhelatan Pilpres, angka partisipasi masyarakat dalam memilih cenderung naik. Apalagi ini adalah Pilpres pertama kali sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

Hasil Pilpres 2004 di Kota Blitar tidak jauh berbeda dengan hasil tingkat nasional, Meskipun jika dibandingkan perolehan parpol pengusung, sungguh diluar dugaan. Misalnya, pasangan calon yang diusung tiga parpol pemenang pemilu di Kota Blitar ternyata memperoleh suara yang kurang signifikan. Itu menunjukkan jika politik itu dinamis, dan rakyat memiliki independensi yang kuat dalam menentukan pilihannya.

Berikut hasil Pemilihan Presiden 2004 di Kota Blitar, putaran pertama yang digelar pada 5 Juli 2004 :

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Capres-Cawapres</b>	<b>Perolehan suara</b>
1	H. Wiranto, SH – Ir. H. Salahuddin Wahid	8.348
2	Hj. Megawati Soekarnoputri – KH. Ahmad Hasyim Muzadi	29.143
3	Prof. Dr. H.M Amien Rais – Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	5.058
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono – Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	33.576
5	Dr. H. Hamzah Haz – H. Agum Gumelar, M.Sc	1.319



Pasangan nomor urut 2 dan 4 mendapatkan suara terbanyak. Di tingkat nasional, kedua paslon itu juga unggul dari paslon lainnya, sayangnya belum ada yang memperoleh suara di atas 50%. Hal ini mengharuskan digelarnya putaran kedua. Paslon nomor urut 2 dan 5 kembali berkontestasi memperebutkan kursi Presiden dan Wakil Presiden.

Pilpres putaran kedua ini dilaksanakan pada 20 September 2004. Pada putaran kedua ini, atmosfer politik di Kota Blitar sangat ketat dan kompetitif. Itu dikarenakan salah satu calon diusung oleh parpol pemenang pemilu di Kota Blitar, yang tingkat kemenangannya sangat signifikan. Namun disisi lain, pendukung dari paslon yang lain juga tidak mau kalah. Persaingan begitu sengit.

Kendati demikian, pesta demokrasi tersebut berjalan kondusif. Meskipun hasil perolehannya sangat tipis. Berikut hasil Pilpres 2004 putaran kedua di Kota Blitar.

Nomor Urut	Nama Pasangan Capres-Cawapres	Perolehan suara
2	Hj. Megawati Soekarnoputri – KH. Ahmad Hasyim Muzadi	35.787
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono – Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	40.396

Hasil ini mengejutkan banyak pihak, termasuk dari pemerhati politik. Meskipun di tingkat nasional, Paslon nomor urut 4 menang cukup telak, namun di Kota Blitar kemenangan paslon nomor urut 4 hanya selisih 4.609 suara. Ini menunjukkan begitu kompetitifnya Pilpres putaran kedua di Kota Blitar.

Bagi KPU, hasil ini justru tidak mengagetkan, karena bagaimanapun dalam demokrasi rakyatlah yang menentukan. Hasil Pilpres 2004 di Kota Blitar menunjukkan suatu iklim politik yang dinamis dan kondusif. Pasangan nomor urut 4 H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla memenangkan Pemilihan Presiden 2004 di Kota Blitar.

### **Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar 2005, Harapan Baru untuk Kota Blitar**

Dari Pilpres, tahapan berikutnya adalah pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Blitar, yang saat itu disebut Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kota Blitar. Ini juga untuk yang pertama kali. Sebelumnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota diangkat oleh DPRD, hasil Pemilu 1999. Sehingga Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2000-2005 diangkat oleh DPRD merepresentasikan kursi pemenang pemilu 1999.

Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si dan Drs. H.M Zainuddin, M.Pd saat itu menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar periode 2000-2005. Keduanya kemudian berpisah dan masing-masing mencalonkan sebagai Wali Kota. Selain itu, Wali Kota Blitar periode 1995-2000, H. Istijono Sunarto, SH juga mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota untuk periode 2005-2020.

Sehingga Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar 2005 ini sangat unik, karena ketiga kandidat Wali Kota sama-sama pernah menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Selain itu, tiga parpol yang mendapatkan suara terbanyak di Kota Blitar pada pemilu 2004, PDIP, Golkar dan PKB, juga mencalonkan sendiri pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maka, selain kontestasi antar figur yang sengit, juga kontestasi tiga parpol besar di Kota Blitar.

Inilah nomor urut pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Blitar dalam Pilkada Kota Blitar 2005 beserta partai politik yang mengusungnya.

<b>Nomor urut</b>	<b>Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota</b>	<b>Partai Politik Pengusung</b>
1	Drs. H.M Zainuddin, M.Pd – Soewoko, ST	Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Karya Peduli Bangsa
2	H.Istijono Sunarto, SH – H. Wawan Agus Budi Santoso, SH	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Pd–Ir. Endro Hermono	PDI Perjuangan, PAN, PPP, PBB, PDS, Partai PDK, PSI, Partai PIB, PNI Marhaenisme

Ketiga calon yang berkompetisi adalah figur populis dan sudah dikenal luas masyarakat Kota Blitar, karena ketiganya memiliki rekam jejak yang cukup panjang, baik sebagai aktivis pergerakan, parpol, birokrat hingga ormas.

Pemungutan suara dilaksanakan pada 3 Juli 2005 di 344 TPS yang tersebar di 3 Kecamatan dan 20 Kelurahan di Kota Blitar. Lalu penghitungan suara dilaksanakan pada 12 Juli. Rekapitulasi penghitungan suara pun diumumkan dengan hasil berikut :

Nomor urut	Nama Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota	Perolehan suara
1	Drs. H.M Zainuddin, M.Pd – Soewoko, ST	13.249
2	H.Istijono Sunarto, SH – H. Wawan Agus Budi Santoso, SH	7.714
3	Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Pd – Ir. Endro Hermono	47.416



Pasangan nomor urut 3 menang cukup telak dengan perolehan suara 47.416 suara yang jika diprosentasekan mencapai 69,34%. Dengan hasil ini, maka pasangan Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, M.Si dan Ir. Endro Hermono terpilih menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2005-2010.

## **Pilgub Jatim 2008, Kejutan dari Kota Blitar**

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang digelar pada 23 Juli 2008 adalah tahapan pemilihan yang sangat melelahkan, karena berlangsung dalam dua putaran dan satu putaran tambahan untuk dua daerah di Madura, yaitu Sampang dan Pamekasan. Dalam setahun, KPU di

seluruh Kota dan Kabupaten di Jawa Timur harus menyelenggarakan dua kali Pilihan Gubernur, apalagi ini adalah Pemilihan Gubernur langsung pertama kali di era reformasi. Sebagian lagi juga tengah mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah tingkat Kota/Kabupaten.

Karena sengitnya kompetisi antar paslon, terjadi keberatan pada hasil penghitungan suara, terutama paslon nomor urut 1 dan 5, membuat proses pemilihan tersendat-sendat. KPU harus menyesuaikan dengan keadaan, termasuk ketika harus menggelar putaran kedua dan ketiga untuk daerah tertentu.

Pada periode ini, masa tugas KPU di seluruh Jawa Timur pun harus diperpanjang hingga dua kali. Masa kerja KPU yang harusnya berakhir pada 23 September 2008, akhirnya diperpanjang hingga empat bulan berikutnya.

Meskipun Pilgub Jatim 2008 berlangsung sengit dan panas di beberapa daerah Jawa Timur, tidak demikian di Kota Blitar. Pilgub Jatim 2008 berlangsung aman dan kondusif, bahkan pada putaran pertama terjadi kejutan tersendiri karena dimenangkan oleh paslon nomor urut 3.

Pada Pilgub Jatim 2008 ini, ada lima pasangan calon yang berkontestasi. Yaitu :

<b>Nomor Urut</b>	<b>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2008-2013</b>
1	Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono
2	Sutjipto – Ridwan Hisyam
3	Soenarjo – Ali Maschan Moesa
4	Achmady – Suhartono
5	Soekarwo – Saifullah Yusuf

Widhianto Nugroho, S.H. bertindak sebagai ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilgub Jatim 2008 di Kota Blitar.

Dilansir dari detik.com tertanggal 29 Juli 2008 pukul 17:40, dari hasil perhitungan suara di 3 kecamatan: Sukorejo, Kepanjen Kidul dan Sananwetan, pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (SaLam) memperoleh suara terbanyak yaitu 19.348 suara, unggul tipis dari pasangan Sutjipto-Ridwan Hisyam (SR) yang memperoleh 19.241 suara.

Uniknya, meski mendapat total suara terbanyak, pasangan SaLam hanya menang di satu kecamatan yaitu kecamatan Sananwetan. Sementara pasangan SR mendominasi di dua kecamatan lain yaitu Sukorejo dan Kepanjen Kidul. Sementara Paslon nomor urut 1 dan 5 yang maju pada putaran kedua justru menduduki posisi 4 dan 3.

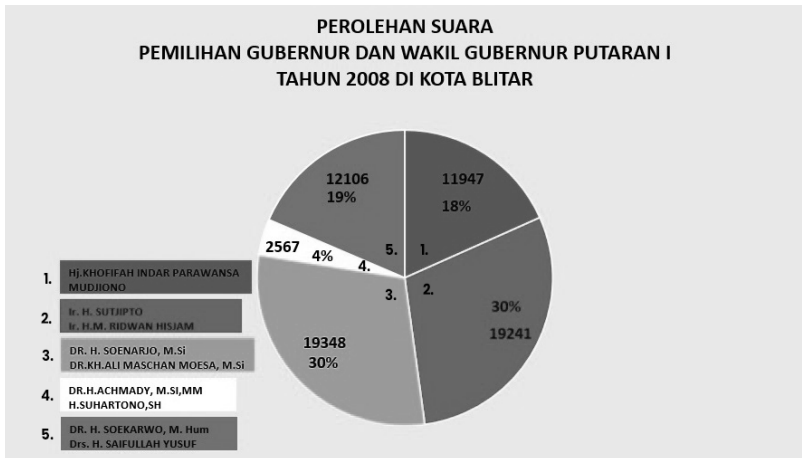
Hasil Pilgub Jatim 2008 di Kota Blitar sungguh mengejutkan, karena di sebagian besar daerah Paslon nomor urut 1 dan 5 pemenangnya. Namun di Kota Blitar, suara terbanyak justru diduduki

Paslon nomor 3 dan 2.

Berikut hasil Pilgub Jatim 2008 di Kota Blitar putaran pertama

:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono	11.947
2	Sutjipto – Ridwan Hisyam	19.241
3	Soenarjo – Ali Maschan Moesa	19.342
4	Achmady – Suhartono	2.567
5	Soekarwo – Saifullah Yusuf	12.106



Total DPT 99.863 Jiwa

Kehadiran 70.601 Jiwa

Suara tidak sah 5.392 suara

Tingkat Partisipasi 69,73%

Angka Golput 29.262



Sementara hasil rekapitulasi suara tingkat Jawa Timur, tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara di atas 30%, sehingga digelarlah putaran kedua berdasarkan dua suara tertinggi yaitu Paslon nomor urut 5 (25,50%) dan paslon nomor urut 1 (25,32%). Meskipun perolehan suara dua paslon ini tidak cukup signifikan di Kota Blitar, namun warga Kota Blitar harus tetap mengikuti Pemilihan putaran kedua.

KPU di berbagai daerah dibuat kelabakan dengan adanya pemilihan putaran kedua ini. Selain karena itu adalah tahun terakhir masa jabatan 2003-2008, disatu sisi KPU juga tengah disibukkan dengan proses rekrutmen calon anggota KPU baru untuk periode 2009-2014. Sementara, tahun depan ada Pemilu 2009 yang dilaksanakan oleh KPU yang baru.

KPU Jatim kemudian memutuskan putaran kedua dilaksanakan pada 5 November 2008, sehingga masa jabatan KPU di tingkat Kota/Kabupaten yang harusnya berakhir pada 23 September 2008 diperpanjang hingga tahapan pemilihan selesai.

Pada putaran kedua ini, warga Kota Blitar masih cukup antusias untuk menyalurkan hak pilihnya. Dari data Divisi SDM dan Parmas KPU Kota Blitar, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilgub Jatim 2008 putaran kedua ini sebesar 60,84%. Artinya masih di atas 50% dari DPT.

Pada pemilihan putaran kedua ini, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf unggul dengan memperoleh suara sebanyak 30.310 suara dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono mendapat sebanyak 28.017 suara. Dengan hasil ini maka pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008 di Kota Blitar.

## Foto Dokumentasi Pemilu Periode 2003-2009



**\* DISTRIBUSI LOGISTIK KE PPK \***  
Tempat / Tanggal :  
Sekretariat KPU Kota Bitur, 7 July 2009



\* DEKLARASI KAMPANYE DAMAI PPWP 2009 \*  
TEMPAT / TANGGAL :  
GRHA PATRIA, 10 JUNI 2009



**'PEMUNGUTAN SUARA'**  
Tempat / Waktu :  
Salah satu TPS Kota Blitar,  
8 July 2009



**'PERSIAPAN LOGISTIK'**

Tempat / Waktu :  
Sekretariat KPU Kota Blitar, Tanggal 9  
Juni 2009 - 30 Juni 2009





" RAKER "



**" SOSIALISASI "**  
**Tempat : Kota Blitar, Juni 2009**





---

# **Periode 2009-2014**

Disusun oleh Alfa Anisa dan Ulil Musyaekh



*Dua Dekade Kota Blitar Memilih*



## JEJAK PEMILU OLEH GENERASI KEDUA

Periode pertama telah berakhir. Prestasi sempat diperoleh sebagai penyelenggara Pemilu dengan partisipasi tertinggi tingkat nasional. Hal ini, menjadi bekal menyambung harapan baru dalam melaksanakan jalan pemilu yang lebih *prestise* di periode selanjutnya. Banyak hal di periode pertama yang menjadi dasar atau acuan kelima komisioner KPU di periode selanjutnya menjadi lebih baik lagi.

Periode dua diawali pada Pemilu 2009 yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik. Beberapa wajah komisioner baru turut menghiasai bilik kantor KPU Kota Blitar—mereka mendapatkan perhatian khusus dari KPU Jawa Timur, serta bimbingan teknis mengenai pelaksanaan pemungutan suara. Sementara itu, beberapa wajah lama masih bertahan di tubuh KPU Kota Blitar, seperti Drs. Andrias Edison dan Widiyanto Nugroho. Meski pernah menjabat komisioner di KPU periode sebelumnya, namun proses pemilihan komisioner tetap mengikuti prosedur yang berlaku, tanpa ada *privilege* tertentu untuk langsung melenggang dengan leluasa di kursi komisioner.

Proses pelantikan dilakukan pada 12 Juni 2009. Ketua KPU Jatim, Nikmatul Hidayati, dalam sambutannya, meminta kepada semua anggota KPU kabupaten/kota terpilih untuk bisa bekerja lebih profesional dengan memberikan pengabdian secara penuh sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya di bidang masing-masing. Anggota komisioner juga harus mampu mengoptimalkan kinerjanya masing-masing, tahan banting dalam kondisi apapun, mampu menyelesaikan persoalan teknis operasional di lapangan, sehingga diharapkan dapat menjalin hubungan baik dengan semua pihak, saat

menjalankan tugas-tugas baru.

Selain itu, anggota juga harus melakukan persiapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tervalidasi, meningkatkan partisipasi masyarakat di setiap pemilihan, mengoptimalkan pedoman sembilan asas yang berlaku di semua tingkatan penyelenggara mulai dari KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dan KPPS, maupun PPDP, serta bisa mengelola konflik di setiap pemilihan. Karena, hal tersebut menyangkut kinerja atau citra baik KPU provinsi, maupun KPU kabupaten/kota.

## **Memilih Ketua Generasi Kedua**

Penentuan ketua komisioner KPU Kota Blitar periode kedua dilakukan dengan hasil kesepakatan bersama. Nama yang terpilih akan menjadi wajah utama ketua di KPU Kota Blitar periode 2009-2014. Dan nama yang terpilih adalah Drs. H. Abdul Basyid.

Setelah itu, penetapan jabatan fungsional, keempat komisioner lainnya disepakati dengan susunan sebagai berikut; Drs. Andrias Edison (ketua KPU di periode sebelumnya) bertugas di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Widiyanto Nugroho, S.H, sebagai koordinator Hukum dan Teknis Penyelenggara, Setyo Budiono, S.E, bertanggung jawab atas Divisi Teknis Pendataan Pemilih KPU Kota Blitar, dan Mashudi, S.H.I, bertugas untuk Divisi Hukum dan Pengawasan, pencalonan dan kampanye KPU Kota Blitar.

Keorganisasian yang jelas dan terstruktur telah terbentuk, tugas pertama yang harus dilakukan adalah memegang penuh tanggung-jawab proses Pemilihan Legislatif tahun 2009 di Bulan April 2009, selanjutnya menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 di Bulan Juli, pemilu tingkat daerah (Pilwali

Blitar) di Bulan November 2010, dan diakhiri Pemilihan Gubernur Tahun 2013.

“Kepemimpinan adalah seni, maka barangsiapa yang mempunyai jiwa seni, dalam artian baik untuk menghadapi masyarakat yang sangat heterogen, cukup ganas atau lemah-lembut, kita bisa beradaptasi dengan mereka untuk mengambil kebijakan dan keputusan-keputusan yang bijak,” ucap Abdul Basyid menceritakan bagaimana modal utama menjadi pemimpin, terutama menjadi bagian penting dari sebuah pondasi di KPU Kota Blitar, yaitu sebagai ketua komisioner.

Mempunyai latar belakang sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi modal utama Abdul Basyid memahami karakter berbagai kalangan masyarakat di Kota Blitar yang berbeda-beda. Ia menganggap jika seorang pemimpin memiliki jiwa yang fleksibel atau terbuka dengan semua kalangan masyarakat, maka ketika dihadapkan dengan berbagai tatanan sosial akan lebih mudah merumuskan segala hal yang sedang terjadi saat itu, termasuk konflik internal dan eksternal di tubuh KPU. Sebab persoalan dinamika pemilu itu juga tergantung bagaimana masing-masing divisi komisioner mengatasi manajemen konflik.

Andrias Edison yang saat itu menjabat sebagai divisi Perencanaan dan Sosialisasi juga mengatakan, “kalau permasalahan secara hukum asal kita itu *ndak* keberpihakan, kita teliti dalam hukum, kita teliti dalam kata-kata, gitu aja, 75 % aman,”

Jadi ketika dihadapkan dengan suatu konflik salah satu divisi, maka akan dirasakan oleh keempat divisi komisioner yang lain. “Pagi, siang, sore, malam, selalu berlima. Ada masalah satu, diselesaikan lima orang. Masalah satu dirasakan lima orang, sehingga kami sudah

terbiasa menghadapinya,” papar Andrias menjelaskan bagaimana cara menghadapi sebuah konflik di KPU Kota Blitar.

## **Anggaran dan Sosialisasi Aman Terkendali**

Kondisi anggaran pada periode dua tidak mengalami masalah yang begitu rumit. Masalah besar kecilnya pendanaan berdasarkan inflasi keuangan setiap tahun yang berbeda-beda, karena kebutuhan anggaran belanja, harga bahan tidaklah sama setiap tahun. Dan anggaran selalu mengalami peningkatan disesuaikan dengan kondisi inflasi. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Mashudi, S.H.I., yang menjabat sebagai sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, Pencalonan dan Kampanye.

“Mudah dan tidaknya tergantung regulasi, jadi tidak hanya bisa mengacu pada satu regulasi di KPU, tetapi juga mengacu pada regulasi di pemerintahan daerah,” kata Mashudi, ketika ditanya hal apa saja yang bisa mempengaruhi kondisi anggaran di setiap pemilihan.

Ia juga menjelaskan bahwa KPU dan pemerintah daerah harus saling bersinergi untuk penyelenggaraan pemilihan umum agar bisa terlaksana dengan baik sehingga sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Pemerintah daerah dalam hal ini juga ikut andil dan memiliki pengaruh dalam hal pencairan anggaran, agar KPU bisa menunaikan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan pemimpin di Indonesia.

“Tapi, Alhamdulillah, selama menjabat di Kota Blitar, masalah keuangan tidak begitu sulit. Kita saling *support*, karena yang mempunyai hajat adalah pemerintah, dan kita hanya sebagai penyelenggara,” tambahnya.

Sementara itu, di Divisi Perencanaan dan Sosialisasi yang dipegang oleh Drs. Andrias Edison mengungkapkan, tidak ada konflik yang sangat krusial pada periode dua. Karena di periode sebelumnya sudah pernah melakukan sosialisasi *intens* ke segala lapisan masyarakat, bahkan hingga blusukan sampai tingkat RT/RW, jadi program kerja tinggal melanjutkan.

"Asal bisa nyusun jadwal sosialisasi tingkat kecamatan, kelurahan, RT/RW, itu sudah *kejatah*, secara formal selesai. Dan sosialisasi itu sederhana sekali. Kapan, siapa, bagaimana caranya, ya, sudah cukup," ungkapnya tersenyum tipis, pembawaannya yang tenang seperti menunjukkan bagaimana kebijakannya dulu memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya.

## **Demo dan Kenangan di Masa Lalu**

Keberhasilan proses penyelenggaraan Pemilu tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti ada hambatan dan konflik yang menyertainya. Ada dinamika politik yang pernah berlangsung untuk bisa meraih suara terbanyak di masyarakat. Seperti halnya pada Tahun 2010, Kota Blitar digencarkan dengan demo pada saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar.

"Para peserta pemilu juga berlomba-lomba meraih kunci keberhasilan, mereka banyak memiliki cara sesuai dengan asumsi yang menurutnya bisa mempengaruhi kebijakan di KPU," ungkap Mashudi, mengingat kenangan di masa lalu saat gencar terjadi demo.

Para peserta Pemilu tentu akan melakukan berbagai cara, agar apa yang telah diperjuangkan dan diusahakan bisa berhasil di kemudian hari, mereka berlomba-lomba mendapat partisipasi masyarakat termasuk juga mencoba mempengaruhi kebijakan yang

ada di KPU. Tapi, Mashudi mengatakan, bahwa di tahun itu KPU telah melakukan sesuai dengan regulasi yang sudah ada untuk pelaksanaan pemilihan dari awal hingga akhir. Dan ia menganggap bahwa ada dan tidaknya demo yang terjadi merupakan hal yang wajar. Terlebih lagi, negara Indonesia adalah negara demokrasi, yang terpenting menurutnya adalah KPU sebagai penyelenggara tidak keluar dari ranah regulasi yang sudah ditetapkan.

Berbeda lagi dengan cerita dari Abdul Basyid, ketua komisioner periode dua menceritakan, pernah terjadi demonstrasi selama tujuh hari tujuh malam, “Saya dan Pak Andreas pernah didemo tujuh hari tujuh malam. Lalu, ketika itu kita harus segera merumuskan apa yang perlu kita persiapkan, agar bisa menemui anggota-anggota yang demo tujuh hari tujuh malam, sehingga mereka sekali *skak* langsung *kedar*,” katanya, mengingat masa itu dengan nada suara penuh ketegangan.

Menyelenggarakan hajjat besar sebuah negara memang tidaklah mudah, selalu saja ada konflik yang mencoba menghambat pelaksanaan Pemilu. Abdul Basyid menceritakan bagaimana harus menangani sebuah konflik yang sedang terjadi, dimulai dari merumuskan beberapa poin-poin penting dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi konflik tersebut, berkoordinasi serta melibatkan semua pihak agar konflik dapat segera diatasi.

“Kesalahan demo saat itu bukan terletak pada penyelenggara, atau dalam hal ini KPU. Tapi, kesalahan lebih kepada partai politik yang ternyata memiliki dua orang ketua, hingga melahirkan kubu-kubu.” Ungkapnya menambahkan.

## **EKSISTENSI PARPOL DI AJANG PEMILU LEGISLATIF 2009**

Pemilu Legislatif Tahun 2009 adalah pemilihan dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Banyaknya peserta pemilu baik parpol maupun perorangan, ditambah dengan banyaknya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota juga turut menyumbang tanggung jawab kelima komisioner semakin meningkat. Rakyat sebagai pemilih di tahun itu juga menyadari hak konstitusional; hak pilih dan dipilih dalam Pemilu.

Pemilu 2009 adalah pemilu yang ke-10 kalinya dalam sejarah Pemilu Indonesia dan menjadi salah satu pondasi dalam kehidupan ketatanegaraan dan perpolitikan di Indonesia. Banyaknya warna berbeda yang ikut andil dalam penyelenggaraan Pemilu 2009, tetapi tak menyurutkan untuk tetap menerapkan semboyan bangsa yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, yaitu, *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 disebutkan, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Banyak tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Kota Blitar, mulai dari: pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan yang terakhir pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.



Pada Pemilu Legislatif di Kota Blitar terbagi menjadi tiga daerah pemilihan, dengan tiga kecamatan, jumlah kursi DPRD Kota Blitar yang dibutuhkan hanya 25. Sedangkan penetapan DPT untuk Pemilu Legislatif tahun 2009 sejumlah 102.529 orang dan 294 TPS.

Peran para komisioner pada tahun itu cukup berat agar Pemilu Legislatif bisa terselenggara dengan baik, berjalan secara tertib, aman dan lancar. Untuk itu relasi antar lembaga, baik secara struktural, horizontal, penyelenggara, dan peserta pemilu harus terwujud, jika relasi dari semua pihak bisa memahami peran dan kedudukan dan sistem pemilu yang baru.

### **Dari Coblos ke Centang**

Sosialisasi kepada peserta Pemilu Legislatif berperan penting dalam tahapan penyelenggaraan, karena memiliki dua tujuan agar pemilihan bisa terselenggara dengan baik. Pertama, agar jajaran penyelenggara mendapat pemahaman yang akurat tentang seluk beluk pemilu terhadap tugas dan kewenangannya. Kedua, agar KPU lebih mudah mengkoordinasikan segala kepentingan sosialisasi dan bisa diteruskan langsung kepada masyarakat.

Dan yang terpenting lagi, sosialisasi perlu dilakukan agar pemilih memahami bahwa sistem pemberian suara berbeda dengan Pemilu Legislatif 2004, dari coblos ke centang. Begitu pula dengan keabsahan surat suara. Pentingnya sosialisasi Pemilu 2009 dilakukan untuk semua unsur masyarakat, agar mereka bisa menggunakan hak pilih mendapatkan pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab.

Peran KPU menjadi bertambah lagi, karena berbeda dari sistem sebelumnya membuat seluruh jajaran harus sigap dalam upaya koordinasi kepada segala pihak. Andrias yang menjadi Divisi

Sosialisasi dan Perencanaan mengatakan, tidak banyak kendala dalam melakukan tugas, asal bisa menyusun jadwal sosialisasi tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW secara formal, semua informasi yang dibutuhkan bisa tersampaikan. Perlunya relasi dan kerjasama yang kondusif di segala unsur masyarakat, baik relasi di tingkat struktural, horizontal, ataupun tingkat penyelenggara membuat Pemilu yang akan diselenggarakan bisa mendapat tanggapan positif dari seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Pemilu 2009 dinilai memiliki kesulitan di lapangan yang sangat berat, sebab terjadinya perubahan regulasi yang berbeda dari tahun sebelumnya membuat semua pihak harus berhati-hati dalam bertindak. Seperti halnya perubahan regulasi yang terlihat sederhana seperti mencontreng ternyata menimbulkan dampak luar biasa, salah satunya membuat tingginya potensi surat suara tidak sah, karena surat suara dianggap tidak sah jika ada goresan. Namun di Kota Blitar hal ini bisa diatasi dengan seringkali mengadakan sosialisasi, bahkan blusukan hingga ke RT/RW.

## **Surat Suara yang Tertukar**

Keberhasilan tiap pemilu yang berjalan aman, lancar, tertib hukum dan administrasi tidaklah mudah dan selalu menjadi tujuan setiap penyelenggaraan pemilu. Hal itu tidak cukup dan bisa dicapai dengan sendirian, tetapi harus melibatkan semua pihak agar mendapat pemimpin yang benar-benar diharapkan masyarakat.

Di balik setiap keberhasilan, pasti ada hambatan yang sempat memberi nilai minus dari setiap pemilihan. Seperti halnya, persoalan logistik ketika surat suara tertukar di Dapil 3 ke Dapil 1 di Kelurahan Sukorejo dan Karang Sari. Meski masalah yang timbul secara tak terduga, tapi tidak menimbulkan gagalnya pemilihan di suatu tempat.

Persoalan logistik atau tertukarnya surat suara memang sangat krusial, karena hasil akhirnya bisa menyebabkan pengulangan pemilihan dan menimbulkan banyak kesibukan yang harus dimulai lagi dari awal. Sejak awal sebelum Pemilu terselenggara, terjadi kecemasan yang luar biasa karena logistik pemilu belum sampai di KPU Kota Blitar, sementara hari H sudah begitu dekat. Namun karena hal tersebut merupakan kasus nasional, jadi KPU Kota Blitar menjadi sadar bahwa itulah kenyataan yang harus dihadapi bersama sebagai satu dari sekian konsekuensi sistem perundangan yang baru tentang Pemilu. Dengan upaya yang sigap dari semua pihak, akhirnya persoalan logistik Pemilu di Kota Blitar bisa teratasi.

## **Masalah Pasti Ada**

Waktu yang dibutuhkan KPU tidaklah sebentar, terlebih lagi persiapan itu harus benar-benar matang seutuhnya agar pelaksanaan Pemilu di Indonesia berjalan dengan baik. Tahapan seperti pembentukan badan penyelenggara, bimbingan teknis, sosialisasi, koordinasi, teknis penyelenggaraan; pemutakhiran dan penyusunan DPT. Pencalonan anggota legislatif, masa kampanye, tenang, hingga perjuangan yang paling menentukan adalah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, dan yang menjadi akhir dari proses itu adalah pengucapan sumpah janji bagi anggota yang terpilih. Selain itu, pengalokasikan dana dan anggaran yang tepat juga sempat menjadi masalah yang tidak mudah.

Dalam pemungutan suara dan penghitungan suara juga memiliki masalah yang setiap penyelenggaraan pemilu selalu ada, seperti halnya kurangnya koordinasi di beberapa pihak terkait, bimbingan teknis dan pelatihan memerlukan hal lebih intensif serta masih banyak masalah yang dihadapi KPU saat terjadinya Pemilu

Legislatif 2009, namun semuanya bisa diatasi dengan baik.

Secara umum permasalahan yang dihadapi saat penyelenggaraan pemilu hampir sama, seperti dari penataan organisasi, tentang sosialisasi kurang maksimal dan dinilai waktu yang dibutuhkan masih kurang panjang, koordinasi dan lain-lain. Sedangkan dari teknis penyelenggaraan juga ada beberapa permasalahan umum, seperti konflik internal pengurus parpol, belum maksimal dalam penyelenggaraan, partisipasi di beberapa wilayah masih rendah, masa kampanye dan masa tenang memiliki permasalahan internal di tubuh parpol sendiri. Pemungutan dan penghitungan suara juga ditemukan beragam permasalahan yang selalu ada di setiap wilayah, misalnya dugaan manipulasi suara, intimidasi terhadap penyelenggara saksi yang kurang taat aturan dan beberapa permasalahan lain.

Banyak hambatan yang dilalui saat penyelenggaraan Pemilu, diantaranya: masalah anggaran untuk Pemilu Legislatif kurang terarah, kurangnya koordinasi dan bimbingan teknis mengenai anggaran membuat anggota divisi anggaran kurang bisa maksimal dalam menentukan pengelolaan. Jika koordinasi antara KPU dengan pemerintah dan DPR bisa terlaksana dengan baik, maka anggaran bisa dicairkan tepat waktu sesuai tahapan Pemilu.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi dari divisi logistik: ketidaktepatan jumlah logistik yang diterima menyebabkan data kebutuhan tidak akurat, ketidaktepatan waktu pengiriman logistik, kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi syarat, hingga pengadaan logistik terlalu sentralistik.

## **Ketika Parpol Baru Mencoba Keberuntungan**

KPU mengumumkan daftar 34 partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2009, 18 partai merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti Pemilu ataupun baru mengganti namanya. Dan 16 partai lainnya merupakan peserta Pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004-2009, sehingga langsung berhak menjadi peserta Pemilu 2009.

Sedangkan di Kota Blitar ada 26 partai politik berbadan hukum yang menyerahkan berkas ke KPU Kota Blitar, dan hanya 16 partai yang telah dinyatakan lolos dan langsung menjadi peserta Pemilu, diantaranya;

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Bintang Reformasi (PBR)
3. Partai Bulan Bintang (PBB)
4. Partai Damai Sejahtera (PDS)
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
6. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
7. Partai Demokrat
8. Partai Golongan Karya (Golkar)
9. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
11. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
12. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
13. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

14. Partai Pelopor

15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)

16. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Verifikasi secara faktual dan administratif tak menyurutkan banyak parpol baru mengundurkan diri dan mereka terus berjuang menunjukkan eksistensinya di kancah perpolitikan Indonesia. Terlebih lagi syarat yang mengedepankan independensi tak menghalangi partai politik baru untuk tetap turut serta meramaikan panggung pemilihan umum di Indonesia. Partai tersebut diantaranya partai yang telah lolos secara verifikasi faktual dan administratif yaitu; Partai Patriot, Gerindra, PPDB, Hanura, PPRN, PKNU, PNG, PNBK I, KEDAULATAN, PDKB, PPSI, PMB.

Sedemikian banyaknya peserta pemilu legislatif mengakibatkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK saat itu berlangsung selama lima hari lima malam. Berikut delapan Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Blitar; Partai Hanura, PKS, PKB, Golkar, PPP, PDIP, Demokrat, PKNU.

Menurut pasal 26 ayat 2, menetapkan jumlah kursi DPR berdasarkan jumlah penduduk kabupaten/kota. Kota Blitar, dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 sampai dengan 200.000 jiwa mendapat 25 kursi. Saat itu per 5 April 2008, jumlah penduduk Kota Blitar sebanyak 130.617 jiwa, dengan Dapil di setiap kecamatan. Sedangkan total kursi DPRD di tiap kecamatan: Sukorejo 9 kursi, Kepanjen Kidul 7 kursi, dan Sananwetan 9 kursi.

Pada tanggal 17 Mei 2009, penetapan perolehan kursi dan

Caleg terpilih DPRD Kota Blitar dilaksanakan di kantor KPU Kota Blitar. Hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2009 sebagai berikut; Dapil 1 di Kecamatan Sukorejo dengan jumlah suara sah: 23.563, Dapil 2 di Kecamatan Kepanjen Kidul jumlah suara sah 20.550, dan Dapil 3 di Kecamatan Sananwetan jumlah suara sah 25.074

Sedangkan 25 nama anggota DPRD Kota Blitar masa jabatan 2009-2014 yang dilantik dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Blitar pada hari Minggu, 23 Agustus 2009 bertempat di Gedung DPRD Kota Blitar, sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>NAMA ANGGOTA DPRD</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>
1.	Heru Sunaryanta, SH.	Demokrat
2.	Umi Mahfiatin, S.HI.	Demokrat
3.	Yuli Haryono, SE.	Demokrat
4.	Endang Widarwati, SH.	Demokrat
5.	Drs. Supriono	Demokrat
6.	Rido Handoko, A.Md., S.Pd.	Demokrat
7.	Sukardji	PDIP
8.	dr. Syahrul Alim	PDIP
9.	M. Samanhudi Anwar, SH.	PDIP
10.	Said Nofandi, ST.	PDIP
11.	Glebot Catur Arijanto, SH.	PDIP
12.	Sutanto, SH.	PDIP
13.	Eko Purwanto, S.Pd.	Golkar
14.	Sidharta Djarot Riyadi	Golkar
15.	Soewoko, ST., MH.	Golkar
16.	H. Zubbaidy	PKB
17.	Pipit Haryanti, SE.	PKB
18.	Muh. Syaful Ma'arif	PKB
19.	Agus Zunaidi	PPP
20.	Drs. Imam Sodiqi	PPP
21.	H.M. Nuhan Eko Wahyudi, SH.	PPP
22.	Kuryadi	HANURA
23.	Bambang Rianto	HANURA
24.	dr. Laily Kurniawati	PKS
25.	Muchammad Mustafid	PKNU

## **INDONESIA MEMILIH PRESIDEN**

Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Muhammad Jusuf Kalla, menandakan kontestasi pemilihan presiden yang kedua kalinya akan segera dilaksanakan. Tiga pasangan kandidat kuat memutuskan maju untuk berlaga di panggung politik—memperebutkan kursi teristimewa di Indonesia, kursi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2009-2014.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya, Muhammad Jusuf Kalla, maju dengan menggandeng pasangannya sendiri-sendiri. Muhammad Jusuf Kalla yang kala itu menjadi Wakil Presiden, kali ini dengan percaya diri mencalonkan untuk menjadi Presiden bersama wakilnya, Wiranto. Sementara Susilo Bambang Yudoyono memilih Boediono untuk menemani perjuangannya mencalonkan kembali sebagai Presiden.

Hal menarik di sini adalah, wakil yang diusung oleh Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Boediono, tumbuh dan besar di Kota Blitar. Hadirnya sosok Boediono dalam perhelatan kali ini tentu meningkatkan elektabilitas mereka untuk memenangkan kontestasi, khususnya di wilayah Kota Blitar.

Proses perencanaan Pemilu hingga tahap realisasi pelaksanaan, mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, serta menilik hasil evaluasi dari penyelenggaraan pemilihan presiden pertama kalinya diadakan, yakni di tahun 2004 oleh tim KPU periode sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi titik acuan tim komisioner yang dinahkodai Abdul Basyid untuk menyelenggarakan pelaksanaan pemilu yang lebih berkelas.



## **Ketika 400 Nama Pemilih Dicoret dari Daftar**

Pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Segala persiapan diupayakan termasuk menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan data DPT Pilpres Kota Blitar tahun 2009, yang telah diserahkan ke KPU Propinsi Jawa Timur pada 29 Mei 2009, diketahui jumlah pemilih Pilpres mengalami peningkatan kurang lebih 1.065 pemilih bila dibandingkan DPT Pileg 9 April lalu.

Sesuai data yang tertera dalam DPT Pemilu Legislatif lalu, yang juga menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres, tercatat ada 102.529 pemilih. Namun seiring dengan perkembangan proses validasi data yang dilakukan KPU bersama PPS dan P2DP, jumlah pemilih dalam DPT, mengalami peningkatan menjadi 103.594 pemilih. Dengan rincian pemilih di Kecamatan Sukorejo sebanyak 35.379 pemilih, Kecamatan Kepanjenkidul 30.025 pemilih, dan Kecamatan Sananwetan sekitar 38.190 pemilih.

Dari pemilih yang terdaftar dalam DPT, jumlah pemilih perempuan lebih banyak dibanding pemilih laki-laki. Sekitar 53.132 adalah pemilih perempuan, sedangkan 50.462 adalah pemilih laki-laki. Meski DPT telah ditetapkan, namun kontroversi seputar DPT Pilpres 2009, mulai menghangat. Masih ada pemilih yang belum terdaftar maupun pemilih ganda, sehingga harus dicoret dalam DPT.

Hasil validasi DPT pada 4 Juli 2009, dari sekitar 103.549 pemilih di Kota Blitar, 400 pemilih diantaranya di coret dari daftar DPT. Dari 400 pemilih tersebut, 95 pemilih meninggal dunia, 190 pemilih ganda, 9 pemilih tidak memenuhi syarat menjadi pemilih, dan 106 pemilih lainnya pindah domisili. Dari pencoretan tersebut, KPU tidak

melakukan pengurangan DPT yang sudah ditetapkan, melainkan hanya diberi keterangan di TPS, dan pemilih yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Pencoretan 400 nama pemilih dalam DPT ini, menurut KPU Kota Blitar, selain dilaporkan ke KPU Pusat dan KPU Propinsi Jawa Timur, juga telah diinformasikan ketiga tim kampanye Capres-Cawapres di Kota Blitar. Sehingga, tidak menimbulkan polemik berkelanjutan yang akan mengganggu jalannya proses Pemilu.

Selain 400 nama yang tercoret, juga terdapat data *invalid* lainnya. Dua nama pemilih dari Kecamatan Sananwetan, yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak tertera di DPT. Pihak KPU mengaku mengusahakan pemilih yang bersangkutan untuk masuk DPT, meskipun batas maksimal pelaporan ke KPU Pusat sudah melewati batas. Kondisi ini terjadi, dinilai karena kurangnya komunikasi antara pemilih bersangkutan dengan petugas PPS.

Meskipun banyak yang menyayangkan keadaan ini, namun semua pihak yang terlibat tetap mengharapkan KPU Kota Blitar segera menindaklanjuti dengan bijak, termasuk memperjuangkan hak pemilih yang sudah terdaftar di DPS namun belum masuk DPT. Di sisi lain, masyarakat terus diminta untuk berperan serta aktif dalam memperjuangkan hak suaranya.

## **Upaya Membujuk Masyarakat Pemilih**

Melihat masih banyaknya masyarakat pemilih yang masih belum mengetahui teknis pelaksanaan Pemilu 2009, membuat KPUD Kota Blitar mulai awal Maret 2009, mengencangkan sosialisasi Pemilu ini.

Andrias Edison, divisi Sosialisasi Pilpres 2009, mengatakan, meski sangat terlambat namun pihaknya akan tetap mensosialisasikan Pemilu 2009, yang meliputi empat materi sosialisasi diantaranya, waktu pelaksanaan Pemilu, siapa saja yang mempunyai hak pilih, para peserta Pemilu, dan cara teknis pemberian suara.

Sosialisasi yang dimulai awal Maret ini akan dilakukan melalui radio maupun media cetak, serta sosialisasi tatap muka. Sosialisasi yang dilakukan saat ini masih sebatas kepada kelompok profesional. Karena keterbatasan tenaga yang dimiliki KPU Kota Blitar untuk sosialisasi ini, maka kegiatan yang dikoordinir oleh KPU Kota Blitar, narasumbernya diambilkan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selain sosialisasi tatap muka langsung dengan warga, menjelang hari H pemungutan suara akan dilakukan meledang keliling kelurahan, karena dinilai efektif memberi sosialisasi Pemilu kepada masyarakat.

## **KPU Berbelanja untuk Calon Presiden**

Anggaran dari pemerintah yang telah dipersiapkan untuk perhelatan akbar Pileg dan Pilpres tahun 2009 ini sejumlah 5,2 miliar rupiah, yang diambil dari APBN. Anggaran sejumlah lebih dari 5 miliar rupiah itu, secara global diantaranya untuk sosialisasi, belanja honor saat mendatangkan narasumber, dan belanja barang, berdasarkan data KPU Kota Blitar.

Berdasarkan keterangan dari salah satu komisioner KPU Kota Blitar, dana terbesar yang digunakan selama Pileg dan Pilpres adalah honor PPK dan PPS masa kerja 8 bulan. Alokasi dana global untuk setiap PPK dan sekretariat, sekitar Rp 22.000.000,- semetara honor per PPS dan sekretariat sekitar Rp 16.400.000,-. Jumlah itu cukup besar dibandingkan pembelajaran kebutuhan yang lainnya.

Namun sayangnya, alokasi dana tersebut sempat belum terserap seratus persen. Selain karena dana belum turun, dokumen DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masih revisi, dan sudah mengalami revisi sebanyak lebih dari tiga kali. Sehingga KPU memerlukan dana talangan yang dipinjam dari APBD Pemerintah Kota Blitar tahun anggaran 2009 untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat dan lain sebagainya. Di samping itu, belum adanya petunjuk teknis tentang penggunaan anggaran secara terinci juga sempat menjadi kendala soal pelaksanaan anggaran.

Sementara itu, dalam proses pengadaan, pencetakan, dan pendistribusian logistik Pilpres 2009 secara garis besar dapat berjalan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berkat dukungan seluruh penyelenggara Pemilu serta dukungan aparat pemerintah daerah. Namun demikian, beberapa kendala seperti ketidaktepatan jumlah, waktu pengiriman dan standar kualitas logistik yang diterima, kurangnya SDM yang memenuhi syarat untuk pengadaan barang dan jasa di daerah, keberadaan limbah yang melampaui kapasitas gudang, serta pengadaan logistik yang masih terlalu sentralistik, turut mewarnai perjuangan tim Pemilu di KPU Kota Blitar.

## **Menilik Hasil Laga Pilpres-Wapres**

Proses pemilihan telah usai. Diantara kronik yang terjadi selama pemilihan berlangsung adalah perihal jumlah surat suara Pilpres 2009 bercap “Pemilu Ulang” di Kota Blitar yang terus ditemukan. Jumlahnya mencapai ribuan lembar. Hal itu berdasarkan jumlah surat suara cadangan di KPUD Kota Blitar. Sementara dari laporan yang masuk, pada 5 TPS ditemukan ada surat suara bermasalah. Yakni TPS 4 Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan. Kemudian TPS 2, TPS 5 Jalan Madura, TPS 6 Jalan Kangean, TPS 8 Jalan

Kiai Mojo Kecamatan Sananwetan. Total sementara surat suara bermasalah sebanyak 714 lembar.

Surat suara bermasalah ini terjadi akibat *human error* yang lolos dari sortir petugas KPU. Sebab selama ini petugas hanya mengamati suara rusak karena tinta, sobek, dan sejenisnya. Bukan yang lainnya, terlebih terkait tulisan “Pemilu Ulang”. Kasus surat suara yang serupa terjadi tidak hanya di Kota Blitar saja, namun juga di beberapa daerah Kabupaten Blitar, KPUD Trenggalek, dan KPUD Tulungagung.

Hasil koordinasi dengan KPU Jatim, surat suara Pemilu ulang yang telanjur dicontreng dianggap sah. Namun kendati demikian, KPU tetap membuat berita acara. Sementara yang belum dicontreng, langsung ditarik dan digantikan dengan surat suara yang berlaku.

Selain perihal surat suara, prahara yang lain juga terjadi akibat dari dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan bisa menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP dan KK. Hal tersebut membuat ratusan pemilih di Kota Blitar yang tidak masuk DPT, memanfaatkan KTP dan KK-nya untuk mencontreng.

Menurut data sementara dengan melihat berita acara yang kebetulan tidak dimasukkan ke kotak suara, jumlah pemilih Kota Blitar yang menggunakan KTP dalam mencontreng sekitar 123 pemilih.

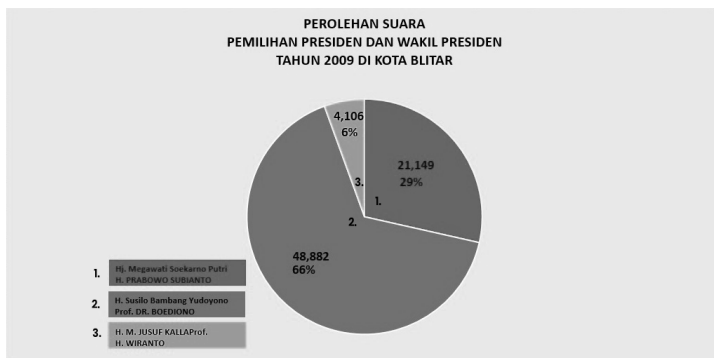
Data rekapitulasi penghitungan surat suara sementara dari berbagai lembaga di luar KPU Kota Blitar, menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sekitar 76 %, atau sekitar 78.564 pemilih, sekitar 4.481 suara tidak sah, sementara sekitar 24.632 pemilih atau sekitar 24 % golput

Jumlah suara sah yang terkumpul menjadi harta yang paling dinanti-nanti bagi semua pasangan capres-cawapres. Proses rekapitulasi penghitungan surat suara sudah dilakukan oleh tim kampanye pasangan masing-masing dan Panwaslu Kota Blitar dengan versi mereka sendiri. Dari hasil rekapitulasi tersebut, hasil sementara pasangan SBY-Boediono mendapatkan jumlah surat suara lebih banyak dibandingkan dua pasangan Capres-Cawapres yang lain.

Namun, KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan surat suara Pilpres 2009, di tingkat PPK dilakukan secara serentak di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjenkidul, dan Kecamatan Sukorejo pada tanggal 11 Juli 2009, sedangkan rekapitulasi di tingkat Kota Blitar dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2009. Sehingga klaim kemenangan dengan versi apapun selain dari KPU tidak bisa dijadikan acuan resmi dan harus menunggu penetapan hasil Pilpres 2009, oleh KPU Pusat pada 28 Juli.

Dari hasil rekapitulasi tingkat kota, pasangan SBY-Boediono memperoleh hasil surat suara tertinggi, yakni 66% dari jumlah pemilih terdaftar. Sementara di urutan kedua diisi oleh pasangan Megawati-Prabowo dengan pemerolehan sebesar 28.5%, dan di urutan terakhir diduduki oleh pasangan Jusuf Kalla–Wiranto dengan hanya memperoleh 5.5%.

Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditunjukkan dari rekapitulasi di tingkat nasional. SBY-Boediono berhasil menjadi pemenang dengan memperoleh presentasi 60,80%, lalu disusul Megawati-Prabowo dengan 26,79%, dan terakhir JK-Wiranto dengan perolehan sebesar 12,41%.



Dengan demikian, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi, SBY-Boediono resmi mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2009-2014.

Sementara itu, pasangan JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo mengajukan keberatan. Isi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain perihal kerancuan masalah penyusunan dan penetapan DPT, pengurangan jumlah TPS, adanya kerjasama atau bantuan IFES oleh paslon tertentu, beredarnya formulir ilegal model “C-1 PPWP”, adanya berbagai pelanggaran administratif maupun pidana, adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto, dan lain sebagainya.

Dalam pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pasangan yang kalah, KPU berikut KPUD seluruh Indonesia menjadi pihak termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait. Proses persidangan pun dilaksanakan.

Persidangan dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan sebanyak empat kali. Sidang yang pertama memuat pemeriksaan perkara yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2009. Kemudian

dilanjutkan proses mengkaji keterangan termohon, pihak terkait, keterangan saksi, dan pembuktian, pada 5 Agustus 2009. Sidang ketiga masih dengan proses pembuktian pada 6-7 Agustus 2009. Hingga akhirnya, pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis hakim konstitusi membacakan putusannya secara final. Dalam putusan menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa di-setting apapun.

Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pada 18 Agustus 2009. KPU menetapkan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2009-2014. Dengan kebesaran hati, para calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2009 lainnya memberikan ucapan selamat atas penetapannya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Sementara itu, dalam pidato penerimaannya, SBY tak lupa memberikan ucapan rasa bangga terhadap lawan politiknya dalam pilihan presiden yang telah memberikan contoh terbaiknya dalam proses berdemokrasi di Indonesia dan mengharapkan pengabdian mereka tidak akan mengenal batas akhir dan akan terus berlanjut.

Pilpres 2009 telah berakhir, para komisioner yang baru saja menjabat tidak mudah untuk bisa langsung menyesuaikan diri dengan keadaan. Beberapa pihak berkomentar bahwa pemilu ini termasuk yang paling rumit, khususnya berkaitan dengan petunjuk proses pemilu yang seringkali kurang jelas ataupun peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah sehingga menghambat proses sosialisasi dan lain sebagainya. Namun, terlepas dari pendapat dan komentar apapun terkait pelaksanaan Pemilu Presiden kali ini, secara garis besar, semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan damai.



## KONTESTASI LIMA KANDIDAT WALI KOTA BLITAR

Pemberhentian Dajrot Saiful Hidayat dan Endro Hernowo yang telah habis masa jabatannya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, menjadi sinyal pertama bagi KPU periode ini untuk memulai perjuangan baru—menyambut pelaksanaan Pemilukada Kota Blitar periode selanjutnya. Pelaksanaan Pemilukada ini merupakan hajatan pertama untuk menilik performa tim komisioner untuk rumah sendiri—pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar masa jabatan 2010-2015.

Diselenggarakan di Tahun 2010, sebanyak lima kandidat berlomba untuk merebut kursi utama di pusat pemerintahan Kota Blitar. Kelima kandidat tersebut adalah Samanhudi Anwar–Purnawan Buchori, Hendro Ermono–Azhar Anwar, Anang Triono–Bambang Gunawan, Heru Sunaryanta–Shilih Mu’adi, dan Zaenudin–Masrukin.

Pada akhirnya, pasangan Samanhudi Anwar–Purnawan Buchori dari PDIP dan PKB, memenangkan kontestasi Pemilukada Kota Blitar 2010. Meskipun kala itu bukan unggulan, dukungan penuh dari partai pengusungnya menjadi kunci utama kemenangan mereka.

Sementara itu, pasangan yang diusung dari Partai Demokrat Heru Sunaryanta–Shilih Mu’adi, harus menelan pahitnya kekalahan meski telah diunggulkan oleh banyak pihak. Pada saat itu, Demokrat meraih suara terbanyak di Blitar.

Kondisi yang lebih memprihatinkan menimpa wakil Wali Kota Endro Hernowo yang maju untuk menjadi wali kota dan berpasangan dengan Azhar Anwar. Koalisi parpol PPP dan PKS tidak banyak memberi pengaruh untuk merayu partisipan, hingga akhirnya

mendapatkan hasil yang tidak cukup memuaskan, sehingga harus menerima kekalahannya.

Begitu juga dua pasangan lainnya, Anang Triono–Bambang Gunawan, calon wali kota dan wakil wali kota yang diusung oleh Golkar, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan Hanura, serta Zaenudin–Masrukin dari jalur independen, ikut berpartisipasi memeriahkan jalannya Pemilu dan menjadikan kontestasi ini sebagai pengalaman semata.

Proses pelaksanaan Pemilukada berjalan demokratis dan damai, meski masih disertai dengan beberapa kendala terkait dengan teknis penyelenggaraan dan beberapa ketidakpatuhan hukum oleh beberapa kandidat selama masa kampanye.

## **MENYAMBUT HAJAT KOTA**

Mempersiapkan pesta demokrasi, tentu KPU tidak bisa berjalan sendiri. Sumbangsih dari beberapa instansi luar sangat berperan untuk turut serta menyukseskan proses pelaksanaan Pemilu. Beberapa lembaga terlibat memberikan kontribusi yang inheren dengan daya fungsinya masing-masing, diantaranya adalah pemerintah Kota Blitar, DPRD Kota Blitar, Aparat Keamanan, Partai Politik, peserta Pemilukada, Akademisi, LSM, Ormas, dan komponen-komponen masyarakat Kota Blitar secara keseluruhan. Namun, dalam hal ini koordinasi lintas sektoral masih terbilang lemah, terutama dengan peserta Pemilukada dan partai politik, sehingga perlu dilakukan pertemuan rutin dengan lembaga terkait untuk membahas perkembangan permasalahan pemilu.

Proses persiapan Pemilukada dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku, mulai dari proses perencanaan penyelenggaraan, pembentukan organisasi penyelenggara seperti PPK, PPS, dan KPPS (Penataan organisasi), pembentukan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Blitar, hingga pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dengan Tembusan KPU tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Meski petunjuk teknis yang diberikan kurang sistematis sejak perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dan pelaporan, namun proses pelaksanaan masih dapat berlangsung dengan baik.

Pada proses perencanaan penyelenggaraan, tahapan, jadwal, anggaran dan pedoman teknis adalah menu utama yang dibahas oleh tim komisioner. Proses penyusunan tahapan tentu tidak dilakukan secara impulsif, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan diantaranya, mengakomodir putaran kedua Pemilukada apabila memang diperlukan, mengakomodir masa persidangan di MK, menyesuaikan alokasi waktu yang tercantum dalam UU, PP, dan lainnya. Tahapan ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan penyelenggara dalam mengeksekusi proses pemilihan.

Sementara itu, penentuan hari H dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan—berkonsultasi dengan beberapa pihak terkait. Penetapan tanggal sempat berubah-ubah karena beberapa hal menyesuaikan kondisi. Setelah melalui dialektika dan kontemplasi bersama-sama, pada akhirnya penyelenggaraan Pemilukada Kota Blitar ditetapkan pada Kamis 27 Mei 2010. Penetapan ini pun merupakan hasil revisi dari penetapan sebelumnya, yakni pada 2 Mei 2010.

## **Memburu Anggaran**

Perencanaan tahapan dan jadwal sudah ditetapkan, perencanaan anggaran menjadi agenda berikutnya. Memburu pemerintah Kota Blitar adalah hal pertama yang dilakukan KPU untuk memproses anggaran pelaksanaan Pilkada. Dari proposal anggaran belanja pemilu yang diajukan, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemkot untuk diajukan kembali ke DPRD Kota Blitar. Melalui proses tersebut, turunlah dana dari APBD Kota Blitar tahun 2010 sebanyak 3,5 Milliar. Sejumlah dana tersebut tidak hanya digunakan untuk KPU Kota Blitar saja, namun juga untuk tim KPPS. Sementara Pawaslu menjadi badan independen yang mendapatkan anggaran sendiri terlepas dari anggaran belanja pemilu oleh KPU.

Meski demikian, pencairan anggaran seringkali terlambat. Diperlukan adanya kebijakan dari KPU dan MENDAGRI untuk mengantisipasi keterlambatan pencairan anggaran, dengan memberikan dana talangan dari pemda setempat

## **Pembentukan Laskar Pemilukada**

Proses pelaksanaan pemilu, tentu tidak dapat dilakukan oleh hanya tim komisioner. Pembentukan organisasi penyelenggara seperti PPK, PPS, dan KPPS (penataan organisasi) juga diatur dalam perencanaan. Tim komisioner membagi tugas dalam pelaksanaan pembentukan organisasi penyelenggara. Seleksi anggota dan sosialisasi dipegang oleh Andrias Edison, akreditasi pemantau dan fasilitas kampanye oleh Mashudi, pemutakhiran daftar pemilih, pemungutan, dan perhitungan suara oleh Widiyanto Nugroho,

pencalonan oleh Abdul Basyid, dan logistik oleh Setyo Budiyo.

Pembentukan Kelompok Kerja Pemilukada dilakukan pada pertengahan Desember 2009–Januari 2010 dengan tahapan terstruktur. Mulai dari pengumuman pendaftaran, masa pendaftaran, tes tulis, dan tes wawancara, hingga pelantikan lalu bimbingan. Sebanyak 15 anggota PPK dan 63 anggota PPS, telah lolos seleksi administrasi hingga tes wawancara. Mereka yang terpilih untuk selanjutnya mengikuti prosesi pelantikan yang bertempat di Balai Kota Kusumowicitro Kota Blitar.

Dari anggota PPK dan PPS Pilkada yang dilantik, anggota PPS sekitar 70 persen merupakan wajah-wajah lama, sementara anggota PPK mayoritas orang-orang baru. Secara teknis tugas mereka dalam Pilkada semakin berat, dibandingkan Pilkada lima tahun lalu. Karena tahun ini ada calon wali kota dan calon wakil wali kota independen. Tugas PPS yaitu, memverifikasi kebenaran data dukungan dari calon independen tersebut. Dengan cara mendatangi langsung pendukung yang dibuktikan dengan KTP atau mengumpulkan para pendukung calon independen untuk *crosscheck* data. Jika ditemukan ada satu warga mendukung dua calon independen, maka akan dicoret dari daftar dukungan. Verifikasi ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya konflik.

Sementara itu pasca dilantik, puluhan anggota PPK dan PPS ini mendapatkan sosialisasi tentang Pilkada, serta potensi konflik dari KPU Provinsi Jawa Timur dan Polresta Blitar. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan teknik (BIMTEK).

Meski tak ada polemik yang berarti dan tak memicu

ketegangan antara beberapa pihak yang terlibat, namun pembentukan yang dilaksanakan tanggal tersebut dianggap terlambat, sehingga mengganggu tahapan. Seharusnya perlu dibuat tahapan yang alokasi waktunya mencukupi, dan disediakan petunjuk teknis yang aplikatif. Selain itu, syarat dan mekanisme rekrutmen terlalu rumit, seperti usia, pendidikan, surat keterangan kesehatan dan pengadilan. Aturan dan syarat pendaftaran harusnya lebih disederhanakan.

Berbeda polemik dengan pembentukan PPK dan PPS, pembentukan Panwaslu Kota dan Panwascam Pemilukada sempat terjadi perdebatan sengit. Perdebatan terjadi antara Bawaslu dan KPU Pusat hingga kabupaten/kota. Bawaslu menghendaki mempertahankan Panwaslu kabupaten/kota yang bertugas di Pileg dan Pilpres untuk bertugas di Pemilu daerah. Sementara KPU menghendaki rekrutmen baru. Hingga akhirnya, melalui proses diskusi, disepakati bahwa Panwaslu kabupaten/kota yang bertugas di Pileg dan Pilpres tetap bertugas di Pemilu daerah.

Namun, tak lama kemudian muncul uji materi UU di MK bahwa seleksi Panwaslu kabupaten/kota merupakan wewenang Bawaslu. Maka hasil kesepakatan akhir antara Panwaslu dan KPU, tidak memengaruhi keputusan MK.

## **Kampanye Pawai Damai**

Salah satu upaya kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon adalah dengan pawai secara damai. Pawai damai dilakukan dengan mengambil *start* di depan kantor KPU Kota Blitar Jalan Veteran dan *finish* di depan kantor Wali Kota Blitar, dengan rute melewati Jalan Veteran, Jalan Kenari, Jalan Palembang, Jalan Cemara, Jalan Semeru Barat, Jalan Anjasmoro, Jalan Sudanco Supriyadi, Jalan dr. Sutomo, Jalan A.Yani, dan Jalan Merdeka. Sejumlah massa

pendukung pasangan calon ada yang keluar jalur, seperti masuk perkampungan di Kelurahan Bendogerit, Jalan Patimura.

Abdul Basyid, Ketua Komisioner KPU Kota Blitar mengatakan, sesuai dengan kesepakatan bahwa dalam kampanye ini jumlah massa yang dilibatkan meliputi kendaraan roda 4 total 6 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 20 unit. Namun, para pasangan calon tidak mengindahkan aturan tersebut. Realisasi di lapangan peserta pawai damai ini melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Kendati demikian, pawai damai masih berjalan secara kondusif, sehingga KPU mengaku tidak bisa berbuat banyak dan tidak memberikan sanksi yang berarti.

Sementara untuk mengantisipasi gesekan antar pendukung selama pawai berlangsung, KPU meminta bantuan dari Polresta Blitar untuk mengkondisikan jalannya pawai damai hingga berakhir, dengan menerjunkan jajaran dari Polresta Blitar.

Memasuki hari kedua pelaksanaan kampanye pawai damai yang diikuti oleh ratusan massa dan lima pasangan calon Wali Kota dan calon wakil Wali Kota Blitar, 11 Mei 2010 berjalan kondusif, meski jumlah massa masih melebihi kuota yang telah disepakati sebelumnya.

## **Panas-Dingin di Tubuh Komisioner**

Proses pelaksanaan Pemilu mulai dari tahap perencanaan hingga eksekusi, tentu tidak serta merta berjalan sesuai perencanaan yang diekspektasikan. Panas dingin dalam tubuh komisioner juga dirasakan, khususnya menyoal kendala teknis penyelenggaraan serta perihal ketidakpatuhan kandidat selama penyelenggaraan Pemilu.

Beberapa permasalahan yang mewarnai jalannya Pemilukada,

diantaranya: terkait ketegangan diantara para pendukung calon, walau mereka bertetangga maupun bersaudara, ketidakjujuran tim sukses dari pasangan kandidat tertentu, masih ditemukannya praktik *money politic*, adanya perubahan perilaku pemilih yang sebelumnya memiliki perspektif aliran dan elite, menjadi lebih independen dan rasional, sehingga membutuhkan penyesuaian, konflik internal pengurus parpol/kepengurusan ganda, pengurus parpol mendukung lebih dari satu pasangan calon, keabsahan dokumen-dokumen kandidat sebaga prasyarat, kesulitan pengisian LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dari para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kekurangan data pendukung LHKPN tersebut, *Human error*, *politic error* dan *technical error* serta dalam *editing* data pemilih, dan beberapa hal lainnya.

Meski demikian, klaim hal terbaik dari Pemilukada adalah melahirkan kepala daerah terbaik, berkreaitif, dan membuat banyak inisiatif untuk pembangunan di daerah, sehingga mempercepat proses pembangunan di daerah dan menguntungkan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik dan kebijakan menguntungkan rakyat.

## **EMPAT KANDIDAT KETAT DI PILGUB JATIM 2013**

Empat kandidat di Pemilihan Gubernur (PILGUB) Jawa Timur yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2013, merupakan tahapan paling ketat bagi para calon gubernur dan wakilnya. Pasalnya, selain calon gubernur diusung oleh partai tertentu, ada pihak independen yang mencoba ikut dalam pemilihan ini.

KPUD Jatim menetapkan empat pasang Calon Gubernur



(Cagub) & Calon Wakil Gubernur (Cawagub) 2013 yang masuk dalam perebutan kursi Jatim II dengan masa jabatan 2013–2018. Yaitu: Nomor urut satu, Dr. H. Soekarwo–Drs. Saifullah Yusuf dengan partai pengusung diantaranya; Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Nasional (PKNU), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan 22 partai politik non parlemen.

Nomor urut dua ditempati oleh pasangan jalur independen, yaitu, pasangan Dr. H. Eggi Sudjana, S.H, M.Si dan Drs. Muhammad Sihah, ikut serta dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Nomor urut tiga oleh Drs. Bambang Dwi Hartono, M.Pd dan MH. Said Abdulloh yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Serta pasangan terakhir Khofifah Indar Parawansa–H. Herman S. Sumawiredja yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan lima partai politik non-parlemen. Saat itu pasangan Khofifah-Herman ditetapkan sebagai peserta baru yang sebelumnya tidak diikutsertakan sebagai pasangan cagub-cawagub oleh KPU Jatim, namun ada peninjauan ulang penetapan peserta Pilgub, dan akhirnya peserta Pilgub Jawa Timur yang tadinya tiga pasangan calon, menjadi empat pasangan calon.

Panggung politik Indonesia semakin diramaikan perebutan kursi kekuasaan di tingkat provinsi yang cukup menyedot perhatian publik. Partai politik semakin sibuk mencari dukungan terhadap calon. Demi meraih kemenangan, mereka berlomba mengusung calon terbaiknya. Selain persaingan antar parpol, para pasangan calon pun terlibat dalam kompetisi menarik. Salah satu cara mereka adalah

membuat singkatan nama pasangan yang unik. Selain untuk memikat perhatian khalayak umum, singkatan unik juga untuk memberi kesan dan mudah diingat oleh pemilih. Berikut nama singkatan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2009;

1. Pasangan Karsa (Sukarwo–Saifullah Yusuf)
2. Pasangan Beres (Eggi Sudjana–Muhammad Sihat)
3. Pasangan Jempol (Bambang Dwi Hartono–Said Abdulloh)
4. Pasangan Berkah (Khofifah–Herman)

Pada Pemilihan Gubernur Jatim 2013 di Kota Blitar terselenggara dengan baik, dan berjalan aman, serta kondusif seperti yang diharapkan semua pihak. Masyarakat Kota Blitar cukup antusias dengan pemilihan gubernur kali ini, terlebih ada dua pasangan calon yang masih berebut meraih suara terbanyak untuk mendapatkan kursi gubernur. Yaitu, Pasangan Soekarwo-Gus Ipul dan Pasangan Khofifah yang memilih Herman Sumawiredja menjadi wakilnya–calon wakil gubernur yang berbeda dari pemilihan tahun sebelumnya.

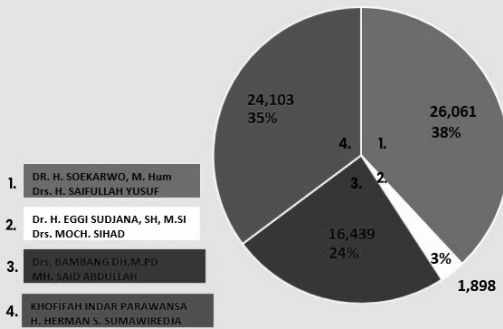
Empat kandidat bersaing secara ketat, dua pasangan yang dipertemukan kembali di Pilgub 2013, memiliki selisih suara yang signifikan. Dari hasil perhitungan suara di tiga kecamatan: Sukorejo, Kepanjen Kidul dan Sananwetan. Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf memperoleh suara terbanyak yaitu 26.061, disusul pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja yaitu 24.103, pasangan Bambang Dwi Hartono-Said Abdulloh memperoleh suara 16.439, dan pasangan dengan jalur independen yaitu Eggi Sudjana dan Muhammad Sihat memperoleh suara 1.898.

Hasil penghitungan suara Pilgub 2013 di Kota Blitar, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sananwetan dengan jumlah 10.806, Kecamatan Sukorejo 8.506, suara paling sedikit di Kecamatan Kepanjen Kidul dengan jumlah suara 6.749. Sedangkan pasangan Khofifah-Herman memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sukorejo dengan jumlah 8.446, Kecamatan Sananwetan 7.974, dan Kepanjen Kidul 7.663.

Urutan pasangan selanjutnya yaitu pasangan Bambang Dwi Hartono dan Said Abdulloh di Kecamatan Sananwetan memperoleh suara 5.621, Kecamatan Sukorejo 5.365, dan di Kecamatan Kepanjen Kidul memperoleh suara paling sedikit yaitu 5.453. Pasangan terakhir yang mendapat suara paling sedikit yaitu Eggi Sudjana dan Muhammad Sihat dengan suara terbanyak di Kecamatan Sananwetan 731 suara, Kecamatan Sukorejo 636, dan di Kecamatan Kepanjen Kidul memperoleh suara paling sedikit yaitu 531.

Sedangkan hasil rekapitulasi suara tingkat Jawa Timur, pasangan Soekarwo-Saifullah mendapat prosentase 47,25%, Pasangan Khofifah–Herman 37,62%, Pasangan Bambang–Said 12,69 %, dan Eggi S.–Muhammad Sihat 2,44%. Dengan hasil tersebut maka pasangan Soekarwo-Saifullah kembali memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2013 dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2013-2018.

**PEROLEHAN SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2013 DI KOTA BLITAR**



## AKHIR DARI PERIODE KEDUA

“Bagaimana yang namanya Pemilu di Indonesia adalah *pangejowantahan* dari sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bisa diimplementasikan dalam berbagai bentuk,” jawab Andrias dengan kedua mata penuh harapan, ketika ditanya mengenai harapan Pemilu Indonesia di masa depan.

Menurut Andrias, sampai saat ini Indonesia belum menerapkan sila ke-4 dari Pancasila, karena Indonesia masih menggunakan Pemilu model *voting* yaitu setiap manusia dinilai sebagai makhluk individu, jadi setiap individu adalah satu hal yang menentukan. Sedangkan jika menerapkan sila ke-4, nilainya adalah setiap manusia itu dinilai makhluk sosial.

“Sebenarnya penerapan sila ke-4 sudah dijalankan oleh

orang-orang dulu, seperti adanya musyawarah mufakat. Tapi untuk saat ini penyelenggaraan Pemilu di Indonesia berdasarkan *akeh-akehan uwong*, setiap individu dikumpulkan, yang paling banyak itu yang akan menang. Dan nantinya yang akan diakui memimpin negeri ini,” imbuhnya. Tapi, apapun yang terjadi dengan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, kita harus saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik agar bisa mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hari-hari selanjutnya di tubuh KPU memang tidak akan mudah, tentu banyak hal yang harus selalu dipersiapkan, siaga dan lebih profesional dalam menghadapi dunia perpolitikan di Indonesia yang regulasinya sering berubah di setiap pemilihan. Saling mendukung dan melibatkan semua pihak terutama lima komisioner adalah kunci utama, berlima adalah satu jiwa, satu kesatuan, jika ada masalah satu divisi harus diselesaikan bersama. Itulah yang memperkuat tubuh KPU hingga saat ini, demi terselenggaranya Pemilu yang diharapkan mendapat pemimpin yang amanah dan benar-benar bertanggung jawab sesuai harapan masyarakat Indonesia.

Blitar, Januari 2021

## Foto Dokumentasi



Foto dokumentasi Pilwali 2010



Foto dokumentasi Pilgub 2013



*Foto dokumentasi Pileg 2014*



*Foto dokumentasi Pilpres 2014*

# PROFIL KOMISIONER

## PROFIL ANGGOTA KPU KOTA BLITAR

PERIODE 2008-2014

**Drs. H. Abd. Basyid**, lahir di Lumajang, 1 September 1960 ini merupakan Ketua KPU Kota Blitar periode 2009–2014. Sebelum berada pada posisi tersebut, beliau memang sudah gemar berorganisasi. Dua organisasi diantaranya adalah Ketua Lembaga Pendidikan Dakwah Masjid Agung Kota Blitar dan Bendahara Forkom Pondok Pesantren Kota Blitar di tahun 2009–2014. Sebelumnya, di tahun 2005–2010 beliau menjadi Ketua Ikatan Sarjana NU Kota Blitar, lalu Katib Syuriah PCNU Kota Blitar pada 2006-2011. Beliau juga sempat menjabat sebagai Koordinator Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Blitar di tahun 2010–2013, dan pada 2008–2013 menjadi Ketua Forum Peduli Pendidikan Kota Blitar.

Beliau menamatkan pendidikan dasarnya di tahun 1975. Dilanjutkan SMP tahun 1977, SMA tahun 1980, dan Perguruan Tinggi di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1987. Pada tahun 1987 hingga 2010, beliau menjadi dosen Fakultas Dakwah di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selain di IAIN Sunan Ampel, beliau juga menjadi dosen Fakultas Dakwah di IAI Nurul Jadid Paiton dan di IAI Ibrohimy Situbondo tahun 1990-1999. Beliau juga sempat menjadi Anggota Lembaga Kajian Strategis Pembangunan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2010-2015. Ketika menjabat sebagai Ketua KPU



Kota Blitar tahun 2009-2014, beliau punya obsesi, yakni *berjuang untuk pengembangan budaya politik yang demokratis*.

### ***Sekilas Sosok Drs. H. Abd. Basyid***

*Kyai gaul*, demikian kawan-kawannya menyebut dirinya. Hobi barunya adalah bersepeda motor tua, yang dibeli dari rongsokan (baca: Kultur warisan leluhur, Madura) dan dipermak sedemikian rupa hingga jadi antik. Tak jarang keliling kota dan *kongkow-kongkow* dengan anak muda di jalanan untuk sekedar pamer sepeda motor antiknya.

Pria berkulit sawo mentah bertumpah darah Lumajang ini, memilih karir di dunia Pendidikan Islam. Dosen Fakultas Dakwah ini sudah malang melintang di berbagai perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur. Saat ini ia memilih menetap di Blitar, dan sudah dikaruniai empat anak. Beliau tinggal di Jalan Tidar 39, Kelurahan Kauman, Kota Blitar. Kemahirannya dalam berdakwah adalah bagian dari potensi yang dimiliki sebagai bekal terjun ke berbagai kegiatan kemasyarakatan, termasuk berani mendaftar menjadi anggota KPU Kota Blitar.

**Drs. Andrias Edison**, lahir di Blitar, 27 September 1962. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya dari SD Sananwetan IV Blitar di tahun 1975. Kemudian, lulus dari Sekolah Teknologi (ST) 2 Blitar tahun 1979. SMA I Blitar menjadi tempat menimba ilmu selanjutnya, dan usai tahun 1982. Di jenjang SMA ini pula, beliau sempat mengikuti organisasi DKC Pramuka Kota Blitar, sebagai ketua tahun 1982–1985. Selanjutnya, beliau mendapat gelar Diploma 3 (D3) PMP-

KN dari STKIP PGRI Blitar tahun 1986. Di sini, beliau sempat pula menjadi Sekretaris Senat Mahasiswa STKIP PGRI Blitar pada 1984. Kemudian, beliau melanjutkan ke jenjang S1 pada jurusan yang sama di IKIP PGRI Malang, dan lulus di tahun 1990. Pada tahun 1986–1989, beliau menjadi Anggota Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur.

Pria yang kini beralamat di Jalan A. Yani 84, Sananwetan Kota Blitar ini juga memiliki pengalaman organisasi lainnya, yaitu sebagai Wakil Ketua KNPI Kota Blitar 1992–2005, Anggota Barisan Seniman Muda Blitar di tahun 1993 hingga sekarang, Ketua DPC Pemuda Demokrat Kota Blitar pada 2003 hingga sekarang, Ketua II Dewan Kesenian Kota Blitar pada 2006–2010, dan menjadi Anggota Pelestari Ajaran Bung Karno di tahun 2005.

Sedangkan, untuk riwayat pekerjaan, beliau sempat menjadi guru selama 14 tahun. Terhitung sejak 1989 hingga 1996, beliau mengajar di SMP Negeri Modung, Bangkalan. Selanjutnya, pada tahun 1996 sampai 2003, beliau mengajar di SMP Negeri 2 Ngancar, Kediri. Barulah pada 2003 hingga 2009 beliau menjadi Ketua KPU Kota Blitar, dan di tahun 2009 sampai 2014 menjadi Anggota KPU Kota Blitar.

### ***Sekilas sosok Drs. Andrias Edison***

Di Kota Blitar, pria ini lebih dikenal sebagai seorang seniman. Darah seni mengalir dari bapaknya yang menjadi dedengkot Ludruk Gendro Rahayu, serta Berdikari, yang mengalami jaman keemasan tahun 1970-an. Main *tonil* masih menjadi *kelangenan* sampai sekarang.

Cita-citanya ingin menjadi polisi, dan dirintisnya sejak tahun 1977. Pergaulan selama di rumah kediaman keluarga Bung Karno di Blitar, *duli* adalah sebagai “oase” ideologi nasionalisme Soekarno yang banyak mewarnai keyakinannya. Cita-cita itu gagal, karena dihadapkan pada pilihan untuk menjadi Pendidik dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1989.

Geliat politik dan rasa berontaknya terhadap realitas politik dituangkan dalam karya puisi yang dijajakan dari panggung ke panggung. Tahun 1995, beliau pernah mengundang penyair se-Indonesia dalam acara Haul Bung Karno dengan puisi-puisi “nyerempet bahaya”, hingga dirinya harus berurusan dengan aparat keamanan. Saat menjadi anggota KPU Kota Blitar, obsesi pria yang punya motto hidup *sekali hidup berarti, setelah itu mati* ini masih tetap ingin memperjuangkan kehidupan politik yang lebih terhormat dan bermartabat. Berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Andrias Edison wafat pada tanggal 29 April 2021.

**TH. Widiyanto Nugroho, S.H.** yang lahir di Blitar, 3 Januari 1961 ini menamatkan pendidikannya di SD Katolik Santa Maria tahun 1973. Kemudian melanjutkan ke SMP Katolik St. Vincensius A. Paulo Garum, dan lulus tahun 1976. Melanjutkan ke SMA yang sama, beliau lulus pada 1980. Kemudian, pada 1984 beliau berhasil mendapat gelar Sarjana Muda Akuntansi dari STIE Malang Kuceswara. Dan di tahun 1988, beliau lulus dari Universitas Brawijaya Malang dengan gelar Sarjana Hukum.

Menyoal organisasi, pria yang beralamat di Jalan Melati Gg.II/425 Kepanjen Kidul, Kota Blitar ini sempat berperan dalam sejumlah organisasi. Diantaranya, sebagai Pengurus Dewan Paroki Santa Maria Blitar, Anggota PWI Cabang Blitar, juga Sekretaris dan Bendahara LPMK Kepanjenkidul. Selain itu, beliau juga menjadi Sekretaris Heritage Society (BHS), dan Sekretaris sekaligus Humas di Dewan Kesenian Kota Blitar.

Sebelum menjadi Anggota KPU Kota Blitar periode 2003-2009 dan 2009-2014, beliau yang mempunyai motto hidup *melayani demokrasi dengan baik dan benar* ini sempat bekerja sebagai akuntan di beberapa perusahaan swasta, juga menjadi wartawan di sejumlah media cetak di Jawa Timur. Beliau sempat bertugas di Surabaya, Malang, Mojokerto, Kediri, Tulungagung, dan Blitar.

### ***Sekilas Sosok TH. Widiyanto Nugroho, SH***

Mantan wartawan ini paling doyan pijat, istrinya pun heran, seminggu ia bisa pijat empat kali. Dalam komunitas beberapa kalangan di Kota Blitar, ia lebih akrab dengan anggilan “Om Wiwid” karena anatominya agak ke-oriental-an. Dia juga fans berat aktor cilik film laga Hongkong, Bo Bo Ho. Barangkali teringat masa kecilnya dulu.

Pria *low profile* ini adalah pekerja administrasi yang sangat handal dan instingnya mempunyai sinyal yang sangat sensitif terhadap tanda-tanda kerawanan politik. Oleh karena itu, ia dapat menyusun tahapan dengan tangannya yang sejuk, cermat, tekun, teliti, dan berpengalaman. Pemilikada bisa berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan obsesi

dirinya sebagai pekerja yang berusaha memberikan pelayanan yang baik dan benar.

**Setyo Budiono, S.E**, lahir di Magetan 19 September 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SDN II tahun 1981. Berlanjut ke SMP Negeri I Kawedanan, dan lulus tahun 1984. Sebuah SMA Negeri menjadi tempat menuntut ilmu selanjutnya, dan lulus tahun 1987. Kemudian, beliau masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, dan lulus di tahun 1993.

Selama berkuliah, beliau aktif dalam sejumlah organisasi. Diantaranya, sebagai Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah tahun 1989, dan Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pada tahun 1997, beliau menjadi pengurus HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Beliau sempat pula menjadi Sekretaris Organda Blitar.

Menyoal riwayat pekerjaan, pria yang beralamat di Perumahan Puri Kenari Asri, Blok C-15, Plosekerep ini pernah menjadi karyawan kontrak di Bank BNI 46 Cabang Palangkaraya pada 1996-1997. Setelah itu, di tahun 1998-2000, beliau sempat memanageri sebuah perusahaan bernama PT. Hasnur Jaya Utama Palangkaraya. Lalu, pada 2001 hingga sekarang menjadi Direktur CV. Putra Nusantara Blitar. Serta menjadi Anggota KPU Kota Blitar periode 2009-2014.

## *Sekilas Sosok Setyo Budiono, S.E*

Pria tambun beranak tambun dan beristri “agak” tambun ini pas banget menyandang gelar intelektual “serjana ekonomi”. Gelar tersebut tidak hanya ditempuh dengan duduk kuliah, dan minta duit saja, melainkan harus ditopang dengan menjadi sopir “janggolan” angkatan pedesaan yang sudah *grobyak-grobyak* alias butut, jalur Blitar–Tulungagung

Setelah lulus, ia melanglang hampir separo pulau terbesar di Indonesia dalam rangka pengaplikasian dan manifestasi dari keilmuan yang disandangnya. Namun sejauh-jauh burung berterbang, akhirnya kembali ke sangkarnya jua.

Tahun 2001, ia kembali ke pangkuan kedua orang tuanya, Kec. Wonodadi Kab. Blitar dan memerankan diri sebagai Direktur CV. Putra Nusantara yang bergerak dalam bidang konstruksi. Untuk memperlancar usahanya, sekeluarga hijrah (boleh dibaca: menjajah) Kota Blitar. Di KPU Kota Blitar mendapatkan tugas pada divisi Anggaran dan Program. Pria yang punya obsesi *menjadi penyelenggara pemilu yang berkualitas, yaitu integrated, professional, dan akuntabel* ini telah wafat pada 20 September 2020 lalu.

**Mashudi, S.H.I.** lahir di Blitar, 15 Juli 1978. Bersekolah di SD Negeri Bendogerit II dan lulus tahun 1992. Berlanjut ke SMP Negeri 6 Blitar, dan lulus tahun 1995. MAN Tlogo menjadi tempat menimba ilmu berikutnya, dan lulus di tahun 1997. Kemudian, beliau berkuliah di STAIN Tulungagung, dan lulus tahun 2004.

Ada sejumlah organisasi yang pernah beliau ikuti. Di MAN Tlogo, beliau sempat menjadi Ketua PMR tahun 1996–1997. Pada tahun 2001–2002, menjadi Dansat Menwa Mahasurya STAIN Tulungagung. Kemudian, pada tahun 2002–2003, menjadi Divisi Advokasi PC PMI Tulungagung. Pada tahun 2005–2007 berpartisipasi di Lapekdam NU Cabang Tulungagung. Selain itu, di tahun 2003–2008 menjadi Sekjen di Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Timur. Di tahun 2010, beliau berperan juga dalam PC Ansor Kota Blitar.

Sebelum berada di Divisi Hukum KPU Kota Blitar tahun 2009–2014, beliau sempat bekerja di berbagai bidang. Beliau sempat menjual souvenir di Makam Bung Karno selama empat tahun, di tahun 1990–1994. Sempat pula menjadi penarik becak di tahun 1995–2002. Pernah berpartisipasi pula dalam Asosiasi Pengacara Indonesia (APSI) pada 2003–2006. Selanjutnya, di 2004–2008 menjadi konsultan pendamping untuk Program Pengentasan Kemiskinan. Sempat pula menjadi fasilitator tim Ranperda Kota Blitar. Tahun 2007–2008.

### ***Sekilas Sosok Mashudi, S.H.I***

Di kalangan intern KPU Kota Blitar, pria beranak satu ini lebih akrab dengan panggilan “Ragil” karena memang usianya paling muda diantara empat anggota KPU lainnya. Perjalanan hidup dalam menjuang nasib tergolong hebat. Pada usia 15 sampai 22 tahun ia *mancal* becak untuk mengejar cita-citanya. Konon katanya, pernah daftar jadi tentara sampai pada seleksi tahap penuh harapan terpaksa gagal karena suatu hal.

Di atas becak semangat juang tak kunjung padam. Ia menimba ilmu di STAIN Tulungagung. Dipilihnya Tulungagung agar *mbecak*-nya tidak diketahui teman-teman kuliahnya. Suatu hari kenal dengan seorang gadis dari pelosok Tulungagung dan akhirnya mau diperistri hanya berbekal menunjukkan cita-citanya.

Dari ilmu yang didapat sampai tahun 2004, ia menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I). Saat itulah ia memberanikan diri menjadi pengacara yang tergabung dalam APSI. Lumayan, suatu profesi yang sudah berdasar.

Lelaki yang punya motto hidup *hidup adalah amanah, perjuangan, dan ibadah* ini sekarang punya bisnis kecil-kecilan. Yaitu usaha penambangan pasir di sungai kecil belakang rumahnya. Ia adalah sosok pekerja keras untuk mewujudkan Pancasila sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menjadi anggota KPU Kota Blitar, hanya karena mengemban amanah Undang-Undang Dasar 1945.





---

# **Periode 2014-2019**

Disusun oleh Lulu Kamalia dan Zulfa Ilma



*Dua Dekade Kota Blitar Memilih*

---

## **KIPRAH PESTA DEMOKRASI DI KOTA BLITAR**

Negara demokratis memiliki sebuah ciri yaitu negara yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, hingga pelaksanaan pemilihan umum untuk mencari pemimpin yang benar-benar bertanggung-jawab sesuai harapan masyarakat. Sebab, tatanan yang demokratis adalah aspek terpenting sebuah negara. Dalam hubungan demokrasi, partisipasi politik juga berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat harus didasarkan pada analisis argumentasi yang kuat.

Pemilihan umum diakui secara global merupakan sebuah arena membentuk demokrasi perwakilan, serta menggelar pergantian pemerintahan secara berkala. Dalam kata lain, Pemilu merupakan sebuah arena yang mewadahi kompetisi antaraktor pihak politik untuk meraih sebuah kekuasaan, serta partisipasi masyarakat atau rakyat sebagai penentu dalam pilihan.

### **Persiapan Memilih Komisioner KPU Kota Blitar**

Seleksi calon anggota Komisioner KPU Kota Blitar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam tahap seleksi, tim seleksi KPU Kota Blitar melaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut; pengumuman pendaftaran, penerimaan pendaftaran, penilaian administrasi kelengkapan, mengumumkan hasil seleksi administrasi, seleksi tertulis, tes kesehatan, tes psikologi, penetapan hasil seleksi wawancara, penetapan hasil wawancara, dan mengumumkan hasil seleksi.

“Tahapan-tahapan diusulkan tiga orang, dan harus memenuhi syarat. Kemudian dipilih oleh KPU Pusat, KPU Provinsi untuk diseleksi,

dan ketentuan lain-lain harus sesuai dengan aturan,” ungkap Edi Winarno selaku sekretaris KPU Kota Blitar, ketika ditanya bagaimana tahapan memilih komisioner KPU.

Salah satu Komisioner bagian Parmas dan SDM, Herwidi Bastugito, S.H. juga mengatakan. “Pertama diumumkan ke media. Jadi, kita umumkan ke media cetak, maupun media elektronik yang berkaitan dengan KPU, bahwa di KPU ada kegiatan apa. Mungkin ada Pilpres, atau yang seperti itu,”

Herwidi juga menjelaskan, orang-orang yang berada di tingkat PPK dan PPS pasti memiliki jaringan di bidang tenaga. Mereka itulah yang menjadi koordinator jaringan di KPU Kota Blitar.

“Kemudian pada hari pendaftaran, jumlah yang mendaftar itu lumayan banyak. Kita lakukan tes tertulis, wawancara, dan seterusnya, kemudian baru nanti terpilih. Biasanya kita juga punya stok calon anggota melebihi jumlah yang dibutuhkan,” tambah Herwidi menjelaskan alur pendaftaran.

KPU membutuhkan lima orang, maka harus memiliki stok 10 calon yang bakal lolos, fungsinya sebagai stok cadangan jika suatu hari ada yang mengundurkan diri atau hal lain. Selanjutnya, calon anggota komisioner KPU Kota Blitar ini juga menjalani uji kelayakan, hingga menunggu keputusan dari KPU Provinsi Jawa Timur. Jadi, ketika sudah diputuskan siapa yang lolos persyaratan, bakal ada lima orang yang akan terpilih menjadi komisioner dan diperlukan di tubuh KPU Kota Blitar.

Setelah menunggu keputusan dari KPU Jawa Timur, keluarlah hasil seleksi yang akan bertugas di Tahun 2014–2019. Nama-nama anggota komisioner KPU Kota Blitar periode 2014–2019 ialah Setyo Budiono S.E sebagai ketua KPU kota Blitar, Choirul Umam, S.Pd,

sebagai Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Mashudi, S.H.I. sebagai Divisi Teknis, Ummu Chairu Wardani, S.E sebagai Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Herwidi Bastugito, S.H. sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Edi Winarno, S.Sos. sebagai Sekretaris KPU Kota Blitar.

## **Anggaran dibalik Layar**

Anggaran dalam pemilihan tentu hal yang terkadang dipertanyakan oleh masyarakat umum. Darimana anggaran tersebut, hingga bagaimana alurnya anggaran yang dijadikan untuk pemilihan bisa cair dan apakah sesuai dengan rencana anggaran yang sudah dipersiapkan.

Anggaran yang diberikan KPU sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah tiap daerah, memiliki aturan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah dalam pemilihan yang disepakati bersama.

Seperti halnya kata Edi Winarno—Sekretaris KPU Kota Blitar saat itu—menjelaskan tentang anggaran, “Prinsip bahwa anggaran yang buat kampanye cukup segini, itu ada tatanan, dan ada kesepakatan. Itu kita juga harus sesuai aturan.”

### **Segelintir Masalah**

“Ketika Pileg memasuki tahap penghitungan, kami mengirim kotak suara, dan kehujanan di Sukorejo. Jadi, harus mengganti beberapa surat suara yang kehujanan di Kecamatan Sukorejo,” kata Herwidi menceritakan kenangan di masa lalu, bagaimana harus menghadapi situasi sulit yang harus segera diatasi.

Sebelum menjadi komisioner KPU, Herwidi pernah menjabat sebagai Pemberdaya Masyarakat sekitar 17 tahun, termasuk menjadi salah satu bagian dari Lembaga Konsultan Pemberdayaan Masyarakat. Jadi ketika menjabat menjadi Komisioner KPU, sudah memiliki bekal dalam menghadapi masyarakat yang heterogen. Terutama dalam dunia politik yang di dalamnya terdapat berbagai jenis karakter orang yang akan melakukan beragam cara agar tujuannya berhasil.

Dalam menyelenggarakan pemilihan, tentu anggota KPU memiliki beban atau masalah yang harus dihadapi. Dari beberapa pemilihan umum, pemilihan yang paling memiliki beban tersendiri adalah Pilkada, karena pemilihan yang dilaksanakan di wilayah Kota, jadi beban psikologisnya terasa lebih berat.

Hal itu diceritakan Widi, bagaimana beban psikologis yang paling berat adalah saat Pilkada. “Pileg atau Pilpres secara teknis sama saja, namun dilihat secara beban psikologisnya tidak sama. Kalau Pileg, jumlah bebannya lebih banyak memfasilitasi dari PPK, PPS, yang sudah tertata 33, cuma masing-masing memiliki beban psikologi dan tanggung jawabnya *enggak* harus tes. Dan yang paling berat adalah Pilkada, soalnya di daerahnya sendiri,” ungkap Herwidi menjelaskan.

Permasalahan tak hanya seputar tentang beban psikologis, tapi anggota komisioner juga harus siap menghadapi berbagai isu yang tak lepas dari mencari kepentingan daerah, agar tujuan yang ingin dicapai bisa berhasil dengan baik. Sedangkan di satu sisi, KPU harus tetap independen dengan aturan yang telah ditetapkan, tidak terikat dan terpengaruh dengan kepentingan daerah atau tipe penguasa daerah yang berbeda, agar pelaksanaan pemilihan bisa berjalan dengan kondusif.

“KPU, kan, memang lembaga struktural dari atas ke bawah, dan tidak terikat ke daerah, sehingga kami betul-betul *independen*. Pada saat Pilkada era itu, kami harus menghadapi berbagai isu kepentingan daerah, juga tipe-tipe penguasa daerah,” tambahnya, teringat ketika menghadapi kepentingan daerah, terlebih dia adalah bagian Divisi Hukum dan Pengawasan.

## **LIKA-LIKU PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014**

Partisipasi masyarakat pada pemilihan umum sangat menentukan arah kemajuan suatu bangsa, karena masyarakat adalah poin terpenting dari setiap pemilihan. Kualitas besarnya partisipasi masyarakat dinilai bisa mempengaruhi komponen kualitas pemilihan dalam menentukan pemerintahan yang sesuai dengan harapan bangsa.

Dengan adanya hal tersebut, KPU Kota Blitar mengadakan sosialisasi di berbagai elemen masyarakat, agar turut serta berpartisipasi dalam pemilihan. Karena sebenarnya yang menentukan sukses tidaknya Pemilu bukan hanya terletak pada pihak penyelenggara, tapi juga seluruh pihak, terutama masyarakat.

“Keberhasilan proses pemilu tidak hanya bergantung pada KPU, tapi juga pada penyelenggara, peserta pemilu—dalam hal ini pada Pemilukada—bukan pada partai politik, tapi kepada partai pemilu, pada pemerintah, dan masyarakat,” kata Mashudi yang menjabat sebagai Divisi Teknis.

Sebenarnya, salah satu penyebab kelemahan Pemilu adalah adanya regulasi yang menghambat pelaksanaan pemilihan. Oleh karena itu, sama seperti Pemilu sebelumnya, KPU Kota Blitar

membentuk badan ADHOC sebagai kelompok penyelenggara.

KPU Kota Blitar mengadakan seleksi calon anggota yang bertujuan menyampaikan informasi, dan menampung saran dan tindakan. Di sisi lain, perihal verifikasi dokumen partai politik calon peserta pemilu tahun 2014 juga harus dilengkapi.

Berdasarkan hal itu, maka KPU Kota Blitar membuat tahapan pembentukan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 dengan melaksanakan pengukuhan anggota PPK dan PPS, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013, menjadi PPK dan PPS Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Tahapan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 05 Tahun 2013 tertanggal 02 April 2013, tentang PPK (Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam penyelenggaraan panitia Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

KPU Kota Blitar menyusun pembentukan kelompok kerja persiapan pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, yang terdiri dari enam kelompok yaitu: kelompok kerja pendaftaran dan verifikasi bakal calon anggota DPD Kota Blitar, penerapan pedoman pengelolaan logistik umum, kelompok kerja penyusunan daerah pemilihan, kelompok kerja monitoring, kelompok kerja sosialisasi penyelenggaraan pemilu, kelompok kerja pelantikan, dan bimbingan teknis panitia kecamatan dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Serta ada juga pemutakhiran serta penyusunan data pemilih.

## **Menyisir DPT**

Dari hal tersebut, KPU Kota Blitar menerima data kependudukan dari Catatan Sipil pada tanggal 6 Desember 2012



dengan rincian: jumlah kecamatan ada tiga, jumlah Data Agrerat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) laki-laki ada 66.973 orang, Data Agrerat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) perempuan ada 65.928 orang, dan keseluruhan total ada 132.901 orang.

Kemudian ada penetapan DPT yang juga diinstruksikan oleh KPU RI agar ada perbaikan dan pencermatan terhadap proses penempatan DPT Kota Blitar. Jadi waktu itu ada beberapa kali perubahan dalam penetapan DPT.

Pertama, penempatan DPT pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 oleh KPU Kota Blitar pada tanggal 12 September 2013. Pada saat itu, pleno yang dihasilkan dalam penetapan DPT pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebanyak 108.872 orang. Sedangkan jumlah TPS Kota Blitar sebanyak 311 TPS.

Kedua tentang penetapan daftar pemilih dan penempatan DPT agar dapat diplenokan kembali. Di sini, KPU Kota Blitar melakukan penetapan kembali pada tanggal 13 Oktober 2013, yaitu tentang rekapitulasi DPT, seperti pencermatan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014. Jumlah DPT Kota Blitar pada pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 sebanyak 108.531 orang, dan jumlah TPS Kota Blitar sebanyak 311 TPS.

Ketiga, tentang pembersihan data ganda K1. KPU Kota Blitar juga mengadakan pleno perbaikan DPT bersama Partai Politik dan Panwaslu Kota Blitar pada tanggal 19 Oktober 2013. Pleno tersebut berisikan jumlah DPT Kota Blitar pada pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yakni sebanyak 108.531 orang. Sedangkan jumlah TPS Kota Blitar sebanyak 311 TPS.

Kemudian, yang keempat adalah perbaikan daftar pemilih KPU Kota Blitar dan kemudian menetapkan kembali daftar tetap

jumlah DPT Kota Blitar pada pemilihan umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Yaitu sebanyak 108.531 orang, dan jumlah TPS Kota Blitar sebanyak 311 TPS.

Kelima, tentang perbaikan NIK yang *invalid*, serta pleno dilaksanakan pada tanggal 28 dan 30 November 2013. Hasilnya, jumlah DPT Kota Blitar pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebanyak 108.531 orang, dan jumlah TPS Kota Blitar sebanyak 311 TPS. Sementara, NIK *invalid* dari KPU Kota Blitar sebanyak 907 pemilih. Sedangkan jumlah NIK *invalid* yang dapat diperbaiki ada 736 pemilihan, dan yang tidak memenuhi syarat ada 171 pemilih.

Keenam, tentang revisi jadwal kerja, KPU Kota Blitar melakukan rekapitulasi penyempurnaan DPT yang dirinci sebagai berikut: DPT sebanyak 107.553 orang, dan jumlah TPS Kota Blitar sebanyak 311 TPS.

Dari kronologi penempatan DPT, di Kota Blitar dalam Pemilu DPR, DPRD dan DPRD Tahun 2014, pada tanggal 18 Januari 2014 telah disempurnakan dengan jumlah 107.553 pemilih.

## **Partai Politik pada Pemilihan Legislatif 2014**

Sama halnya dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, pendaftaran dan verifikasi partai politik dilakukan sedikit berbeda. Pemilihan legislatif lebih selektif dalam memilih partai yang akan melakukan verifikasi peserta pemilu. Oleh sebab itu, KPU Kota Blitar melaksanakan penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan partai politik, yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 29 September 2012.

Hasilnya, partai politik yang menyerahkan kelengkapan dokumen ke KPU Kota Blitar sampai tanggal 29 September 2012

sebanyak 22 partai politik, yang terdiri dari: Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Damai Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Serikat Rakyat Independen, Partai Buruh, Partai Republik, Partai Kedaulatan, Partai Nasional Republik, Partai Nasional Peduli Bangsa, dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Selanjutnya, semua dokumen tersebut diverifikasi faktual secara kepengurusan dan keanggotaan partai politik, yang melingkupi: keberadaan kantor, bukti kepemilikan kantor, daftar pengurus dan keberadaan pengurus inti.

Ada pula verifikasi faktual anggota, yaitu setiap partai wajib memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000, dan jumlah KTA yang diverifikasi sebanyak 10%. Jika belum memenuhi syarat maka akan diberi waktu untuk melakukan perbaikan.

Dari 16 parpol yang diverifikasi di atas, ada 11 Parpol yang memenuhi syarat, dan lima Parpol harus melakukan verifikasi ulang.

Berikut partai politik yang mengikuti Pemilu Legislatif 2014 dan memenuhi syarat verifikasi:

<b>NO</b>	<b>Partai Politik</b>
1	Partai Nasdem
2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Partai Keadilan Sejahtera
4	PDI Perjuangan
5	Partai Golongan Karya
6	Partai Gerindra
7	Partai Demokrat
8	Partai Amanat Nasional
9	Partai Persatuan Pembangunan
10	Partai Gerakan Indonesia Raya
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
13	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KPU Kota Blitar menetapkan penataan dan penetapan daerah DPRD Kota Blitar, yang dilaksanakan melalui tahapan pembahasan dan penetapan dari KPU RI. Tahapannya, menyerahkan hasil penataan Dapil DPRD Kota Blitar ke KPU RI. Kemudian, KPU RI melakukan penetapan daerah pemilih yang dilaksanakan pada 9 Maret 2013.

Tahapan pencalonan anggota DPRD Kota Blitar, yaitu: pengumuman pendaftaran calon anggota DPRD Kota Blitar, pendaftaran calon anggota DPRD Kota Blitar, verifikasi kelengkapan administrasi, penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi, perbaikan daftar calon dan syarat, verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat, penyusunan dan penetapan DCS (Daftar Calon Sementara) anggota DPRD Kota Blitar, pengumuman DCS anggota DPRD, pemberitahuan pengganti DCS, pengajuan pengganti bakal calon anggota DPRD, verifikasi DCS anggota DPRD, penyusunan dan penetapan DCT (daftar calon tetap) anggota DPRD Kota Blitar, dan Pengumuman DCT anggota DPRD Kota Blitar.

## **Masalah itu Berada di Logistik**

Sementara itu, pengadaan dan distribusi logistik yang diperlukan dalam Pemilu Legislatif 2014 juga dilakukan dengan sigap. KPU Kota Blitar membentuk keputusan sesuai dengan keputusan Sekretaris Pemilu Kota Blitar. Dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, KPU juga melakukan sortir surat suara, pengesetan, dan pengepakan logistik, distribusi surat suara, dan me-monitoring logistik.

Permasalahan yang dihadapi dalam proses Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 adalah keterlambatan logistik dari pusat dan provinsi yang menyebabkan terganggunya penyortiran surat suara dan pendistribusian logistik. Selain itu, beberapa model tidak bisa dipenuhi oleh KPU Pusat dan Provinsi sesuai jumlah yang dibutuhkan. Jadi di Kota Blitar harus menggandakan formulir, yang menyebabkan pembengkakan biaya anggaran.

Pada Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, KPU Kota Blitar melakukan Program Relawan Demokrasi, yang dilatarbelakangi penurunan partisipasi pemilih. Dengan adanya relawan demokrasi ini, diharapkan pemilih akan menggunakan hak pilihnya secara optimal. Selain itu, relawan demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menanamkan pemahaman pentingnya pemilu.

Pemilu 2014 ini merupakan sebuah titik balik persoalan pemilihan yang sebelumnya. KPU Kota Blitar bersama komponen masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan titik balik menjadi negara yang demokratis dan kondusif, sehingga keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi salah satu pilar penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

## DI BALIK PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2014

KPU Kota Blitar bertekad menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 dengan berusaha semaksimal mungkin. Dalam hal ini harus didukung oleh semua pihak, terutama jajaran penyelenggara yang kredibel dan akuntabel. Pelaksanaan persiapan proses tahapan Pemilu mulai dari Adhoc—seleksi anggota KPU Kota Blitar, dan pembentukan tim kerja. Kemudian, melaksanakan proses tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, serta mengevaluasi jalannya pemilu.

Selain membentuk pemilihan, badan penyelenggara Adhoc juga membentuk kelompok kerja. Dalam persiapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibentuk sembilan kelompok, antara lain:

1. Kelompok kerja *updating* data pemilih pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
2. Kelompok kerja penyusunan dan penetapan rekapitulasi
3. Kelompok kerja aplikasi hitung suara Pemilu Presiden Tahun 2014
4. Kelompok kerja asistensi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014
5. Kelompok kerja Bimtek pemungutan dan penghitungan suara Pileg dan Pilpres
6. Kelompok kerja kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi
7. Kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

8. Kelompok kerja fasilitas dan persiapan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 (Putaran 1)

9. Kelompok kerja klasifikasi dokumen data hasil Pilpres tahun 2014.

KPU Kota Blitar tidak menyelenggarakan PPK dan PPS, karena penyelenggaraan Pileg akan berlanjut hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Akan tetapi, KPU Kota Blitar tetap menetapkan DPS sebagai hasil verifikasi atas masukan dan tanggapan dari masyarakat dengan menggunakan SIDALIH (Sistem Informasi Pendataan Pemilih). Proses ini dilakukan oleh PPK yang melakukan pemutakhiran data. Dari hasil pemutakhiran oleh PPS setempat yang dilakukan pada 17 Mei 2014, kemudian diadakan pleno terbuka, juga penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Khusus. Total DPS saat itu sekitar 107.553 orang, dari hasil rekapitulasi pemilih tetap sekitar 55.425 orang, dan rekapitulasi pemilih khusus ada 92 orang.

Mengingat pentingnya peranan partisipasi politik yang bertujuan untuk menyukseskan pemilu, maka KPU Kota Blitar berupaya mengadakan sosialisasi sebagai salah satu cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Keikutsertaan warga negara sangatlah penting, karena dapat mendorong kualitas demokrasi itu sendiri.

KPU Kota Blitar mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan target berbagai elemen masyarakat yang menjadi agen sosialisasi politik, seperti: dinas di lingkungan pemerintahan Kota Blitar, organisasi profesi, lembaga pendidikan seperti: guru, PNS beserta stafnya, media cetak yang digunakan berupa baliho, spanduk,

*billboard*, poster, *leaflet*, dan *banner*, LSM, maupun media elektronik seperti radio, televisi, serta organisasi kemasyarakatan seperti kelompok keagamaan (NU, Muhammadiyah LDII, Persatuan Gereja Kristen, Persatuan Gereja Katolik, Pura dan juga Wihara).

## **Alur Kampanye Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014**

Pada masa kampanye, KPU Kota Blitar juga menentukan peraturan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun diubah dengan Nomor 27 Tahun 2014, yang isinya adalah dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon dapat berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul yang membentuk tim kampanye tingkat nasional. Selanjutnya, tim kampanye tingkat nasional bisa membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten/kota.

Dari pernyataan di atas, KPU Kota Blitar juga membuat metode kampanye yang harus dijalankan antara lain: pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran kampanye melalui media cetak dan elektronik, penyebaran melalui radio atau televisi, debat pasangan calon, maupun kegiatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kampanye yang dilakukan juga tak luput dari pengawasan KPU. Di Kota Blitar, KPU telah menentukan kampanye dari 18 Juli 2014–16 September 2014, dan masa tenang pada 6–8 Juli 2014. Tak lupa juga memberikan *list* laporan dan penggunaan dana kampanye agar tidak keluar dari Undang–Undang yang berlaku.



## **Perjalanan Logistik Pemilu**

Perencanaan kebutuhan logistik, seperti pengadaan dan distribusi yang diperlukan saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diterima KPU Kota Blitar pada tanggal 20–25 Juni 2014. Kemudian, dari Provinsi Jawa Timur diterima pada tanggal 15–29 Juni 2014. Sementara dari KPU Pusat diterima tanggal 20–25 Juni tahun 2014.

Barang–barang logistik diantaranya: tali pengikat, alat coblos, karet gelang, lem/perekat kertas, kantong plastik besar, kantong plastik kecil, bolpoin, spidol kecil, spidol besar, stiker kotak suara, stiker identitas “A dan B”, bantalan/ alat coblos, alat pemberi tanda pilihan, tanda pengenal KPPS, tanda pengenal TPS, tanda pengenal sanksi, pedoman KPPS, dan gembok serta anak kunci.

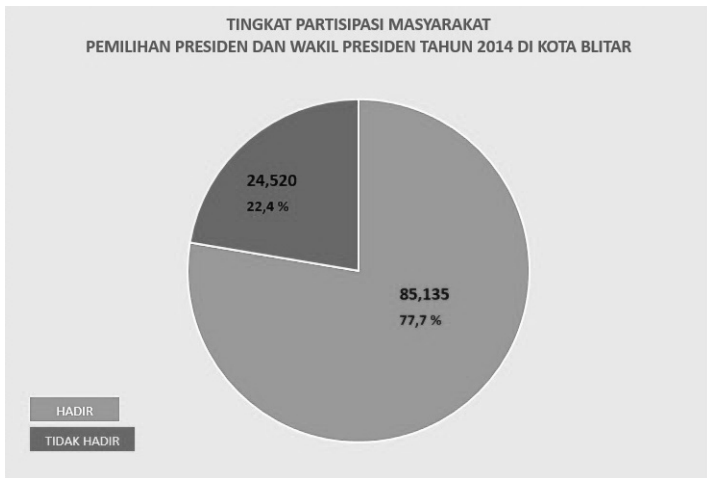
KPU Kota Blitar juga melaksanakan sortir surat suara. Sortir surat suara diadakan untuk mengetahui kualitas surat suara yang diterima dalam kondisi baik dan tepat jumlahnya. Melakukan kegiatan pengesetan dan pengepakan logistik yang dilakukan pada tanggal 26–28 Juni 2014. Kegiatan tersebut dilakukan agar pendistribusian menjadi mudah, dan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Selanjutnya, KPU Kota Blitar melakukan bimbingan teknis dalam sistem informasi penghitungan suara. Bimbingan teknis tersebut dilakukan dengan sosialisasi dengan tujuan meningkatkan penyelenggaraan pemilu di tingkat PPK, khususnya model C1 yang membawahi PPS dan KPPS.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Ketua KPU Kota Blitar, Setyo Budi, SE. Kemudian diplenokan dalam rekapitulasi hasil perolehan suara calon presiden dan wakil presiden 2014.

## Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki partisipasi yang tertinggi di Indonesia, karena momen penentuan kepala negara. Dari periode 2014–2015, pada penghitungan suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Blitar memiliki presentase 77, 64%. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 saat itu adalah H. Prabowo Subianto–Ir. H.M. Hatta Rajasa dan Ir. H. Joko Widodo–Drs. H. M Jusuf Kalla.



Persiapan demi persiapan dilakukan oleh KPU Kota Blitar agar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 terlaksana dengan baik. Salah satunya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, karena peran serta masyarakat sangatlah penting sebagai perwujudan negara demokrasi dan penentu kemenangan dalam proses Pemilu.

Pengalaman politik saat Orde Baru telah memperlihatkan kesewenangan para elit politik dalam mengambil jalan atau kebijakan yang diputuskan secara sepihak, sehingga banyak yang tidak

sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu, KPU Kota Blitar sebagai penyelenggara selalu berupaya meningkatkan peran masyarakat dalam pemilu sebagai wujud proses demokrasi yang berlaku di Indonesia.

## **Masalah yang Tiba-Tiba Datang**

Adapun permasalahan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang terjadi di KPU Kota Blitar berkaitan dengan logistik, yaitu keterlambatan logistik dari KPU Pusat dan KPU Provinsi yang menyebabkan kegiatan pendistribusian terganggu.

Selain itu, KPU Pusat dan KPU Provinsi tidak bisa memenuhi model formulir yang dibutuhkan, sehingga jumlahnya kurang memenuhi kebutuhan. Hal itu menyebabkan penggandaan formulir, dan mengakibatkan anggaran membengkak.

Maka, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014, KPU Kota Blitar segera melaporkan hal ini agar lekas ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan Pusat. Dengan permasalahan seperti itu, KPU Kota Blitar berusaha semaksimal mungkin agar proses Pemilu berjalan dengan lancar, sehingga bisa mendapat pemimpin yang bertanggung-jawab dan sesuai dengan harapan masyarakat.

## **PERJALANAN PILKADA TAHUN 2015**

Dalam penyelenggaraan Pemilu periode ketiga, Kota Blitar terus berupaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tantangan yang ada dalam Pilkada 2015 juga terjadi pada Pilkada 2010. Konsistensi KPU Kota Blitar periode ini tercermin pada ketepatan dalam persiapan, pelaksanaan hingga penyelesaian, disesuaikan dengan jadwal yang

telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 01/kpts/KPU-Kota-014.329960/Tahun 2015, tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2015. Tahun itu menjadi momentum penting untuk wajah Kota Blitar tahun 2016-2021.

Setiap tahapan Pilkada Tahun 2015 dilakukan tim komisioner dengan teliti dan hati-hati. Demi terciptanya kelancaran dalam proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, KPU Kota Blitar mempersiapkannya dengan berbagai langkah kegiatan. Pertama, menyusun rancangan program dan anggaran. Langkah pertama ini memakan waktu hingga 67 hari, dimulai sejak 23 Februari 2015 hingga 30 April 2015. Waktu yang lama tak cukup untuk membongkar peraturan KPU tentang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2015, karena masih terjadi *miskonsepsi* dalam pengaplikasiannya.

Hal ini terjadi akibat adanya multitafsir dalam memaknai produk-produk hukum dalam aturan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Sehingga, perlu dibentuk forum diskusi untuk membahas produk-produk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Langkah pertama ini tak hanya membongkar produk-produk hukum, tetapi juga menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Ada tiga nominal yang diajukan KPU Kota Blitar kepada Pemerintah Kota Blitar, yakni:

**Tabel Pengajuan Anggaran**

<b>Pengajuan</b>	<b>Nominal</b>
I	Rp 8.100.000.000
II	Rp 7.400.000.000
III	Rp 6.500.000.000

*Sumber Data: Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2015*

Dari ketiga pengajuan tersebut, pengajuan ketiga yang disetujui Pemerintah Kota Blitar. Langkah intensif KPU Kota Blitar selanjutnya, adalah melakukan koordinasi Anggaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar 2015 dengan Bakesbangpol Kota Blitar. Lalu, melaksanakan koordinasi dengan Kabid Anggaran BPKAD Kota Blitar. Serta, melakukan koordinasi dengan KPU RI tentang peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar 2015.

Pergulatan dalam mendapatkan persetujuan besaran anggaran yang telah dirancang masih berlanjut. Proses selanjutnya ialah komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Komisi 1. Serta, melakukan konsultasi kepada SKPD maupun KPU Provinsi Jawa Timur. Akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil manis. Pada tanggal 17 April 2015 dilaksanakan penandatanganan akta hibah sebesar 6,5 milyar untuk satu putaran Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar 2015. Mekanisme dan sistem pencairan anggaran ini dibagi menjadi III Tahap Pencairan dengan pertimbangan

kebutuhan yang diperlukan pada setiap tahapnya.

Kedua, melakukan sosialisasi/penyuluhan dan bimbingan teknis tentang tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2015. KPU sering dijadikan kambing hitam atas rendahnya partisipasi dalam pemilu. Sebab, partisipasi pemilu mempengaruhi tingkat legitimasi hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, sosialisasi digencarkan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media cetak atau elektronik. Tak hanya itu; mug, jam dinding, kaos, korek api, dan stiker disulap menjadi barang sosialisasi.

Selain sosialisasi, KPU Kota Blitar juga mengadakan bimbingan teknis untuk PPK dan PPS pada 23 dan 26 Nopember 2015 di Rumah Makan Bu Mamik. Proses ini dimulai sejak 16 April sampai dengan 8 Desember 2015.

Ketiga, membentuk tim Ad Hoc. Tim Ad Hoc ini terdiri dari PPK, PPS, PPDP, dan KPPS. Perekrutan PPK berlangsung dalam dua tahap, yakni tertulis dan lisan. Sebelum memasuki tes tulis, setiap pendaftar harus melalui proses administrasi. Bagi mereka yang lolos di penelitian berkas administrasi, berhak mengikuti tes tulis. Tes tulis berlangsung pada 8 Mei 2015 di KPU Kota Blitar yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Blitar dan dihadiri anggotanya. Tes tulis diserahkan langsung oleh Ketua KPU Kota Blitar kepada Panitia Seleksi.

Hasil tes tulis diumumkan pada tanggal 10 Mei 2015. Sebanyak 30 orang dinyatakan lolos dari 62 orang pendaftar. Mereka masih harus melakukan tahap terakhir yakni wawancara. Hasil akhir hanya meloloskan 9 orang, yang diumumkan pada tanggal 15 Mei 2015. Tiga hari setelah pengumuman, pelantikan PPK digelar di Balai Kusumo Wicitro Kota Blitar. Pada langkah ini tak hanya membentuk

tim Ad Hoc, tetapi juga Pemantau Pemilih. Ada dua lembaga pemantau pemilih antara lain Klinik Konsultasi Bisnis Mandiri (KKB Mandiri) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.

Keempat, pemutakhiran data dan daftar pemilih. Proses ini diawali dengan penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah ke KPU Kota Blitar. DP4 inilah yang menjadi dasar pemutakhiran menjadi DPS. Pemutakhiran ini dilakukan oleh KPU Kota Blitar. Proses DPS menjadi DPT harus melalui berbagai tahapan, mulai dari penyampaian DPS dari KPU ke PPK, pengesahan DPS oleh PPS, pengesahan dan pengumuman DPS oleh PPK, perbaikan DPS berdasarkan masukan masyarakat, pengesahan DPT di PPS, rekapitulasi dan pengesahan jumlah DPT di PPK, dan pelaporan DPT ke KPU Provinsi Jawa Timur dan Pusat. DPT diserahkan kepada PPS, KPPS, Panwaslu dan Saksi ketika penyampaian Kartu Pemilih.

## **Launching Pilkada**

Semangat para penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar mewarnai Launching Pilkada pada tanggal 7 Juni 2015. Launching Pilkada ini dilaksanakan di halaman KPU Kota Blitar yang dihiasi dengan maskot Kota Blitar yakni Ikan Koi dengan senyum lebar. Istilah sambil menyelam minum air pantas disematkan pada Launching Pilkada, karena kegiatan ini dilengkapi dengan jalan sehat yang bertujuan sosialisasi. Kegiatan ini diikuti oleh KPU, PPK, PPS, PARPOL, FORPIMDA, PANWASLIH, KPU Kabupaten/Kota sekitar, KPU Provinsi, Kepala SKPD se-Kota Blitar, dan masyarakat umum.

## **Sigap Tanggap**

KPU Kota Blitar sigap tanggap dalam mengatasi surat suara yang rusak. Pada proses sortir surat suara, KPU Kota Blitar melibatkan 30 orang tenaga lepas untuk menemukan 111.788 lembar surat suara yang rusak. Jumlah yang tak sedikit ini akan berpengaruh pada proses pemungutan suara. Demi menghindari terhambatnya proses pemungutan suara, KPU Kota Blitar secara cepat meminta ganti kepada penyedia jasa percetakan. Lantas, surat suara yang rusak tersebut dibumihanguskan.

## **Distribusi Kelengkapan Pemilu**

Distribusi kelengkapan pemungutan suara ke PPK dan PPS dilaksanakan pada H-1 pelaksanaan pemungutan suara. Demi keamanan, alat kelengkapan pun ditaruh di PPS sebelum menuju ke TPS. Hal ini mengingat bahwa jumlah kelurahan dan TPS yang ada di Kota Blitar tidak begitu banyak. Wilayahnya pun tidak begitu luas. Pendistribusiannya ini berjalan dengan lancar tanpa kendala.

## **Kampanye Damai**

Pelaksanaan kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2015 berdasar pada peraturan perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Jadwal waktu kampanye ditetapkan KPU Provinsi pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015. Pada 5 September 2015 dilaksanakanlah kampanye damai. Pendukung masing-masing pasangan calon beserta pendukungnya melaksanakan *Long March* atau konvoi mengelilingi Kota Blitar. Selain kampanye damai, kampanye Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun



2015 dilakukan dengan pertemuan terbatas, dialog, pemasangan alat peraga di tempat umum, penyiaran melalui radio dan televisi, rapat umum, dan debat antar paslon.

### **Kontes Puncak**

Tiba saatnya hari pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar tahun 2015. Ketegangan di setiap kubu tak bisa dipungkiri. Kontes puncak ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai dari pukul 08.00 sampai 13.00 WIB. Pelaksanaannya berlangsung secara aman, damai, tertib, dan kondusif.

Dua pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar mengikuti kontes puncak yang pemenangnya nanti akan menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2016-2021. KPUD Kota Blitar menetapkan pada 24 Agustus 2015 beserta nomor urutnya. Paslon nomor urut satu secara independen dan nomor urut dua diusung oleh partai. Berikut nama sekaligus nomor urut pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Blitar.

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
1	Mochsin-Dwi Sumardianto
2	Muh. Samanhudi Anwar-Drs. H. Santoso, M.Pd

Aktualisasi asas adil pada kontes puncak ini dapat dilihat dari perlakuan yang adil pada setiap pemilih. Seperti halnya pemilih yang berkebutuhan khusus mendapat fasilitas kemudahan. Pemilih berkebutuhan khusus diprioritaskan untuk memilih terlebih dahulu.

Selain itu, bagi pemilih berkebutuhan khusus dapat dibantu oleh KPPS. Apabila pemilih berkebutuhan khusus sudah membawa pendamping, maka yang diberi tanggung jawab adalah pendamping. Dengan catatan ada *form* tersendiri yang harus diisi oleh pendampingnya. Bagi penyandang tunanetra, mereka mendapat alat bantu khusus. Jadi tidak mengurangi dari substansi atau yang menjadi hak konstitusi warga tersebut.

Kontes puncak ini dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut dua yakni Muh. Samanhudi Anwar yang berpasangan dengan Santoso. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasinya dengan perolehan sebanyak 67.934 suara. Sedangkan lawannya, Mochsin dan Dwi Sumardianto hanya memperoleh 5.683 suara. Begitu jelas kemenangan yang diperoleh paslon nomor urut dua itu.

Pesta demokrasi yang tak lepas dari berbagai hambatan ini akhirnya tertuntaskan. Aula Rumah Makan Bu Mamik di Jalan Kalimantan Kota Bitar menjadi saksi sejarah baru pemerintahan Kota Blitar. Penetapan pasangan calon terpilih dilaksanakan di tempat tersebut pada tanggal 22 Desember 2015. Acara ini diawali dengan pembacaan Berita Acara No. 80/BA/XII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2015 periode 2016-2021.

Setelah Berita Acara dibacakan, maka dilanjutkan dengan penandatanganannya, begitu pula dengan Surat Keputusan KPU Kota Blitar Nomor 42/Kpts/KPU.Kota-014.329960/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2015. Pasangan calon terpilih yang ditetapkan adalah Muh Samanhudi Anwar dan Drs. Santoso. Namun sayangnya acara ini hanya dihadiri calon Wakil Wali Kota Blitar, karena calon Wali Kota yang terpilih berhalangan hadir, sebab ada acara keluarga di luar

kota yang tidak dapat ditinggalkan.

## **PILGUB JATIM 2018, RIVAL YANG KEMBALI BERTEMU**

Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur tahun 2018 merupakan pemilihan paling menegangkan bagi kedua kandidat yang kembali dipertemukan dalam pesta demokrasi 27 Juni 2018. Pertarungan Pilgub Jatim 2018 kembali mempertemukan rival lama, yaitu, Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf.

Khofifah bukan lagi orang baru di dunia perpolitikan Jawa Timur. Sebelumnya, ia pernah mencalonkan diri sebagai gubernur sebanyak dua kali, yaitu tahun 2008 dan 2013. Sedangkan Saifullah Yusuf, atau yang akrab di sapa Gus Ipul, pernah menjadi wakil gubernur, dan berhasil memenangkan suara terbanyak, termasuk mengalahkan Khofifah. Ia mendampingi Soekarwo sebagai Wakil Gubernur selama dua periode yaitu sejak 2008 sampai tahun 2018.

Sengitnya persaingan pemilihan gubernur, karena rival lama yang kembali bertemu dengan pasangan yang berbeda. Meski akhirnya Khofifah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018, setelah tiga kali mencalonkan diri menjadi gubernur namun gagal.

Pasangan Khofifah-Emil menduduki nomor urut 1 dengan visinya yang bertajuk *Nawa Bhakti Satya*, sementara Saifullah-Puti berada di nomor urut 2 dengan 9 program unggulan mulai dari *Dik Dilan (Pendidikan Digratiskan Berkelanjutan)* hingga *Seribu Dewi (Seribu Desa Wisata)*.

Sedangkan untuk anggota PPS di Kota Blitar dalam Pemilihan

Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di tiap kelurahan ada tiga orang. Dan jumlah pemilih pada Pilgub Jatim 2018; di Kecamatan Kepanjen Kidul sekitar 32,537, Sananwetan 40,799, di Sukorejo 37,747 orang.

Pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, masyarakat Kota Blitar cukup antusias menggunakan hak pilihnya untuk memperoleh pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab. Dengan total jumlah suara sah di Kecamatan Kepanjen Kidul sekitar 22,537, Kecamatan Sananwetan 28,837, dan Kecamatan Sukorejo 26,381. Sedangkan untuk jumlah surat suara tidak sah Kecamatan Kepanjen Kidul 749, Kecamatan Sananwetan 985, Kecamatan Sukorejo 848.

Sedangkan untuk rekapitulasi perolehan suara pasangan calon Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 di Kota Blitar sebagai berikut;

No	Pasangan Calon Pilgub Jatim 2018	Kepanjen Kidul	Sananwetan	Sukorejo
1.	Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak	8,808	11,455	10,776
2.	Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	13,729	17,382	15,605

Meskipun di Kota Blitar pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2018, tetapi dilansir dari detik.com, pasangan Khofifah-Emil memenangkan suara terbanyak di 27 kabupaten/kota di Jawa Timur, sisanya 11 kabupaten/kota mengalami kekalahan.

Hasil akhir rekapitulasi suara di Jawa Timur menyatakan, pasangan calon Khofifah-Emil memperoleh 10.465.218 suara (53,55%), sedangkan pasangan calon Saifullah Yusuf-Puti memperoleh 9.076.014 suara (46,45%). Hasil akhir kedua pasangan tersebut terpaut tipis, selisih 7,11%. Dengan hasil akhir itu, maka pasangan Khofifah Indah Parawansa-Emil Dardak dilantik menjadi Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024

## **HARAPAN KPU**

“Demokrasi bukan barang mati, demokrasi itu barang hidup, karena barang hidup maka harus di pelihara,” kata Herwidi, bagaimana seharusnya merawat demokrasi dan diperlakukan dengan baik, agar mendapat pemimpin yang benar-benar sesuai harapan masyarakat bisa terwujud.

Dia juga menambahkan, cara merawat demokrasi dengan dua hal, yaitu; (1) membangun komunikasi politik yang bagus, di semua pihak bangunan demokrasi itu sendiri, dan harus disertai membangun pola yang konstruktif. (2) Komitmen bangunan demokrasi juga harus dilaksanakan dengan benar. Karena niat saja tidak cukup, kalau semua dijalankan dengan komitmen dan komunikasi dengan cukup, maka semua akan sesuai dan selaras.

Dengan demikian, ada sebuah harapan bagi penyelenggara agar setiap hajat besar negara bisa terlaksana dengan baik, terutama dukungan dari berbagai pihak juga sangat menentukan hasilnya. Menjadi penyelenggara yang kredibel, bertanggungjawab dan sesuai dengan asas KPU harus selalu diterapkan, agar tugas

dan tanggung jawab yang sangat menuntut integritas dan netralitas sebagai penyelenggara bisa terus dipegang. Tetapi juga harus tetap memegang teguh regulasi dan ketentuan yang telah ditetapkan.

\*\*\*

Blitar, Maret 2021

## Foto Dokumentasi



*Foto Dokumentasi Pilwali 2015*



*Foto Dokumentasi Pilwali 2015*



*Foto Dokumentasi Pilwali 2015*



*Foto Dokumentasi Pilwali 2015*



# PROFIL KOMISIONER

## PROFIL ANGGOTA KPU KOTA BLITAR

### PERIODE 2014-2019

**Ummu Chairu Wardani**, SE,MM lahir di Blitar, 17 Pebruari 1972. Beliau bertempat tinggal di Jalan Ir. Soekarno No 32, RT 03 RW 02 , Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, Jawa Timur. Saat ini beliau adalah Direktur PT. Mahakarya Lintas Buana (Lintas7news.com).

Sebelum berada di posisi itu, banyak lika-liku yang dilalui. Beliau mengawali perjalanan sekolahnya di SDN Sentul I Blitar dan dinyatakan lulus pada tahun 1984. Beliau juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1983-1987 beliau menjadi anggota Pelajar Islam Indonesia (PII) Kota Blitar. Kemudian pada tahun 1987, beliau berhasil menuntaskan masa putih biru di SMPN 1 Blitar. Dan pada tahun 1990 lulus dari SMAN I Blitar.

Beralih dari masa remaja menuju dewasa. Belajar pun masih terus berlanjut. Beliau melanjutkan studi dengan mengambil jurusan Administrasi Niaga di Politeknik Universitas Brawijaya, Malang. Kegiatan berorganisasi masih beliau teruskan. Di kampus berpartisipasi sebagai anggota Badan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Universitas Brawijaya Malang pada tahun 1994-1995. Kelulusannya tak jauh dari berakhirnya masa keanggotaan di Badan Perwakilan Mahasiswa

Politeknik Universitas Brawijaya yakni tahun 1996.

Kemudian beliau diberi amanah menjadi bagian sekretariat di PT Mugi Maxitherm Industries, Cikarang Bekasi, Jawa Barat pada 28 April-25 Juli 1997. Lalu, beralih profesi pada 1 Desember 2003-9 Januari 2004. Pada tahun itu beliau menjadi Staff Riset Mayangkara Group, PT Radio Suara Tulungagung Jaya FM (Radio Jossh), Tulungagung, Jawa Timur.

Perjalanannya menuntut ilmu juga masih belum usai. Pada tahun 2008, beliau dinyatakan lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Beliau masih giat berorganisasi dengan menjadi anggota Forum Lingkar Pena (FLP) Blitar pada tahun 2008-2011. Lalu, pada tahun 2009-2014, beliau menjadi Wakil Sekretaris Pengurus Pusat Majelis Pelestari Ajaran Bung Karno (PP MPA-BK).

Beliau berkesempatan menjadi anggota KPPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014. Nasib yang bagus, pada tahun 2014-2019 beliau menjadi Komisioner KPU Kota Blitar. Seusai menjabat sebagai komisioner, aktif di Pemuda Pancasila Kota Blitar sebagai Ketua Bidang Peranan Wanita 2019-2023. Beliau juga menjadi bagian dari Sahabat Yatim Dhuafa Blitar sebagai penasehat pada tahun 2019 hingga sekarang. Walau aktif di organisasi dan pekerjaannya, beliau tetap meluangkan waktu untuk belajar. Hingga kembali mendapatkan gelar baru pada tahun 2020, di Program Studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Malang.

Beliau juga aktif di dunia kepenulisan. Berikut hasil karya tulisnya dengan judul; *Pentingnya Peningkatan Integritas Penyelenggara Pemilu* (Agustus 2015), *Perempuan Sebagai Agen Sosialisasi: Dalam*

*Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat* (November 2015), *Menggugat Peran Parpol dalam Pendidikan Politik* (Juni 2016), dan *Peran Strategis Pemantau Pemilu sebagai Stakeholder* (Oktober 2016). Judul-judul karya tulis tersebut diterbitkan di *Jurnal Ide – KPU Propinsi Jawa Timur*. Tak hanya itu, tulisan beliau juga pernah dimuat di *Radar Blitar*, *Jawa Pos Group*, Jum'at 29 Maret 2019 dengan judul *Hoaks Sara Pemilu dan Ancaman Disintegrasi Bangsa*.

**Setyo Budiono, S.E**, lahir di Magetan 19 September 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar di SDN II tahun 1981. Berlanjut ke SMP Negeri I Kawedanan, dan lulus tahun 1984. Sebuah SMA Negeri menjadi tempat menuntut ilmu selanjutnya, dan lulus tahun 1987. Kemudian, beliau masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, dan lulus di tahun 1993.

Selama berkuliah, beliau aktif dalam sejumlah organisasi. Diantaranya, sebagai Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah tahun 1989, dan Anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Pada tahun 1997, beliau menjadi pengurus HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia). Beliau sempat pula menjadi Sekretaris Organda Blitar.

Menyoal riwayat pekerjaan, pria yang beralamat di Perumahan Puri Kenari Asri, Blok C-15, Plosekerep ini pernah menjadi karyawan kontrak di Bank BNI 46 Cabang Palangkaraya pada 1996-1997. Setelah itu, di tahun 1998-2000, beliau sempat memanageri sebuah perusahaan bernama PT. Hasnur Jaya Utama Palangkaraya. Lalu, pada 2001 menjadi Direktur CV. Putra Nusantara Blitar. Serta menjadi

Anggota KPU Kota Blitar periode 2009-2014. Setyo Budiono wafat pada 20 September 2020 lalu.

**Herwidi Subagusito.** Sebelum aktif di KPU Kota Blitar beliau bekerja di suatu Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat dan sudah menekuni selama 17 tahun. Menjadi konsultan di salah satu lembaga yang bekerjasama yang berpusat Roma Italia, juga sebagai koordinator di beberapa program yang tidak jauh dari pemberdayaan masyarakat.

**Sigit Pramusanto,** laki-laki kelahiran Blitar pada tanggal 16 November tahun 1963. Mulai aktif menjadi ASN tahun 1987. Sebelum menjadi sekretaris di KPU Kota Blitar, beliau pernah bekerja di Kecamatan Kepanjen Kidul mulai 2007-2011, kemudian dimutasi ke Dinas Kesehatan 2011-2014. Setelah itu dimutasi lagi ke KPU Kota Blitar tahun 2014-2017. Selain menjadi sekretaris di KPU, beliau juga merangkap sebagai Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat.

**Mashudi, S.H.I.** lahir di Blitar, 15 Juli 1978. Bersekolah di SD Negeri Bendogerit II dan lulus tahun 1992. Berlanjut ke SMP Negeri 6 Blitar, dan lulus tahun 1995. MAN Tlogo menjadi tempat menimba ilmu berikutnya, dan lulus di tahun 1997. Kemudian, beliau berkuliah di STAIN Tulungagung, dan lulus tahun 2004.

Ada sejumlah organisasi yang pernah beliau ikuti. Di MAN Tlogo, beliau sempat menjadi ketua PMR tahun 1996-1997. Kemudian, pada tahun 2001-2002, menjadi Dansat Menwa Mahasurya STAIN

Tulungagung. Kemudian, pada tahun 2002-2003, menjadi Divisi Advokasi PC PMI Tulungagung. Pada tahun 2005-2007 berpartisipasi di Lapekdam NU Cabang Tulungagung. Selain itu, di tahun 2003-2008 menjadi Sekjen di Aliansi Petani Indonesia (API) Jawa Timur. Di tahun 2010, beliau berperan juga dalam PC Ansor Kota Blitar.

Sebelum berada di Divisi Hukum KPU Kota Blitar tahun 2009-2014, beliau sempat bekerja di berbagai bidang. Beliau sempat menjual souvenir di Makam Bung Karno selama empat tahun, di tahun 1990-1994. Sempat pula menjadi penarik becak di tahun 1995-2002. Pernah berpartisipasi pula dalam Asosiasi Pengacara Indonesia (APSI) pada 2003-2006. Selanjutnya, di 2004-2008 menjadi konsultan pendamping untuk Program Pengentasan Kemiskinan. Sempat pula menjadi fasilitator tim Ranperda Kota Blitar. Tahun 2007-2008.

**Edi Winarno, S.Sos.** lahir di Tulungagung, 25 Januari 1970. Riwayat pekerjaannya berawal dari tahun 1991, dengan menjadi ASN di Pemerintah Kota Blitar. Pada tahun 1993 sebagai staf di Kecamatan Sukorejo, lalu Sekretaris Camat di Kelurahan Sukorejo, Sekretaris Camat di Kecamatan Kepanjen Kidul, KASUBAG Kesekretariatan Daerah, KABID DPKAD, Camat, dan Sekretaris KPU Kota Blitar. Beliau merupakan sekretaris kedua di periode 2014 -2019.



---

# **Periode 2019-2024**

Disusun oleh Candra Setyawan  
dan Rosy Nursita Anggraini



Dua Dekade Kota Blitar Memilih



## **PEMILU SERENTAK PERDANA, PAKET LENGKAP PERTAMA**

Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019 merupakan Pemilu Serentak perdana yang diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Kota Blitar. Dinamakan Pemilu Serentak, karena Pemilu dilakukan dalam waktu yang bersamaan di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, para pemilih juga disodorkan kartu pemilih lain. Kartu tersebut digunakan untuk memilih DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD. Semua itu dilakukan dalam satu waktu dan di tempat yang sama (TPS masing-masing pemilih).

Maka dari itu, untuk menyukseskan terlaksananya Pemilu Serentak tahun 2019 diperlukan proses yang cukup panjang. Bahkan proses tersebut dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2017 yaitu berupa tahapan pendaftaran keanggotaan Partai Politik (Parpol) dan selesai dengan ditetapkannya Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak, penetapan tersebut dilakukan pada tanggal 21 Mei 2019.

### **Ada Proses yang ‘Terpaksa’ Dihentikan**

Serangkaian proses pemilu tahun 2017 diawali dari proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kemudian dari serangkaian tahapan mulai dari pendaftaran hingga verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan menghasilkan sebuah pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 768/PL.01.1-KPU/03/KPU/XII/2017, tentang Hasil Penelitian Administrasi dan Keabsahan Dokumen Persyaratan 14 (Empat belas) Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.



Dari hasil Penelitian Administrasi Data Keanggotaan Partai Politik Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

a. Partai Politik yang dinyatakan memenuhi syarat pada hasil penelitian administrasi dan keabsahan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Partai Amanat Nasional (PAN)
2. Partai Demokrat (PD)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
6. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
9. Partai Nasdem (NasDem)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
12. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

b. Partai Politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada hasil penelitian administrasi dan keabsahan dokumen persyaratan adalah:

1. Partai Berkarya (Berkarya)
2. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Setelah kegiatan tersebut selesai, pembentukan badan Adhoc yang terdiri dari PPK dan PPS Pemilu Serentak 2019 dilakukan. Sedangkan untuk penetapan petugas ketertiban TPS dilakukan pada tanggal 4 April 2017 yang dilakukan setelah KPU mendapatkan jawaban resmi dari Satpol PP terkait permintaan nama-nama petugas ketertiban TPS untuk tiap-tiap kelurahan di Kota Blitar.

Proses selanjutnya adalah Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Pemilu Serentak Tahun 2019 ada beberapa hal yang unik.

Sebelum membahas hal unik di proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Pemilu Serentak Tahun 2019, perlu diketahui pula proses detail pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih di Pemilu Serentak Tahun 2019.

Prosesnya sebagai berikut: a) Penerimaan Data Kependudukan, b) Penerimaan DP4 dan Penetapan DPHP yang dilakukan, c) Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS, d) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Dan Penetapan DPSHP, e) Penyusunan Data Pemilih. Pada proses DPTH Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, proses penetapan daftar pemilih adalah proses terpanjang penetapan daftar pemilih dalam sejarah Pemilu yang pernah dilakukan di Indonesia, khususnya di Kota Blitar. Bahkan,

proses yang dilakukan hingga sampai pada perbaikan DPTHP-3.

Hal tersebut dilatar belakangi karena ada masukan dari BAWASLU serta permintaan dari salah satu diantara kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Tujuannya untuk melakukan respon lebih awal dan meminimalisir gugatan di akhir penyelenggaraan proses Pemilu Serentak Tahun 2019. Jadi proses penetapannya lumayan panjang, bahkan bila dibiarkan bisa jadi tak kunjung usai. Maka ketika DPTHP-3 selesai dilakukan maka proses DPTHP-4 ditiadakan atau dihentikan sampai DPTHP-3 saja. Inilah salah satu hal unik yang terjadi pada proses penetapan daftar pemilih Pemilu Serentak Tahun 2019.

Mulanya, dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Blitar pada pemilu tahun 2019 sebanyak 111.911 orang, yang terdiri dari 54.558 laki-laki dan 57.353 perempuan. Dengan jumlah TPS yang ada di Kota Blitar sebanyak 477 TPS.

Kemudian, diadakan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pemutakhiran (DPTHP). Dengan jumlah DPT hasil perbaikan sebanyak 111.903 yang terdiri dari 54.556 laki-laki dan 57.347 perempuan dan jumlah TPS yang ada di Kota Blitar tetap. Perlu dicermati dalam penyempurnaan DPT ini antara lain adanya element kegandaan serta memperbaiki elemen data pemilih seperti NIK, NKK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat.

Dilanjutkan dengan rekapitulasi dan penyempurnaan DPTHP-2. Ketika diadakan rekapitulasi DPTHP-2 jumlah DPT sebanyak 114.443 orang yang terdiri dari 55.702 laki-laki dan 58.741 perempuan. Sedangkan jumlah TPS yang ada masih tetap. Namun, ketika diadakan penyempurnaan DPTHP-2 jumlah DPT malah menurun yaitu tinggal 113.554 orang yang terdiri dari 55.462 laki-laki

dan 58.082 perempuan. Dengan jumlah TPS yang ada masih saja tetap.

Belum puas dengan adanya DPTHP-2, diadakan DPTHP-3 yang terdiri dari rekapitulasi dan perbaikan. Ketika perbaikan DPTHP-3 jumlah DPT berkurang, menjadi 113.692 orang yang terdiri dari 55.532 laki-laki dan 58.160 perempuan sedangkan jumlah TPS masih tetap seperti tahap sebelumnya, DPTHP-2. Tetapi ketika dilakukan rekapitulasi DPTHP-3, jumlah DPT menurun lagi menjadi 113.544 orang yang terdiri dari 55.462 laki-laki dan 58.082 perempuan dan jumlah TPS sebanyak 477.

Setelah dilakukan rekapitulasi DPTHP-3 sudah tidak dilakukan lagi DPTHP yang lebih lanjut. Dan jumlah yang terakhirlah yang akan menjadi data input KPU dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Untuk melindungi hak pilih masyarakat pada acara pesta demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2017, pihak penyelenggara pemilu, KPU Kota Blitar, turut melakukan program GMHP (Gerakan Melindungi Hak Pilih)

Tujuan dari diluncurkannya program GMHP adalah untuk memastikan bahwa hak pilih warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, telah benar-benar terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu 2019, sekaligus sebagai upaya penyempurnaan daftar pemilih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan GMHP dilakukan pada tanggal 1 hingga tanggal 28 Oktober 2018.

Kemudian proses dilanjutkan dengan pencalonan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Blitar.

## **Kampanye Paket Komplit**

Kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu di tahun ini dapat dikatakan 'Kampanye Paket Komplit.' Ketika melakukan kampanye, bukan hanya pihak yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saja, melainkan juga melibatkan Bawaslu, Polres, dan OPD terkait.

Kampanye dalam Pemilu Serentak Tahun 2019, bisa disebut unik dan berbeda dari Pemilu sebelumnya. Perbedaannya sangat nampak pada strategi kampanye yang dilakukan oleh para calon DPR, DPD dan DPRD serta pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pada kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019, calon anggota DPRD tingkat kota merupakan ujung tombak kampanye yang dapat menggaet suara sebanyak-banyaknya, sehingga suara tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara DPRD tingkat provinsi, pusat bahkan pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi, ketika melakukan kampanye, para calon anggota DPRD tingkat kota sudah membawa paket komplit siapa saja yang disuarakan ketika melakukan kampanye di hadapan masyarakat. Sebagai contoh: si A dari partai X adalah salah seorang calon DPRD Kota Blitar, si B dari partai X adalah salah satu calon DPRD Provinsi Jawa Timur, dan si C dari merupakan Capres dan Cawapres dari koalisi partai X maka ketika kampanye di Dapil si A menyodorkan nama si B dan C kepada para calon pemilih atau masyarakat yang ada di Dapilnya. Benar- benar 'Paket Komplit' bukan?

## **Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Blitar salah satunya melalui Program Relawan Demokrasi (Relasi). Program relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Untuk menjadi bisa tergabung dalam relawan demokrasi KPU Kota Blitar ada beberapa proses yang dilalui di antaranya harus lolos dari serangkaian seleksi yang dilakukan oleh tim penyeleksi relawan demokrasi mulai dari seleksi administrasi hingga pada seleksi model FDG.

Baru bagi mereka yang lolos menjadi relawan demokrasi KPU Kota Blitar diperbolehkan melakukan Kegiatan Relawan Demokrasi (RELASI). Kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 17 Januari hingga 14 April 2019. Tempat disesuaikan dengan hasil pembagian kelompok.

## **Rekapitulasi dan Penetapan yang Memakan Korban**

Perlu diingat lagi bahwa Pemilu Serentak Tahun 2019 ini merupakan serangkaian proses pemilihan DPRD baik Kota, Provinsi, dan Pusat, DPD, dan Presiden serta Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan. Maka dalam melakukan rekapitulasi tidak dapat dipungkiri bila para KPPS dihadapkan dengan banyak laporan yang harus diselesaikan hari itu juga.

Jadi, wajar bila ketika melakukan rekapitulasi ada beberapa KPPS yang mengalami kelelahan dikarenakan harus mengisi data berlembar-lembar. Pada saat diselenggarakan rekapitulasi pada Pemilu Serentak Tahun 2019 ada tujuh KPPS yang mengalami kelelahan hingga harus menjalani opname di rumah sakit.

Sebenarnya, untuk kesehatan para KPPS sudah memiliki anggaran tersendiri yang diberikan langsung pemerintah pusat dengan syarat lolos penilaian administrasi. Namun, penilaian administrasi yang dilakukan pusat kurang obyektif. Hal tersebutlah yang menjadikan tujuh orang KPPS tersebut tidak mendapatkan bantuan kesehatan. Padahal, ketika mendaftarkan diri sebagai KPPS, mereka dalam keadaan sehat dengan dibuktikan melampirkan surat sehat.

Maka dari kejadian yang memakan korban ini semoga kedepannya nasib para KPPS ketika menjalankan tugas dalam bisa lebih diperhatikan lagi.

## **Pemenang Pemilu Serentak Tahun 2019**

Setelah proses rekapitulasi dan penetapan selesai, kegiatan selanjutnya adalah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. Dari penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 maka didapatkan hasil rekapitulasinya.

Berikut adalah deretan partai politik yang mendapatkan suara dalam ajang pesta demokrasi, Pemilu Serentak Tahun 2019. Partai politik terbanyak mendapatkan kursi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapatkan 10 kursi dengan rincian 4 kursi dari Dapil 1, 3 kursi dari Dapil 2 dan 3.

Sedangkan untuk pemilihan DPRD Kota Blitar, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>NAMA ANGGOTA DPRD</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>
1.	Sudarwati	PDIP
2.	dr. Syahrul Alim	PDIP
3.	Yudi Meira, S.T,	PDIP
4.	Galih Hendra Asmara	PDIP
5.	Johan Marihot	PDIP
6.	Said Nofandi, S.T.	PDIP
7.	Bayu Setyo Kuncoro	PDIP
8.	Aris Dedi Arman	PDIP
9.	Dedik Hendarwanto, S.T.	PDIP
10.	Nurall	PDIP
11.	Purwanto	Golkar
12.	Mohamad Hardita Magdi, S.H.	Golkar
13.	Yasin Hermanto, S.E	PKB
14.	Adi Santoso, S.P.	PKB
15.	Totok Sugiarto	PKB
16.	Ely Idayah Vitnawati	PKB
17.	Agus Zunaidi, S.E.	PPP
18.	H.M. Nuhan Eko Wahyudi, S.H.	PPP
19.	Guntur Pamungkas, Sm	PPP
20.	Drs. Slamet	Partai Gerakan Indonesia Raya
21.	Yohan Tri Waluyo Wahyudi, S.H.	Partai Gerakan Indonesia Raya
22.	Ito Tubagus Aditya, S.E.	Demokrat
23.	Rido Handoko, A.Md., S.Pd.	Demokrat
24.	dr. Laily Kurniawati	PKS
25.	Yossy Yuliardi	HANURA



Sedangkan untuk perolehan suara sah Pemilu Serentak Tahun 2019 dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, perolehan suara terbanyak dimenangkan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dengan perolehan suara sebanyak 77.7%. Sedangkan dari lawannya yakni calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 mendapatkan suara sebanyak 22.3%

Perlu diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada Pemilihan Serentak 2019 merupakan partisipasi tertinggi sepanjang sejarah Pemilu di Kota Blitar. Hal tersebut dapat diketahui dari prosentase masyarakat yang hadir dibandingkan dengan masyarakat yang tidak hadir dalam memberikan partisipasinya di ajang pesta demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019.

Ketika melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masyarakat yang hadir sebanyak 83.75%, sedangkan yang tidak hadir hanya sebanyak 16.25%. Tingkat kehadiran masyarakat menurun tipis ketika melakukan pemilihan DPR RI dengan persentase kehadiran sebanyak 83.50% dan yang tidak hadir 16.50%.

Ketika melakukan pemilihan DPD RI, presentasi kehadiran masyarakat sebesar 83.67% dan sebanyak 16.33% tidak hadir. Saat melakukan pemilihan DPRD Provinsi presentase kehadiran masyarakat sebanyak 83.49% dan yang tidak hadir sebanyak 16.51%.

Penurunan tipis juga terjadi ketika masyarakat melakukan pemilihan DPRD Kota Blitar Dapil 1, jumlah persentase kehadiran sebanyak 83.13% dan sebanyak 16.87% tidak hadir. Presentase kehadiran masyarakat terendah adalah di Dapil 2 ketika melakukan pemilihan DPRD Kota Blitar dengan persentase kehadiran sebanyak 82.58% dan ketidak hadir sebesar 17.42%. Namun sebaliknya, di

Dapil 3 justru persentase kehadiran masyarakat untuk melakukan pemilihan DPRD Kota paling tinggi dan lebih tinggi dibandingkan ketika masyarakat melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, maupun DPRD Provinsi. Presentase kehadiran masyarakat tersebut adalah sebesar 83.99% dan ketidakhadirannya hanya sebesar 16.01%.

Selain itu, Pemilihan Serentak tahun 2019 di Kota Blitar selesai dengan tidak ada gugatan. Adapun banyaknya warta yang mengabarkan terkait hoaks yang berlangsung ketika sepanjang proses Pemilihan Serentak tahun 2019 yang berlangsung di Indonesia, hal tersebut tidak terlalu memberikan dampak yang negatif bagi pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2019 di Kota Blitar.

Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena Kota Blitar merupakan kota kecil, maka penanganan kasus tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Sehingga adanya informasi hoaks yang beredar di masyarakat Kota Blitar kemungkinan kecil sepanjang proses Pemilihan Serentak tahun 2019 berlangsung. \*\*\*

## **ASYIKNYA PESTA DEMOKRASI DI TENGAH PANDEMI MENJANGKIT NEGERI**

Tatkala negeri terjangkit pandemi, betapa asyiknya penyelenggaraan pesta demokrasi Tahun 2020. Tanpa saling berpegangan tangan dengan erat, tak mungkin terselenggara pesta dengan prestasi yang cukup memuaskan. Bahkan di tengah pandemi, KPU Kota Blitar sempat menyabet empat prestasi sekaligus dalam setahun. Ada juara pertama “Video Sosialisasi Tahapan Coklit Se-Jatim,” juara terbaik pertama “Program Sosialisasi Partisipasi

Masyarakat dan Pendidikan Pemilih Terinovatif se-Jatim,” juara terbaik kedua “Partisipasi Masyarakat Tertinggi se-Jatim,” dan juara terbaik ketiga “Pengelolaan Produk Hukum Se-Jatim.”

Pandemi bukanlah halangan untuk mengadakan pesta demokrasi di negeri ini, khususnya wilayah Kota Blitar. Meskipun sempat ada penundaan, hal tersebut menjadi kesulitan pertama setelah awal melakukan rencana kerja, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019. Dikarenakan adanya penundaan tersebut maka, tahapan sosialisasi dilakukan pada tanggal 1 November 2019 dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2020. Pada waktu penundaan, pihak KPU Kota Blitar hanya menunda tiga tahapan, yaitu: verifikasi faktual, pemutakhiran data, dan penundaan masa kerja Ad Hoc.

Di sisi lain, sosialisasi protokol kesehatan Covid-19, yang bersifat massal kolosal harus diubah. Sosialisasi kuantitasnya ditambah, namun masanya lebih sedikit, sedangkan prosesnya menjadi lebih panjang.

Konsep efektif dan efisien tetap harus diterapkan. Misalnya, satu divisi sehari bisa melakukan empat kegiatan. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak KPU Kota Blitar tidak terlarut dalam suasana pandemi.

Protokol kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas. Tapi dengan adanya Covid-19 lebih bisa dimobilisasi. Bahkan, partisipasi masyarakat meningkat. Selain itu, prosesnya pun lebih mudah, terlebih bagi para mahasiswa yang menuntut ilmu di luar kota, mereka pulang ke rumah masing-masing. Pemetaan usia juga menjadi faktor pendorong lancarnya sosialisasi Pemilu serentak di tengah masyarakat.

Pada tahun ini, KPU Kota Blitar mampu menyabet prestasi di atas partisipasi nasional. Untuk sosialisasi sendiri memakan anggaran 11% dari APBD yang totalnya mencapai 16 milyar. Bahkan, tingkat partisipasi di Kota Blitar tidak pernah turun di bawah 70%. Dan untuk target tahun ini adalah 80%, namun turun pada angka 78,8%. Sedangkan target nasional 77,8%. Namun, secara spesifik di Jawa Timur naik semua.

Meskipun dilakukan di tengah pandemi, Pilwali Tahun 2021 lebih baik dari yang tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan terselenggaranya pemilihan serentak yang dimulai sejak dilakukannya tahapan-tahapan secara kolektif antar komisioner.

Meskipun di bagian perencanaan anggaran dan tahapan sama-sama belajar dan masih baru. Tetapi sudah dilakukan sesuai divisi dan regulasi, serta selalu diadakan evaluasi. Misalnya, beberapa anggaran memerlukan revisi, ada kegiatan lupa dimasukkan, penyesuaian anggaran dengan masa pandemi, penyusunan produk hukum, dan lain sebagainya.

Sosialisasi yang dilakukan pada pemilihan serentak Tahun 2020 berjalan dengan lancar. Bahkan dari divisi Parmas mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Pertama, terbaik se-Jatim dalam bidang sosialisasi kreatif dan inovatif. Kedua, dalam bidang konten terbaik kedua se-Jatim.

Capaian Parmas tahun ini merupakan capaian tertinggi. Penyumbang atau yang memiliki andil besar dari pemutakhiran data menjadi kontribusi menyukseskan terlaksananya Pilwali tahun 2020. Bahkan, pelaksanaan coklit dilakukan dengan *door to door*, coklit tidak *on desk*. Divisi Hukum juga mendapat penghargaan penyelesaian rekap tercepat, tetapi pencapaian tersebut belum mendapat kabar

terakhir tentang ada atau tidaknya penghargaan tersebut.

Karena di Kota Blitar hanya ada tiga kecamatan, menjadikan tata kelola distribusi logistik lebih baik. Indikatornya ialah terdapat pada proses yang tepat jumlah, jenis, dan waktu. Sortir lipat, dulu dilakukan oleh pihak kedua dengan mempekerjakan orang luar yang tidak ada kaitannya dengan KPU. Sekarang yang mengerjakan adalah PPK dan PPS, sehingga pekerjaan menjadi lebih baik.

Pemungutan berjalan dengan lancar dan tidak ada kejadian khusus, meskipun di Kecamatan Kepanjen Lor terjadi kesalahpahaman kecil. Sistem baru soal rekap *realtime* hasil sudah muncul pada pukul empat sore. Semua berjalan dengan lancar. Menyiapkan beberapa evaluasi dengan para *stakeholder*, peserta Pilwali, beberapa *ad hoc*, diadakan FGD agar bisa segera diinput secara utuh terkait evaluasi. Serta ke depannya, menyiapkan Parmas untuk pemilihan selanjutnya.

Semua yang tersaji *apik* dalam Pilwali Tahun 2020 tidak terlepas dari serangkaian proses jatuh bangun yang tak instan. Perjalanan yang tidak mulus dan juga keberhasilan dalam menghadapi setiap halangan maupun rintangan.

Bermula dari pemberian penamaan Pemilu, pada tahun ini di Kota Blitar dinamakan Pemilihan Serentak untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Diberi nama Pemilihan Serentak karena dilaksanakan secara bersamaan (tidak hanya soal waktunya saja). Maka perlu dilihat kepala daerah dari kota/kabupaten/provinsi mana yang sudah habis masa kerjanya. Di Provinsi Jatim ada 19 dari 38 kabupaten/kota, sedangkan sisanya bersamaan dengan Pilgub 2018. Dipandang dari sudut anggaran termasuk dalam rangka mewujudkan efisiensi anggaran, Kota Blitar, tahun ini telah disepakati mengajukan anggaran sebanyak 16 miliar.

Meskipun di tahun ini pemilihan dilakukan di tengah pandemi, mekanisme melaksanakan pemilihan secara global tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari peraturan yang dipakai sebagai pedoman, yaitu PKPU tahun 2017. Meskipun ada regulasi secara teknis, tetapi hampir sama regulasi diberlakukan pada saat pandemi, yang telah tertuang di dalam PKPU 13.

Ada tiga prinsip dasar di masa pandemi. Pertama, adalah kesehatan dan keselamatan *stake holder* kepemilihan. Hal ini adalah yang utama. Jadi pemilihan ini berlanjut ketika pemilih dan peserta benar-benar terjamin kesehatannya. Maka keluarlah PKPU No 6, yang merupakan PKPU *sapu jagat*. Mengatur semua tahapan pemilihan, harus berbasis pada protokol kesehatan, dan diperbarui lagi menjadi PKPU 10. Semua bisa jalan asal kepastian hukum regulasinya jelas.

Kedua, produk hukum bisa menjamin kesehatan di masa pandemi. Jadi produk hukum harus berbasis protokol kesehatan dan harus fleksibel. Verifikasi faktual calon perorangan, cokolit, pemutakhiran data pemilih, hingga uji publik, semua harus memenuhi protokol kesehatan yang bisa dilakukan tidak hanya dengan bertemu langsung. Jadi prosedurnya bisa dilakukan secara *online*.

Kampanye yang sebelumnya harus ada rapat umum, pada tahun 2020 sudah tidak diberlakukan. Rapat terbatas boleh dilakukan 50 orang, jadi produk-produk hukum ini sengaja didesain untuk memperkuat. Ketiga, penyelenggara berusaha menjamin prosesnya, sehingga tahapan bisa berjalan dengan hasil yang benar-benar terjamin kualitas integritas profesionalitas.

Selanjutnya, ketiga poin ini diramu kemudian dijadikan dasar bahwa Pilkada ini layak dilaksanakan. Di sisi lain, dalam segi anggaran

perlu diatur lagi, karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan melakukan protokol kesehatan.

## **Tahap Program dan Jadwal Pemilihan Serentak Lanjutan**

Dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 ada serangkaian aktivitas, agar bisa menyukkseskan pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020. Khususnya Pilwali di Kota Blitar.

Kegiatan sosialisasi yang mencakup aktivitas sebagai berikut: pendaftaran pemantauan pemilih dilakukan pada tanggal 1 November 2019 hingga 2 Desember 2020, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan pada tanggal 1 November 2019 hingga 8 Desember 2020, pendaftaran pelaksanaan survei dan hitung cepat dilaksanakan pada tanggal 1 November 2019 hingga 8 November 2020.

Usai sosialisasi dilakukan berlanjut dengan pembentukan KPPS dan PPDP. Pertama, pembentukan KPPS dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober hingga 23 November 2020. Pada saat pandemi ini, ada beberapa cara khusus ketika melakukan rekrutmen KPPS, yaitu usia minimal 18 tahun dan usia maksimal 50 tahun, adanya pemeriksaan kesehatan puskesmas yang lebih detail mulai dari tensi hingga penyakit bawaan. Kedua, pembentukan PPDP pada tanggal 24 Juni hingga 14 Juli 2020.

Aktivitas selanjutnya yaitu pemutakhiran yang meliputi: pencocokan dan penelitian, penyusunan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan DPT. Untuk Pemutakhiran data pemilih ada sedikit perubahan dari 800 jumlah pemilih per TPS, diatur menjadi 500 per TPS.

Pada tahun ini, DPT mencapai 114.890. Terdiri dari 56.024 laki-laki dan 58.866 perempuan dari 3 kecamatan dan 21 kelurahan. Sementara, TPS terdiri dari 259 TPS.

Ketika seluruh kegiatan pemutakhiran selesai, maka KPU Kota Blitar melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, yang meliputi kegiatan: a) Verifikasi faktual dilakukan pada tanggal 24 Juni hingga tanggal 12 Juli 2020, b) Rekapitulasi dukungan dilakukan pada tanggal 20 Juli hingga 21 Juli 2020, c) Penyerahan syarat dukungan perbaikan dilakukan pada tanggal 25 Juli hingga 27 Juli 2020, d) Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen perbaikan dilakukan pada tanggal 27 Juli hingga 4 Agustus 2020, e) Verifikasi faktual perbaikan dilakukan pada tanggal 8 hingga 16 Agustus 2020, dan rekapitulasi dukungan hasil perbaikan dilakukan pada tanggal 20 hingga 21 Agustus 2020.

Aktivitas selanjutnya yaitu pencalonan, yang mencakup: pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, dan penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 23 September 2020.

Pada Pilwali Tahun 2020 ada dua calon *incumbent* semua. Adapun proses pendaftaran meliputi pengumpulan berkas administrasi, tes kesehatan (tes covid swab), dan tidak ada tes wawancara.

Begitu serangkaian aktivitas pencalonan usai, berlanjut dengan kegiatan kampanye. Masa kampanye dimulai pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye pada Pilwali Tahun 2020 dilakukan dengan meminimalkan kontak langsung, karena mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19.



Pengadaan kampanye yang di dalam ruangan maksimal 50 orang dan 100 orang di luar ruangan, tapi tidak diijinkan. Masa kampanye paslon 71 hari. KPU hanya memfasilitasi *rolling* jadwal, sehingga tidak terjadi bersamaan di tempat yang sama dengan dibantu Bawaslu dan tim keamanan.

Baru setelah kampanye, pelaksanaan Pemilihan Serentak guna memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar dimulai. Pemungutan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelum ada COVID, di tingkat provinsi telah ada 311 TPS, dan rata-rata per TPS ada 300 pemilih. Namun, dari provinsi dianggap terjadi potensi temuan BPK karena tidak maksimal. Kemudian, dilakukan restrukturisasi, dan hasilnya ada 259 TPS, dengan jumlah pemilih di masing-masing TPS 400-500 orang. Kemudian, muncullah kebijakan baru untuk masing-masing TPS, yakni jumlah maksimal pemilih adalah 500 orang, padahal KPU belum melakukan coklit.

Pihak KPU Kota Blitar juga mengirim surat ke SKPD untuk mengurus surat kematian. Karena tidak semua orang yang meninggal mengurus akta kematiannya. Jadi rata-rata di TPS tidak sampai 500. Kemudian mengoptimalkan semua itu supaya lancar. Intinya, TPS bisa mengakses pemilih dan bisa mematuhi protokol kesehatan.

Untuk penghitungan suara dilakukan antara tanggal 9 Desember hingga tanggal 11 Desember 2020. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan mulai tanggal 13 Desember hingga 17 Desember 2020. Untuk pengumuman hasil rekapitulasi pemungutan suara dilakukan pada tanggal 13 Desember hingga tanggal 23 Desember 2020.

**Berikut Detail Perolehan Suara dari Masing-Masing Paslon  
di Tiap Kelurahan**

**Di Setiap Kecamatan Kota Blitar**

**A. Kecamatan Sanan Wetan**

No.	Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara		
		No Urut 1	No Urut 2	Suara Tidak Sah
1	Gedog	2021	3057	163
2	Ploso Kerep	1261	1559	113
3	Klampok	1506	1553	94
4	Sanan Wetan	2091	2581	189
5	Rembang	905	906	62
6	Karang Tengah	1594	2102	194
7	Bendo Gerit	1846	2673	185
<b>Jumlah Total</b>		13662	18114	1234

**B. Kecamatan Kepanjen Kidul**

No.	Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara		
		No Urut 1	No Urut 2	Suara Tidak Sah
1	Kepanjen Kidul	1439	2922	199
2	Ngadirejo	1035	1121	99
3	Sentul	2051	2710	155
4	Kauman	1620	2049	163
5	Tanggung	1845	1667	125
6	Bendo	1210	2267	156
7	Kepanjen Lor	1247	1998	125
<b>Jumlah Total</b>		10447	14734	1022

### C. Kecamatan Sukorejo

No.	Kelurahan	Jumlah Perolehan Suara		
		No Urut 1	No Urut 2	Suara Tidak Sah
1	Pakunden	1687	3500	177
2	Blitar	1188	1723	71
3	Tlumpu	1240	1209	70
4	Turi	879	984	68
5	Karang Sari	1577	1561	129
6	Sukorejo	2562	2385	150
7	Tanjung Sari	1888	3182	209
<b>Jumlah Total</b>		13253	17410	1032

Dan yang terakhir adalah penetapan calon terpilih. Pilwali Tahun 2020 dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua (Santoso–Tjutjuk Sunario) mendapatkan 50.258 suara, sedangkan pasangan nomor urut satu (Henry Pradipta Anwar–Yasin Hermanto) dengan memperoleh suara sebanyak 37.362.

Jumlah suara sah mencapai 87.620 suara, sedangkan yang tidak sah ada 3.288 suara. Dengan penggunaan hak pilih mencapai 90.908 orang dengan jumlah DPT 114.890 orang.

Penetapan calon terpilih paling lama lima hari pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Jika terjadi sengketa, maka akan mengikuti jadwal MK.

*Stake holder* yang turut menyukseskan Pilwali tahun ini antara lain: KPU RI, masyarakat selaku peserta pemilihan, partai politik sekaligus calon wali kota dan calon wakil wali kota, Pemerintah Kota Blitar, Bawaslu, Komunitas, Kepolisian, Satpol PP, Dispendukcapil,

Bangkesbangpol, Tim Kesehatan, dan Relawan demokrasi duta pemilih.

## **Lika-Liku Pilwali Tahun 2020**

Ketika menjalankan Pilwali Tahun 2020 secara teknis tidak ada halangan, lumrah atau biasa. Dalam kampanye tidak ada hambatan teknis yang berarti. Pelaksanaan kampanye tetap menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan secara terbatas.

Meskipun kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersinggungan langsung dengan calon, secara otomatis harus tepat dan benar. Sebab, ketika salah, maka akan berimbas pada hukum. Ketika berada di posisi politik yang hangat dan regulasi turun dalam waktu yang *mepet*, pihak KPU harus mengambil kebijakan yang tepat sehingga tidak menyalahi regulasi. Tapi di sisi lain regulasi ini tidak menyudutkan dari peserta pemilihan. Dalam menangani suasana seperti ini dibutuhkan orang lapangan yang benar-benar tahu regulasi. Di sisi lain, adanya perubahan di PKPU lama dengan yang sekarang harus disampaikan, sehingga semua bisa sinkron. Hal tersebut juga menjadi tantangan bagi KPU.

Ada banyak hal baru saat pemungutan suara di masa pandemi. Misalnya, ketika ada yang positif maka KPPS harus mendampingi pemilih. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19 menjadikan dua kali kerja. Kebijakan dari atas diturunkan berbasis anggaran yang dibatasi. Bahkan uang yang sudah ditransfer tidak bisa digunakan, karena harus memenuhi beberapa prosedur.

Di sisi lain, pembatasan kreatifitas yang dibebaskan tetapi tetap mengacu batas regulasi, sehingga dibutuhkan penyesuaian. Serta sosialisasi tahapan beserta pencegahan Covid-19 harus

dilakukan melalui komunikasi dengan bidangnya masing-masing.

## **KPU TERUS BERBENAH**

Telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para Komisioner KPU Kota Blitar dalam menjalankan Pilwali di tengah pandemi Covid-19, namun semangat para Komisioner KPU Kota Blitar untuk menjadi lebih baik terus membara.

Bahkan hal tersebut disampaikan langsung oleh Hernawan M. Khabib, S. Pd.I., selaku Divisi Teknik, “Harapannya ada strategi yang lebih baik guna menyongsong pemilu yang akan datang.”

Meskipun demikian dengan diselenggarakannya Pilwali di tengah pandemic, maka banyak pelajaran yang didapat dari sistem yang baru, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ninik Solikhan, S. Pd., selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. “Menjadikan pembelajaran demokrasi dari yang sebelumnya, menjadikan sejarah tersendiri serta turut mengutamakan tahapan keselamatan.”

Kemudian, harapan yang lebih spesifik terkait dengan penyelenggaraan Pilwali Tahun 2020 yang bersamaan dengan masa pandemic, Edy Saputra, S. Pd., selaku Divisi Hukum dan Pengawas juga ikut menuturkan.

Dia menjelaskan bahwa, “Iklim dan atmosfer politik secara nasional maupun lokal, harus betul-betul sehat karena seberapa besar peran KPU, akan selalu banyak kegaduhan. Maka dibutuhkan banyak usaha, tidak saja melek politik, tetapi juga membutuhkan pihak-pihak tentang yang memahami politik sehingga bisa mencerdaskan dan berkualitas. Politik tidak hanya tanggung jawab KPU, tapi

semua pihak. Semua kegaduhan harus bisa diminimalisir. Menang kalah bukan sesuatu persoalan. Saya yakin dan percaya ada anak muda yang mulai suka politik, tidak saja hanya politik praktis, tapi kemampuan melihat kondisi sekeliling itu juga politik, karena buta yang sesungguhnya adalah buta politik. Inilah cara elegan alasan anak-anak muda harus mengambil peran itu.”

Disambung dengan harapan yang disampaikan oleh Rangga Bisma Aditya, S. Sos., selaku Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM. Dia berharap bahwa, “Ke depan dari pusat ada aturan baku untuk sosialisasi sehingga kreatifitas yang dilepas ada regulasinya. Contoh relawan demokrasi hanya dibentuk, tapi kurang jelas esensi dari kerjanya, sehingga ke depannya ada regulasi yang tepat untuk pembetulan dan tugasnya. Optimalisasi Rumah Pintar Pemilu juga perlu. Pendewasaan Pemilu tidak hanya dalam kontestasi pemilihan ini, tapi bisa lebih baik dalam partisipasi masyarakatnya.”

Penyampaian harapan dari para Komisioner KPU Kota Blitar di akhir oleh Choirul Umam, S. Pd selaku Ketua Komisioner KPU Kota Blitar. Selain memiliki harapan agar KPU Kota Blitar menjadi lebih baik, dia juga menyampaikan terkait program yang akan dijalankan di tahun berikutnya dengan tujuan agar semangat berbenah senantiasa membara. Inilah yang dituturkan oleh Ketua Komisioner KPU Kota Blitar untuk KPU menjadi lebih baik:

“Memaksa para komisioner untuk menulis, menghasilkan buku. Mengadakan program demokrasi *podcast*. Mengejar kantor KPU agar segera dipermanenkan. Bersinergi antar komisioner, sekretaris, staf, dan Kasubag. Perbedaan itu tetap ada, namun yang terpenting tergantung bagaimana menyelesaikannya.”

\*\*\*

# **PROFIL KOMISIONER**

## **PROFIL ANGGOTA KPU KOTA BLITAR**

**PERIODE 2019-2024**



*Choirul Umam, S.Pd.*

**KETUA MERANGKAP DIVISI KEUANGAN, UMUM,  
RUMAH TANGGA, DAN LOGISTIK**

Berlatar belakang pendidikan Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang (2001), setelah sempat mengenyam studi Perbandingan Agama di Universitas Muhammadiyah Surabaya, meskipun hanya satu semester. Pria kelahiran Surabaya 8 Maret 1974 ini memiliki hasrat kuat untuk mampu menerjemahkan karya-karya berbahasa Inggris yang bertema sosial agama. Sejak

remaja telah menempa diri di banyak aktivitas, karenanya semasa mahasiswa ia pun tidak bisa berdiam diri untuk tidak beraktivitas dalam dunia pergerakan.

Sejak memasuki dunia kampus, ia menjatuhkan pilihan organisasi kemahasiswaannya pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) hingga akhir masa kuliahnya, selain juga sempat menimba pengalaman jurnalistiknya pada koran kampus “Bestari” dan majalah Fakultas “Didaktik” sebagai wartawan yang dilakoninya di awal-awal menjadi mahasiswa. Tahun 2000 dipercaya menjadi Ketua Senat FKIP UMM dan di tahun yang sama mendirikan NGO yang bergerak di bidang pemikiran sosial dan agama, *Religious and Social Studies* (Resist) Malang dan dipercaya sebagai Sekretaris.

Meskipun sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, jiwa berserikatnya tidak bisa padam. Sekitar tahun 2010 sempat dipercaya sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Blitar, juga sebagai Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Blitar. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bakesbangpol memberikan kepercayaan padanya sebagai Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) selama 3 periode, selain tetap aktif di Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Blitar, serta Ketua Forum Keluarga Alumni (Fokal) IMM Blitar.

Riwayat pekerjaannya diawali sebagai *translator freelance* pada sejumlah penerbitan dan memiliki beberapa karya terjemahan. Tahun 2005, sempat menjadi Kepala SD Aisyiyah Jatinom, sembari



mengelola *event organizer* yang berbasis di Malang.

Tahun 2009 mencoba peruntungan dengan ikut serta dalam rekrutmen anggota KPU Kota Blitar periode 2009-2014 tetapi keberuntungan belum berpihak meskipun masuk sampai 10 besar.

Tahun 2014 adalah pengalaman pertamanya menjadi penyelenggara Pemilu, setelah akhirnya berhasil masuk 5 besar dalam seleksi KPU Kota Blitar dan ditetapkan sebagai nahkoda Divisi Teknis dan Data (yang di kemudian hari menjadi Divisi Perencanaan Data dan Informasi) untuk periode 2014-2019.

Tahun 2019 ternyata kepercayaan masih disematkan kepada pria yang telah dikaruniai 5 orang anak ini, dan melalui Rapat Pleno, secara aklamasi, diamanahi sebagai Ketua KPU Kota Blitar untuk periode 2019-2024.



*Rangga Bisma Aditya S.Sosio.*

**DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,  
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM**

Lahir di Kediri pada tanggal 25 Juni 1988, menjadikannya sebagai Anggota Komisioner KPU Kota Blitar termuda dalam periode 2019-2024. Sebelum dilantik menjadi Anggota Komisioner, beliau aktif dalam beberapa organisasi, seperti KONI Jawa Timur (2017-2019), Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Blitar Raya (2019), Asosiasi Sosiologi Kota Blitar (2018-2019), Dewan Kesenian Kabupaten Blitar (2018-2019), Pemuda Pancasila Kota Blitar (2018-2019), dan Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (2017-2019).

Pernah menjabat sebagai Direktur PKBM Tunas Pratama Kota Blitar (2016-2019), Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Blitar (2018), Sekretaris Umum Dewan Kesenian Jawa Timur (2014-2016), Ketua Umum Koordinator Daerah GMNI Jawa Timur (2011-

2013), Departemen Organisasi dan Kaderisasi HIPMI Jawa Timur (2015-2018), Direktur Taman Baca Masyarakat Gema Pustaka Kota Blitar, dan BEM Fisip Universitas Airlangga Surabaya (2008-2009).

Alumnus Program Studi S1 Sosiologi Universitas Airlangga ini juga aktif sebagai penulis, narasumber dan moderator dalam beberapa bidang, diantaranya sosiologi, demokrasi, kebudayaan, kebangsaan, kepemudaan, ekonomi kreatif, dan pendidikan masyarakat. Pernah menulis dan menjadi editor beberapa buku seperti *Proyeksi Kesenian Jawa Timur*, *Kitab Rembug Seniman Jawa Timur*, dan *Catatan Kreatif Rintisan Tokoh Film Jawa Timur*.

Dalam hal riset, pernah aktif sebagai peserta magang kerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2010, peneliti lapangan di LPPM Universitas Airlangga Surabaya tahun 2011-2013, dan peneliti lapangan di Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2014. Saat ini Rangga Bisma Aditya dipercaya sebagai Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Blitar periode 2019-2024.



*Ninik Sholikhah, S.Pd*

## **DIVISI PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI**

Lahir di Blitar, tanggal 28 Maret 1981. Alumnus Universitas Muhammadiyah Malang Program Studi Pendidikan Matematika & Komputasi. Mengawali karier dari seorang pengajar honorer di Sekolah Dasar Negeri tepatnya sejak 21 Juni 2007, sampai akhirnya dapat bergabung di KPU Kota Blitar periode 2019-2024. Dan selama menjadi pegawai honorer, beliau aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan dan penyelenggara pemilu di Kota Blitar.

Tergabung aktif dalam KKOP (Kelompok Kerja Operator Pendataan) mulai 2011, Bendahara Forwara (Forum Sukwan Sekolah Negeri Kota Blitar) mulai 2012, sampai akhirnya dapat bergabung dalam keluarga besar KPU Kota Blitar.

Dalam penyelenggaraan pemilu, beliau mulai aktif dalam Pemilu

Legislatif 2009 (PPS), Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2010 (PPS), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2013 (PPK), Pemilu Legislatif 2014 (PPK), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 (PPK), Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2015 (PPK), Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 (PPK), dan Operator Situng 2019.



*Edi Saputra S.Pd.*

## **DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN**

Pengalamannya sebagai jurnalis dan redaktur di media harian regional hingga nasional, beririsan dengan isu serta tema kepemiluan. Diskursus demokrasi dan tren politik elektoral tidak berjarak jauh dengan rutinitas dirinya. Tidak mengherankan, selain kerap menulis peristiwa dan tahapan kepemiluan di media massa, ia juga dipercaya mengisi ruang-ruang publik sebagai moderator hingga narasumber. Bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu ia kerap tampil di acara *talkshow* di radio lokal.

Di Blitar, Bang Edy, sapaan akrab pria kelahiran Bengkalis Riau tahun

1973 ini sempat menjadi panelis debat pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010 yang diselenggarakan KPU setempat. Pada 2014, mantan aktivis pers kampus di IAIN Sunan Ampel (Kini IAIN Tulungagung) itu juga aktif menginisiasi gerakan Politik Bersih dengan menggelar Workshop Citizen Jurnalisme untuk Politik Bersih. Debut penulis buku *Memotret Negeri, Mendaras Ulang Jurnalisme Makna (Intrans, 2017)* ini juga terendus sebagai pegiat Pemilu Berintegritas dalam bentuk sosialisasi, advokasi dan edukasi tema *Pemilu untuk Rakyat* kolaborasi Blitar Corruption Watch (BCW) dan Malang Corruption Watch (MCW) 2004.

Komitmen pria yang kini dipercaya sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Blitar juga terendus dalam dunia kepenyairan. Dua puisinya, *Senyumku Ada Lima* dan *Lagu untuk Bento* masuk dalam antologi *Puisi Menolak Korupsi (PMK-2013) Penyair Indonesia* terbitan Forum Sastra Surakarta, bersama Sutardji Calzoum Bahri, Gol A Gong hingga Sosiawan Leak. Jejak lain, ayah dua anak ini pernah aktif menapaki dunia berkesenian sebagai Ketua Litbang Dewan Kesenian Kabupaten Blitar tahun 2005-2010 saat digawangi Bagus Putu Parto. Pegiat demokrasi ini juga sempat berjibaku sebagai aktivis ekstra kampus yakni HMI dari tingkat cabang, wilayah, hingga Pengurus Besar.



*Hernawan Miftakhul Khabib S.Pd.I*

***DIVISI TEKNIS PENYELENGGARA***

Lahir di Blitar, tanggal 23 Oktober 1987, lelaki bernama lengkap Hernawan Miftakhul Khabib yang akrab dipanggil Mas Habib ini adalah alumnus STAIN Tulungagung yang sekarang menjadi IAIN Tulungagung tahun 2011. Beralamatkan di JL Tidar No 10, Kauman Kota Blitar. Banyak orang menyebutnya kampung Gresikan dan sekarang lebih akrab dengan Camondan.

Mulai meniti karir di Madrasah Ibtidaiyah tahun 2011, kemudian bergabung di keluarga besar KPU Kota Blitar. Selain di madrasah, beliau juga aktif di penyelenggara di KPU, mulai dari KPPS sebagai KPPS 5 dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, dilanjutkan PPK



dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2013, Pemilu Legislatif tahun 2014, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2015 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2018.

Sekarang aktif di KPU Kota Blitar sebagai Komisioner di Divisi Teknis untuk periode 2019–2024. Aktif di organisasi mulai dari Pemuda Remaja Masjid Agung sebagai ketua tahun 2012–2015 di periode pertama, dan 2015–2018 di periode kedua. Inilah yang menjadi modal awal dalam membangun sebuah jejaring.



# Daftar Pustaka

## Jejak Sejarah KPU

Asfar, Muhammad. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955 – 2004, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006).

Hilmy Maulida, Faishal. Di Balik Bilik Sastra, Kontruksi Pemilu Pertama di Indonesia 1953-1956, (Jakarta: Kemdibud RI, 2018).

Dalam buku Sejarah PEMILU yang Dihilangkan: Kantor Pemilihan Pusat Provinsi Yogyakarta. Tugas KPPS, KPS, TKP, KPPP menurut Undang – Undang No 7/1950 dan Peraturan Pemerintah No. 36/1950 untuk Menyelenggarakan /Melaksanakan Pemilihan Umum. (Yogyakarta: KPPP Yogyakarta, 1951).

## PERIODE 1

### Dokumen KPU Kota Blitar

1. Laporan Pemilu 2004 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden).
2. Laporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar 2005.

### **Sumber lain:**

*Diskusi dan wawancara pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 bersama :*

1. Bapak Andrias Edison
2. Bu Rita Triana
3. Bapak Suhartaji

Alfan Taufieq Syah Alam. 2017. “DOMINASI PDIP DI KOTA BLITAR TAHUN 1999-2004”. Skripsi. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya, Malang.

### **Sumber internet :**

*News.detik.com*. 2008. “KPUD Tetapkan 5 Pasangan Cagub”. (<https://news.detik.com/berita/d-956618/kpud-tetapkan-5-pasangan-cagub>) diakses pada 2 Desember 2020 jam 08.42 WIB.

*News.detik.com*. 2008. “Pilgub Jatim, Jago PDIP Keok di Kota Blitar”. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-979945/pilgub-jatim-jago-pdip-keok-di-kota-blitar>). Diakses pada 2 Desember 2020 jam 09.14 WIB.

*Republika.co.id*. 2008. “Rekapitulasi Suara Pilgub Jatim. (<https://republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/08/11/12/13284-rekapitulasi-suara-pilgub-jatim>). Diakses pada 2 Desember 2020 jam 10.25 WIB.

## **PERIODE 2**

### **Dokumen KPU Kota Blitar**

1. Laporan Pileg 2009 (Pemilihan Legislatif DPR, DPRD, DPR RI, dan DPD).
2. Laporan Pemilu 2009 (Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden).
3. Laporan Pilwakot 2010 (Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar)

### **Berkas KPU Kota Blitar**

- Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dalam Wilayah Kabupaten/Kota.
- Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dalam Wilayah Kabupaten/Kota.

### **Sumber Internet**

Kominfo Jatim. (2009). *Kominfo KPU Jatim Lantik Anggota Baru 35 KPU Kabupaten*. (<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/17411>). Diakses pada 20 November 2020

Pemerintah Kota Blitar. (2009). *Ratusan DPT Tercoret*. Blitar: Situs

Resmi Pemerintah Kota Blitar. (<https://blitarkota.go.id/id/berita/ratusan-dpt-tercoret>). Diakses pada 25 November 2020

KPU Kota Jaktim. (2009). *Pemilu 2009*. Jakarta Timur: Situs Resmi KPU Kota Jakarta Timur. (<https://jakartatimur.kpu.go.id/pemilu-2009/>). Diakses pada 4 Desember 2020

*News.detik.com*. 2013. “Hasil Final Rekapitulasi KPU Jatim, KarSa Raih 8.195.816 Suara”. (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-2352304/hasil-final-rekapitulasi-kpu-jatim-karsa-raih-8195816-suara>). Diakses pada 21 Februari 2021.

### **Sumber lain:**

*Diskusi dan wawancara pada Sabtu 3 Oktober 2020*

1. Bapak Andrias Edison
2. Bapak Abdul Basyid

*Wawancara pada hari Ahad, 7 Februari 202*

1. Bapak Herwidi Bastugito

## **PERIODE 3**

### **Dokumen KPU Kota Blitar**

1. Laporan Pemilu 2014 (Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden).
2. KPU Kota Blitar. (2015). Buku Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2015. Blitar: KPU Kota Blitar.

### **Berkas KPU Kota Blitar**

- a. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

### **Sumber lain :**

*Wawancara pada hari Ahad, 7 Februari 2021 bersama:*

1. Bapak Herwidi Bastugito

*Wawancara pada hari Senin, 8 Februari 2021 bersama:*

1. Bapak Sigit Pramusanto
2. Bapak Edi Winarno
3. Bu Ummu Chairu Wardani

### **Sumber internet :**

KPU Kota Blitar. (2015). RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PILWALI BLITAR TAHUN 2015. Blitar: KPU Kota Blitar. Diakses pada 11 Januari 2021 dari <http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/rapat-pleno-terbuka-penetapan-pasangan-calon-terpilih-pada-pilwali-blitar-tahun-2015>

KPU Kota Blitar. (2015). RATUSAN PESERTA RAMAIKAN JALAN SEHAT LAUNING PEMILIHAN WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA BLITAR TAHUN 2015. Blitar: KPU Kota Blitar. Diakses pada 5 Februari 2020 dari <http://kpu.blitarkota.go.id/detailpost/ratusan-peserta-ramaikan-jalan-sehat--launing-pemilihan-walikota-dan-wakil-walikota-blitar-tahun-20>

Sujarwoko, D.H. (2015, 16 Desember). Petahana Samanhudi-Santoso menangi pilkada Kota Blitar. Antara News, diakses pada 5 Februari 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/535443/petahana-samanhudi-santoso-menangi-pilkada-kota-blitar>.

*News.detik.com*. 2018. “Pilgub Jatim 2018: Akhirnya, Khofifah Menang”. Diakses pada 2 Maret 2021 dari (<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4364975/pilgub-jatim-2018-akhirnya-khofifah-menang>)



## **PERIODE 4**

### **Dokumen KPU Kota Blitar**

- a. Laporan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden & Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, & DPRD Kab/Kota Tahun 2019

### **Berkas KPU Kota Blitar**

- b. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Provinsi Jawa Timur
- c. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Provinsi Jawa Timur
- d. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Provinsi Jawa Timur
- e. Data Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Provinsi Jawa Timur Kota Blitar

- f. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dari Setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota Blitar Provinsi Jawa Timur

### **Sumber lain**

*Diskusi dan wawancara pada Sabtu 3 Oktober 2020*

- Ibu Ninik Sholikhah
- Bapak Miftakhul Khabib

*Wawancara pada 5 Oktober 2020*

- Bapak Rangga Bisma Aditya

*Wawancara pada Sabtu, 12 Oktober 2020*

- Bapak Choirul Umam
- Bapak Edy Saputra

*Wawancara pada 30 Desember 2020*

- Bapak Rangga Bisma Aditya
- Ibu Ninik Sholikhah
- Bapak Edy Saputra
- Bapak Choirul Umam

*Wawancara pada 16 Januari 2021*

- Bapak Choirul Umam

**Sumber internet:**

KPU Kota Blitar. (2020). PROFIL ANGGOTA KPU KOTA BLITAR PERIODE 2019-2024. Blitar: KPU Kota Blitar. Diakses pada 11 Januari 2021 dari <http://kpu.blitarkota.go.id/pages/komisioner>

## PROFIL PENYUSUN



**ANA FITRIANI**, usia 23 tahun. Saat ini domisili di Kesamben. Berjualan buku di @serayabuku. Sedikit hobi membaca buku berbagai genre, tertarik dengan isu sosial perempuan dan anak. Bisa ditemui di laman instagram @anaafitt



**ULIL MUSYAEKH**, lahir di Blitar, 27 November. Pecinta literasi, seni rupa, teater, olah raga, dan kegiatan *volunteering*. Salah satu moto dalam hidupnya adalah “Tidak perlu meyakinkan manusia atas apa yang perlu diyakinkan, cukup yakinkan Tuhan”.



**ALFA ANISA**, lahir di Blitar 28 Maret. Mencintai puisi, kereta api dan sunyi. Sehari-hari berkegiatan di Komunitas Penulis Hangudi Blitar. Beberapa karyanya dimuat di media massa dan antologi bersama. Surat untuk Luka adalah antologi puisi tunggalnya. Bisa dihubungi di fb alfa anisa, ig @alfa anisa dan rumah karyanya di anisaalfinurfadila.wordpress.com.



**ALFIN LULUK KAMALIA**, dengan nama pena **Lulu Kamalia**, lahir di Blitar. Merupakan Mahasiswa Semester akhir Progam Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Aktif di komunitas Forum Lingkar Pena (FLP) dan aktif di Pers mahasiswa BHANU TIRTA Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Memiliki hobi traveling, membaca serta menulis. Karyanya

Secangkir Rasa, Masih Cinta Indonesia serta menulis di Buku antologi Cerpen Jejak Sang Putra Fajar, dan Cerita Setelah Fajar. Pembaca bisa lebih dekat dengan penulis akun media sosial, Instagram, Twiter, Facebook @Kamalia.lulu, serta situs web <https://lukamalia.blogspot.com/> email: [kama52146@gmail.com](mailto:kama52146@gmail.com).



**ZULFA ILMA NURIANA**, Mahasiswa Psikologi Islam, IAIN Tulungagung. Lahir di Blitar, 4 Mei 2001. aktif di berbagai komunitas, organisasi, maupun kerelawanan antara lain menjadi pengurus Forum Lingkar Pena (FLP) Blitar, koordinator Madrasah Relawan Regional Jatim, anggota Aktivis Peneleh, pendiri Pegiat Literasi Tanah Air (PELITA) Indonesia, anggota Relawan Pendidikan BAZNAS RI, dan lain-lain.

Alumni kegiatan Belajar Bersama Maestro yang diselenggarakan Kemendikbud tahun 2018 dan delegasi Istanbul Youth Summit 2020 menulis di blog wonoilmu.blogspot.com. Memiliki moto hidup alon-alon ning kelakon dan bermanfaat bagi ummat. Jika ingin mengenal jauh tentangnya bisa hubungi melalui Ig: zulfailma36 Gmail: [nuriana633@gmail.com](mailto:nuriana633@gmail.com) Twitter: nuriana633 Fb: Zulfa Ilma Nuriana Line: zulfailma36



**MUKHAMAD CANDRA SETYAWAN**, lahir di Blitar, 17 Februari 1997. Mahasiswa prodi Administrasi Niaga tingkat akhir di UNISBA Blitar. Dapat dihubungi di Facebook Candra Setyawan dan Instagram @mcandra\_sty.



**ADINDA RAHMA DARA KINASIH**, lahir di Malang, 15 September. Menyukai buku dan lagu sejak kecil, kemudian mulai menulis sejak MTs. Mulai membuat blog sejak 2011, hingga kini menjadi sebuah *website* bernama [www.ruparasa.com](http://www.ruparasa.com). Sempat mengikuti ekskul Jurnalistik saat di bangku SMA, hingga kemudian bergabung di Komunitas Penulis Blitar sejak 2015.

Adinda dapat ditemui lewat *website*-nya, [www.ruparasa.com](http://www.ruparasa.com) dan *Instagram* @adinda\_dara.



**ROSY NURSITA ANGGRAINI**, Akrap di panggil dengan nama Rosy, perempuan yang lahir di Blitar pada 24 Januari 1995 ini memiliki nama lengkap Rosy Nursita Anggraini. Beralamat di Dusun Cimpling RT 01/01 Desa Siraman Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. Santri aktif Pondok Pesantren Al- Falah Siraman Kesamben Blitar ini merupakan alumni Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang. Anggota aktif FLP Blitar sekaligus menjadi penulis

*freelance*. Dapat di hubungi melalui e-mail [rosynursitaanggraini@yahoo.co.id](mailto:rosynursitaanggraini@yahoo.co.id), fb Rosy Nursita A, IG rosy\_nursita, serta nomor HP/WA 082334724195.

dan kajian seputar demokrasi, kebangsaan,



**HENDRA BURHANUDIN**, seorang guru Bahasa Indonesia di MTs Maarif Udanawu. Lahir di Blitar, 29 Oktober 1990. Penulis memiliki seorang istri (Inung Li'atul Azizah) dan anak laki-laki (Muhammad Noah Al Fatih). Beberapa karyanya telah dibukukan dalam antologi puisi bersama yaitu Mengakrabi Sunyi (2017), Secangkir Rasa (2020), Masih Cinta Indonesia (2020), Marsinah Perempuan LacurKesayangan Tuhan (2020), dan buku kumpulan puisi solo

Labirin Rahsa (2021).

Belajar, belajar, dan belajar adalah moto hidup penulis. Selain menjadi guru, penulis juga aktif di berbagai organisasi literasi, di antaranya: Ketua di Forum Lingkar Pena (FLP) Cabang Blitar, Wakil Ketua di Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB) Kabupaten Blitar, dan Sekretaris di Ikatan Guru Madrasah Penggiat Literasi (IGMPL) Blitar. Penulis dapat ditemui di FB *Hendra Burhanudin*, IG @ *hendraburhanudin*, dan kanal YouTube *Edu Media Indonesia*.



**AHMAD FAHRIZAL AZIZ** lahir di Blitar. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di tanah kelahirannya. Melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi di Malang dan Jogja. Ia aktif di banyak organisasi antara lain Forum Lingkar Pena, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah hingga Gerakan Pemasarakatan Minat Baca (GPMB). Untuk menopang aktivitas literasinya, ia mendirikan Komunitas Muara Baca sebagai forum diskusi

sejarah dan ke-blitaran yang tertuang dalam portal online di [www.insight-blitar.my.id](http://www.insight-blitar.my.id) sembari mengembangkan toko onlinenya. Bisa dihubungi melalui email [fahrizulaziz@gmail.com](mailto:fahrizulaziz@gmail.com), instagram @fahrizalaziz atau nomor ponsel 083812739822 (wa/telegram).